

LAPORAN AKHIR

Kajian Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kabupaten Pamekasan



KERJASAMA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
DENGAN
LEMBAGA PENGABDIAN DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS AIRLANGGA
2019

KATA PENGANTAR

Di Kabupaten Pamekasan, saat ini tercatat ada 13 kecamatan, 178 desa dan 11 Kelurahan. Sebagai daerah yang sedang dalam proses transisi membangun dan berkembang cukup pesat, sejumlah wilayah di Kabupaten Pamekasan dalam lima tahun terakhir harus diakui telah mengalami berbagai perubahan. Kemajuan demi kemajuan telah terjadi di berbagai kecamatan. Desa-desa yang dulu relatif tertinggal kini mulai maju dan telah memperlihatkan sejumlah perubahan yang signifikan. Hal ini tentu membawa sejumlah konsekuensi –termasuk kemungkinan perubahan status desa menjadi kelurahan.

Di Kabupaten Pamekasan, sejumlah desa belakangan ini telah mengalami perubahan dan perkembangan, terutama sejak digelontorkan dana yang cukup besar ke seluruh desa. Dalam Program Dana Desa, ratusan juta bahkan sekitar satu milyar dana langsung diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga tidak sedikit desa mulai maju dan mengejar ketertinggalan.

Kegiatan sebagaimana dilaporkan bermaksud mengkaji kemungkinan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini mendesak dilakukan, sebab berbagai perubahan yang signifikan telah terjadi, dan hal itu tentu membutuhkan respon yang tepat dari pemerintah maupun masyarakat.

Selanjutnya Kegiatan Penyusunan Kajian Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kabupaten Pamekasan ini dapat diselenggarakan dan terselesaikan dengan tepat waktu, berkat dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bupati dan Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan ini.
2. Ketua Bappeda Kabupaten Pamekasan yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan bagi kelancaran terselenggaranya kegiatan ini.

3. Kepala dan staf di seluruh dinas terkait dan *stakeholders* yang telah bersedia memberikan masukan dan informasi untuk melengkapi bahan-bahan yang dibutuhkan serta membantu kelancaran proses administrasi dan pengumpulan data yang diperlukan dalam kegiatan ini.
4. Seluruh informan yang telah dengan sukarela memberikan keterangan dan data yang mendukung dan memperkaya hasil kajian serta membantu proses pengumpulan data di beberapa Kecamatan di Kabupaten Pamekasan.

Kami berharap hasil kajian yang dilakukan ini dapat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan dalam melakukan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Pamekasan guna memajukan desa-desa di Kabupaten Pamekasan.

Surabaya,

Tim Pelaksana

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Permasalahan	3
3. Tujuan	3
4. Kerangka Analisis	4
5. Metode	5
BAB II PERUBAHN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN: KERANGKA ANALISIS	7
BAB III GAMBARAN UMUM DESA-DESA DI KABUPATEN PAMEKASAN	9
1. Kecamatan Pamekasan	10
2. Kecamatan Tlanakan	33
3. Kecamatan Pademawu	53
BAB IV ANALISIS KELAYAKAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN PAMEKASAN	77
1. Prasyarat Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan	77
2. Kelayakan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan	81
3. Pemetaan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan	101
BAB V KEBUTUHAN DAN PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN	113
1. Karakteristik Responden	114
2. Akses Ke Pusat Layanan Publik	118
3. Manfaat yang Diperoleh Masyarakat	123
4. Kebutuhan dan Harapan Masyarakat	124
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	129
1. Kesimpulan	129
2. Saran	132
Daftar Pustaka	135

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Lokasi (N=200)	6
Tabel III.1	Keadaan Umum Geografis dan Iklim di Kecamatan Pamekasan 2017	11
Tabel III.2	Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Pamekasan 2017	11
Tabel III.3	Jarak Kantor Desa/Kelurahan ke Fasilitas (Km) di Kecamatan Pamekasan 2017	12
Tabel III.4	Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan di Kecamatan Pamekasan 2017	13
Tabel III.5	Banyaknya Perangkat Desa/Kelurahan Menurut Desa di Kecamatan Pamekasan 2017	14
Tabel III.6	Banyaknya Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin di Kecamatan Pamekasan 2017	15
Tabel III.7	Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Pamekasan 2017	16
Tabel III.8	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Pamekasan 2016/2017	18
Tabel III.9	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Sekolah Dasar Swasta di Kecamatan Pamekasan 2016/2017	19
Tabel III.10	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SLTP Negeri di Kecamatan Pamekasan 2016/2017	19
Tabel III.11	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SLTP Swasta di Kecamatan Pamekasan 2016/2017	20
Tabel III.12	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SMU Negeri di Kecamatan Pamekasan 2016/2017	21
Tabel III.13	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SMU Swasta di Kecamatan Pamekasan 2016/2017	22
Tabel III.14	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SMK Negeri di Kecamatan Pamekasan 2016/2017	23
Tabel III.15	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SMK Swasta di Kecamatan Pamekasan 2016/2017	24
Tabel III.16	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Ibtidaiyah di Kecamatan Pamekasan 2016/2017	24
Tabel III.17	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Pamekasan 2016/2017	25
Tabel III.18	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Madrasah Aliyah di Kecamatan Pamekasan 2016/2017	26
Tabel III.19	Banyaknya Pondok Pesanren dan Madrasah Diniyah di Kecamatan Pamekasan 2017	27
Tabel III.20	Banyaknya Fasilitas Kesehatan Masyarakat Menurut Desa di Kecamatan Pamekasan 2017	29

Tabel III.21	Banyaknya Tenaga Kesehatan Masyarakat Menurut Desa di Kecamatan Pamekasan 2017	30
Tabel III.22	Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Desa di Kecamatan Pamekasan 2017	30
Tabel III.23	Banyaknya Fasilitas Olah Raga Menurut Desa di Kecamatan Pamekasan 2017	31
Tabel III.24	Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Desa dan Jenis Sarana di Kecamatan Pamekasan 2017	32
Tabel III.25	Keadaan Umum Geografis dan Iklim di Kecamatan Tlanakan 2017	34
Tabel III.26	Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Tlanakan 2017	34
Tabel III.27	Jarak Kantor Desa/Kelurahan ke Fasilitas (Km) di Kecamatan Tlanakan 2017	35
Tabel III.28	Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan di Kecamatan Tlanakan 2017	36
Tabel III.29	Banyaknya Perangkat Desa/Kelurahan Menurut Desa di Kecamatan Tlanakan 2017	37
Tabel III.30	Banyaknya Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tlanakan 2017	38
Tabel III.31	Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Tlanakan 2017	39
Tabel III.32	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Tlanakan 2016/2017	41
Tabel III.33	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Sekolah Dasar Swasta di Kecamatan Tlanakan 2016/2017	41
Tabel III.34	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Sekolah Dasar Luar Biasa di Kecamatan Tlanakan 2016/2017	42
Tabel III.35	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SLTP Negeri di Kecamatan Tlanakan 2016/2017	43
Tabel III.36	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SLTP Swasta di Kecamatan Tlanakan 2016/2017	44
Tabel III.37	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SMU Swasta di Kecamatan Tlanakan 2016/2017	44
Tabel III.38	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SMK Negeri di Kecamatan Tlanakan 2016/2017	45
Tabel III.39	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Ibtidaiyah di Kecamatan Tlanakan 2016/2017	46
Tabel III.40	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Tlanakan 2016/2017	47
Tabel III.41	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Madrasah Aliyah di Kecamatan Tlanakan 2016/2017	47
Tabel III.42	Banyaknya Fasilitas Kesehatan Masyarakat Menurut Desa di Kecamatan Tlanakan 2017	49

Tabel III.43	Banyaknya Tenaga Kesehatan Masyarakat Menurut Desa di Kecamatan Tlanakan 2017	49
Tabel III.44	Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Desa di Kecamatan Tlanakan 2017	50
Tabel III.45	Banyaknya Fasilitas Olah Raga Menurut Desa di Kecamatan Tlanakan 2017	51
Tabel III.46	Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Desa dan Jenis Sarana di Kecamatan Tlanakan 2017	52
Tabel III.47	Keadaan Umum Geografis dan Iklim di Kecamatan Pademawu 2017	54
Tabel III.48	Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Pademawu 2017	54
Tabel III.49	Jarak Kantor Desa/Kelurahan ke Fasilitas (Km) di Kecamatan Pademawu 2017	56
Tabel III.50	Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan di Kecamatan Pademawu 2017	57
Tabel III.51	Banyaknya Perangkat Desa/Kelurahan Menurut Desa di Kecamatan Pademawu 2017	58
Tabel III.52	Banyaknya Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin di Kecamatan Pademawu 2017	59
Tabel III.53	Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Pademawu 2017	60
Tabel III.54	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Pademawu 2016/2017	61
Tabel III.55	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Sekolah Dasar Swasta di Kecamatan Pademawu 2016/2017	62
Tabel III.56	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Sekolah Dasar Luar Biasa di Kecamatan Pademawu 2016/2017	63
Tabel III.57	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SLTP Negeri di Kecamatan Pademawu 2016/2017	64
Tabel III.58	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SLTP Swasta di Kecamatan Pademawu 2016/2017	64
Tabel III.59	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SMU Negeri di Kecamatan Pademawu 2016/2017	65
Tabel III.60	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SMU Swasta di Kecamatan Pademawu 2016/2017	66
Tabel III.61	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SMK Swasta di Kecamatan Pademawu 2016/2017	67
Tabel III.62	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Ibtidaiyah di Kecamatan Pademawu 2016/2017	68
Tabel III.63	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Pademawu 2016/2017	69
Tabel III.64	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Madrasah Aliyah di Kecamatan Pademawu 2016/2017	69

Tabel III.65	Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Madrasah Diniyah di Kecamatan Pademawu 2016/2017	70
Tabel III.66	Banyaknya Fasilitas Kesehatan Masyarakat Menurut Desa di Kecamatan Pademawu 2017	71
Tabel III.67	Banyaknya Tenaga Kesehatan Masyarakat Menurut Desa di Kecamatan Pademawu 2017	72
Tabel III.68	Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Desa di Kecamatan Pademawu 2017	73
Tabel III.69	Banyaknya Fasilitas Olah Raga Menurut Desa di Kecamatan Pademawu 2017	74
Tabel III.70	Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Desa dan Jenis Sarana di Kecamatan Pademawu 2017	75
Tabel IV.1	Cakupan Wilayah Desa/Kelurahan	82
Tabel IV.2	Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Desa	84
Tabel IV.3	Jumlah SDM Pemerintah di Desa/Kelurahan	87
Tabel IV.4	Sarana Poskesdes di Desa/Kelurahan	89
Tabel IV.5	Sarana Tenaga Medis	92
Tabel IV.6	Sarana Ibadah di Kelurahan	95
Tabel IV.7	Jumlah Fasilitas Olahraga	97
Tabel IV.8	Jumlah Pasar di Kelurahan	99
Tabel IV.9	Distribusi Penduduk dan Luas Wilayah Serta Rentang Kendali Antara Kecamatan dengan Desa/Kelurahan di Kabupaten Pamekasan	102
Tabel IV.10	Kelayakan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan	104
Tabel IV.11	Pemetaan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan	107
Tabel V.1	Identitas Responden (N=200)	115
Tabel V.2	Kondisi Ekonomi Keluarga Responden (N=200)	116
Tabel V.3	Kesulitan Yang Dhadapi Responden Ketika Pusat Layanan Publik Relatif Jauh (N=200)	119
Tabel V.4	Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Layanan Publik Yang Dibutuhkan	119
Tabel V.5	Jarak Tempat Tinggal Responden Dengan Berbagai Pusat Layanan Publik	121
Tabel V.6	Manfaat Yang Diperoleh Jika Status Desa Berubah Menjadi Kelurahan (N=200)	123
Tabel V.7	Harapan Masyarakat Terhadap Layanan Publik Yang Disediakan Pemerintah (N=200)	124
Tabel V.8	Dampak Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan	125
Tabel V.9	Perlu-Tidaknya Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan	126
Tabel V.10	Upaya Yang Perlu Dikembangkan Pemerinta Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	127

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Desa adalah sebuah istilah untuk menyebut sebuah wilayah yang dihuni penduduk yang mayoritas menekuni pekerjaan sebagai petani dan secara geografis biasanya terletak di daerah pinggiran, bahkan termasuk wilayah terpelosok. Secara lebih rinci yang dimaksud dengan desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (*rural*). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau Banjar (Bali) atau jorong (Sumatra Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara.

Sementara itu, yang dimaksud dengan kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang digaji oleh pemerintah. Kelurahan umumnya terletak di wilayah urban atau di kabupaten, tetapi merupakan wilayah di kecamatan pusat kota yang merupakan pusat perkembangan ekonomi dan pemerintahan.

Berbeda dengan istilah desa yang lebih terkesan tradisional, belum berkembang dan terletak di wilayah pelosok atau pinggiran, pengertian kelurahan lebih terkesan urban dan maju. Desa yang mengalami kemajuan pesat dan wilayahnya menjadi pusat pertumbuhan yang ramai, biasanya status administratifnya bisa saja berubah menjadi kelurahan. Tetapi, tidak semua desa layak dan setuju diubah statusnya menjadi kelurahan karena berbagai alasan. Di

berbagai wilayah, tidak sedikit desa menolak statusnya diubah menjadi kelurahan meski dari aspek perubahan lebih terkesan urban dan maju.

Di Kabupaten Pamekasan, saat ini tercatat ada 13 kecamatan, 178 desa dan 11 Kelurahan. Sebagai daerah yang sedang dalam proses transisi membangun dan berkembang cukup pesat, sejumlah wilayah di Kabupaten Pamekasan dalam lima tahun terakhir harus diakui telah mengalami berbagai perubahan. Kemajuan demi kemajuan telah terjadi di berbagai kecamatan. Desa-desa yang dulu relatif tertinggal kini mulai maju dan telah memperlihatkan sejumlah perubahan yang signifikan. Hal ini tentu membawa sejumlah konsekuensi –termasuk kemungkinan perubahan status desa menjadi kelurahan.

Di mata Undang-Undang, status desa maupun kelurahan keduanya sebetulnya sama-sama diakui secara hukum, tetapi asal-usulnya berbeda. Sebelum Indonesia merdeka dan sistem pemerintahannya ditata secara resmi, sudah ada kesatuan masyarakat kecil yang disebut desa, kampung, nagari, atau gempong tersebar di seluruh nusantara. Sebagian ada yang melebur jadi perangkat resmi daerah, lalu berubah statusnya jadi kelurahan yang berada di bawah kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Tapi ada juga yang masih tetap berstatus desa karena berbagai faktor, umumnya karena masih tertinggal.

Bentuk desa atau kelurahan ditentukan oleh beberapa faktor seperti geografis, jumlah penduduk dan sarana infrastruktur. Bila memenuhi persyaratan, sebuah desa bisa diubah menjadi kelurahan. Dan sebaliknya, kelurahan pun bisa diubah menjadi desa. Tapi perubahan ini tidak semudah membalik telapak tangan, karena pemerintah pusat tidak bisa memutuskannya sendirian. Harus ada referendum untuk menghasilkan kesepakatan. Karena itulah, saat rencana pengubahan desa menjadi kelurahan di sejumlah daerah kadang ditolak, dan dalam konteks seperti ini pemerintah pusat biasanya juga tidak bisa memaksa.

Di Kabupaten Pamekasan, sejumlah desa belakangan ini telah mengalami perubahan dan perkembangan, terutama sejak digelontorkan dana yang cukup besar ke seluruh desa. Dalam Program Dana Desa, ratusan juta bahkan sekitar satu milyar dana langsung diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga tidak sedikit

desa mulai maju dan mengejar ketertinggalan. Untuk tahun 2017, sekitar Rp 60 triliun telah digelontorkan pemerintah untuk 76.000 desa di Indonesia. Di tahun 2018 dan 2019, alokasi dana program dana desa yang digulirkan jumlahnya makin besar. Besarnya dana desa dan kemajuan yang mulai terlihat, agaknya jadi alasan besar desa-desa menolak diubah jadi kelurahan.

Kegiatan sebagaimana dilaporkan bermaksud mengkaji kemungkinan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini mendesak dilakukan, sebab berbagai perubahan yang signifikan telah terjadi, dan hal itu tentu membutuhkan respon yang tepat dari pemerintah maupun masyarakat.

2. Permasalahan

Secara garis besar, beberapa permasalahan yang dikaji dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prospek perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Pamekasan?
2. Kendala-kendala apa sajakah yang dihadapi dalam proses perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana aspirasi masyarakat Kabupaten Pamekasan terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan, terutama yang berkaitan dengan akses dan kualitas layanan publik?

3. Tujuan

Tujuan kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengkaji prospek perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Pamekasan.
2. Menginventarisasi kendala yang dihadapi dalam proses perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Pamekasan.
3. Mengkaji aspirasi masyarakat Kabupaten Pamekasan terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan, terutama yang berkaitan dengan akses dan kualitas layanan publik.

4. Kerangka Analisis

Selama ini yang disebut kelurahan umumnya identik dengan pusat pemerintahan kecamatan atau wilayah yang ada di perkotaan, misalnya berdekatan dengan ibukota kecamatan atau berada di wilayah perkotaan. Sangat jarang wilayah yang jauh dari ibukota kecamatan atau perkotaan memperoleh status kelurahan. Wilayah yang jauh dari pusat kecamatan biasanya berstatus desa. Padahal tidak sedikit wilayah desa memiliki potensi dan kapasitas serta jumlah penduduk yang jauh berada di atas beberapa kelurahan.

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan, kurangnya informasi tentang prosedur perubahan status desa menjadi kelurahan telah menghambat beberapa desa dimaksud meningkatkan statusnya menjadi kelurahan. Karena itu, berdasarkan PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa telah diulas syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh desa sebelum mengusulkan perubahan status menjadi kelurahan.

Sejumlah syarat perubahan status desa menjadi kelurahan antara lain: (1) luas wilayah tidak berubah; (2) jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga untuk di luar wilayah Jawa dan Bali; (3) sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan; (4) potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian; (5) kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan (6) meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Sebuah desa bisa saja mengajukan perubahan menjadi kelurahan seiring dengan perkembangan desa yang makin ramai dan memperlihatkan cirri-ciri sebagai pusat kecamatan. Secara garis besar, langkah-langkah pengusulan perubahan desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.

2. Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
3. Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
4. Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
5. Bupati/walikota membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi bupati/walikota untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
7. Dalam hal bupati/walikota menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota untuk dibahas dan disetujui bersama.
8. Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 disebutkan bahwa sebuah desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih, yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan desa.

5. Metode

Kajian ini tidak hanya bermaksud memetakan situasi problematic yang timbul dalam proses perubahan status desa menjadi kelurahan, tetapi juga

merumuskan rekomendasi kebijakan tentang perlu-tidaknya perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan di Kabupaten Pamekasan.

Kajian ini menurut rencana akan dilakukan di sejumlah desa di Kabupaten Pamekasan yang menurut data memiliki perkembangan jumlah penduduk yang besar dan membutuhkan perubahan status desa menjadi kelurahan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat. Desa mana yang akan dipilih sebagai lokasi penelitian akan dikonsultasikan ke Bappeda Kabupaten Pamekasan.

Jumlah responden yang akan diwawancarai, menurut rencana sebanyak 250 penduduk desa. Seluruh responden akan dicari dari 5 desa yang ditengarai merupakan desa yang berpotensi dikembangkan menjadi kelurahan.

Tabel I.1
Lokasi (N=200)

Kecamatan	Desa	Jumlah	Presentase
Pamekasan	Laden	20	10 %
	Jalmak	20	10 %
	Panempan	20	10 %
	Teja Timur	20	10 %
	Bettet	20	10 %
Tlanakan	Panglegur	20	10 %
	Ceguk	20	10 %
Pademawu	Buddagan	20	10 %
	Murtajih	20	10 %
	Dasok	20	10 %
Total		200	100 %

Informasi tentang kebutuhan dan harapan masyarakat desa tentang perubahan status desa menjadi kelurahan, menurut rencana digali dengan kuesioner yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selain itu survey, dalam kajian ini juga akan dilakukan probing untuk menggali data yang lebih mendalam.

Seluruh data yang berhasil dihimpun akan dioleh dengan program SPSS. Data akan ditampilkan dalam bentuk table dan kutipan wawancara. Di akhir laporan, selain ditampilkan dalam bentuk kesimpulan, juga akan ditampilkan sejumlah rekomendasi tentang arah kebijakan dan perlu-tidaknya perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Pamekasan.

BAB II

PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN: KERANGKA ANALISIS

Selama ini yang disebut kelurahan umumnya identik dengan pusat pemerintahan kecamatan atau wilayah yang ada di perkotaan, misalnya berdekatan dengan ibukota kecamatan atau berada di wilayah perkotaan. Sangat jarang wilayah yang jauh dari ibukota kecamatan atau perkotaan memperoleh status kelurahan. Wilayah yang jauh dari pusat kecamatan biasanya berstatus desa. Padahal tidak sedikit wilayah desa memiliki potensi dan kapasitas serta jumlah penduduk yang jauh berada di atas beberapa kelurahan.

Pengalaman di berbagai daerah menunjukkan, kurangnya informasi tentang prosedur perubahan status desa menjadi kelurahan telah menghambat beberapa desa dimaksud meningkatkan statusnya menjadi kelurahan. Olehnya itu, berdasarkan PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa telah diulas syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh desa sebelum mengusulkan perubahan status menjadi kelurahan.

Sejumlah syarat perubahan status desa menjadi kelurahan antara lain: (1) luas wilayah tidak berubah; (2) jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga untuk di luar wilayah Jawa dan Bali; (3) sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan; (4) potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian; (5) kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan (6) meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Sebuah desa bisa saja mengajukan perubahan menjadi kelurahan seiring dengan perkembangan desa yang makin ramai dan memperlihatkan cirri-ciri sebagai pusat kecamatan. Secara garis besar, langkah-langkah pengusulan perubahan desa menjadi kelurahan adalah sebagai berikut:

1. Perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa setempat.
2. Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
3. Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam bentuk keputusan.
4. Keputusan hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota sebagai usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
5. Bupati/walikota membentuk tim untuk melakukan kajian dan verifikasi usulan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
6. Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi masukan bagi bupati/walikota untuk menyetujui atau tidak menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan.
7. Dalam hal bupati/walikota menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi kelurahan, bupati/walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan kepada dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota untuk dibahas dan disetujui bersama.
8. Pembahasan dan penetapan rancangan peraturan daerah kabupaten/kota mengenai perubahan status Desa menjadi kelurahan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 disebutkan bahwa sebuah desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih, yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan desa.

BAB III

GAMBARAN UMUM DESA-DESA DI KABUPATEN PAMEKASAN

Dinamika penduduk terus berkembang seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang dipengaruhi oleh factor kelahiran, kematian dan migrasi. Kabupaten Pamekasan saat ini merupakan salah satu wilayah di Pulau Madura yang tengah berkembang.

Perkembangan tersebut dapat terlihat dari geliat perekonomian masyarakat yang semakin ramai mulai dari perdagangan, kuliner, hingga pariwisata. Adanya berbagai potensi yang bias dikembangkan untuk peningkatan kesejahteraan penduduk, Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan terus berupaya mengembangkan wilayahnya baik melalui peningkatan dalam bidang ekonomi dan pariwisata yang sudah mulai ramai, juga melalui pembangunan wilayah agar semua wilayah nantinya memiliki tingkat kemajuan yang merata.

Salah satu strategi yang dilakukan dalam pengembangan wilayah yaitu dengan cara melakukan revitalisasi wilayah baik melalui pemekaran, penggabungan maupun penggantian status desa menjadi kelurahan. Ada beberapa wilayah yang akan dikembangkan sehingga diharapkan nanti, kemajuan wilayah Kabupaten Pamekasan tidak hanya berpusat pada tengah kota saja, tetapi juga daerah pinggiran juga memiliki tingkat kemajuan yang sama. Dalam rangka melakukan penggantian status desa menjadi kelurahan tersebut diperlukan kajian yang komprehensif. Pada bab ini diuraikan gambaran umum wilayah yang berpotensi untuk berubah status dari desa menjadi kelurahan. Uraian gambaran umum ini penting dilakukan untuk memetakan potensi yang ada serta mendukung analisis dari temuan data agar kajian menghasilkan rekomendasi kebijakan yang komprehensif dan kontekstual dengan kondisi wilayah.

1. Kecamatan Pamekasan

1.1. Kondisi Geografis Kecamatan Pamekasan



Gambar III.1. Peta Kecamatan Pamekasan
Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

Kecamatan Pamekasan merupakan ibukota dari Kabupaten Pamekasan. Wilayah Kecamatan Pamekasan memiliki luas 26,47 km² dan secara administrative berbatasan dengan Kecamatan KAdur, Pegantenan dan Palengaan di sebelah utara. Di sebelah selatan, berbatasan dengan Kecamatan Tlanakan dan Pademawu. Sebelah barat, Kecamatan Pamekasan berbatasan dengan Kecamatan Palengaan, Proppo dan Tlanakan, sementara di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Larangan dan Padmawu.

Topografi Kecamatan Pademawu terletak pada ketinggian 10 meter dari permukaan laut, sehingga kelembaban udara rata-rata 80% dan suhu maksimum 30°C dan minimum 28°C.

Tabel III.1
Keadaan Umum Geografis dan Iklim di Kecamatan Pamekasan 2017

No.	Aspek Geografis	Keterangan
1.	Luas wilayah	26,47 km ²
2.	Letak Wilayah	113°19' - 113°58' BT 6°51' - 7°31' LS
3.	Batas Wilayah a. Utara b. Selatan c. Barat d. Timur	Kec. Kadur, Pegantenan, Palengaan Kecamatan Tlanakan, Pademawu Kecamatan Palengaan, Proppo, Tlanakan Kecamatan Larangan, Pademawu
4.	Musim a. Oktober-April b. April-Oktober	Penghujan Kemarau
5.	Temparetur Rata-rata a. Maksimum b. Minimum	30°C 28°C
6.	Ketinggian dari permukaan laut	10 meter
7.	Kelembaban udara rata-rata	80%

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

Wilayah Kecamatan Pamekasan terbagi kedalam 18 desa yang memiliki luas berbeda-beda. Desa dengan luas wilayah paling luas adalah Kowel yaitu 11,07% dari luas Kecamatan Pamekasan atau 2,93 km². Selanjutnya adalah Desa Teja Barat yang memiliki luas wilayah 2,61 km² atau 9,86% dari luas Kecamatan Pamekasan.

Untuk wilayah yang memiliki luas antara 7-8 % dari luas Kecamatan adalah Desa Bettet, Bugih dan Jalmak. Desa Bettet memiliki luas wilayah 2,29 km² atau 8,65% dari luas kecamatan. Desa Bugih memiliki luas wilayah 2,17 km² atau 8,20% dari luas kecamatan dan desa Jalmak memiliki luas 1,96 km² atau 7,25% dari luas kecamatan. Sedangkan desa lainnya memiliki luas wilayah kurang dari 7% dari luas kecamatan.

Tabel III.2
Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Pamekasan 2017

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1. Teja Barat	2.61	9.86
2. Teja Timur	1.76	6.65
3. Jalmak	1.96	7.25

4. Laden	1.41	5.33
5. Panempan	0.82	3.10
6. Kangeran	1.70	6.42
7. Patemon	0.47	1.78
8. Barurambat Kota	0.90	3.40
9. Parteker	0.33	1.25
10. Jungcangcang	1.33	5.02
11. Bettet	2.29	8.65
12. Nylabu Laok	0.95	3.59
13. Nylabu Daya	1.49	5.63
14. Bugih	2.17	8.20
15. Gladak Anyar	1.27	4.80
16. Kolpajung	1.27	4.80
17. Kowel	2.93	11.07
18. Toronan	0.85	3.21
Jumlah	26.47	100

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

Orbitrasi wilayah atau jarak desa dengan akses pemerintahan dan beberapa pelayanan public di Kecamatan Pamekasan tergolong dekat karena semua wilayah berada pada rentang jarak kurang dari 8 km. Desa dengan jarak terjauh dari kantor kecamatan setempat adalah Desa Toronan yaitu 7,5 km dan Desa Nylabu Daya yaitu 6 km.

Dalam hal keamanan, semua desa di Kecamatan Pamekasan memiliki jarak yang berdekatan dengan kantor polisi setempat. Desa yang memiliki jarak terjauh dengan kantor polisi setempat adalah Nylabu Laok yaitu 4 km. sedangkan desa lainnya memiliki jarak kurang dari 4 km.

Akses terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat di setiap desa juga relative dekat yaitu kurang dari 7 km. Desa yang memiliki jarak terhadap akses rumah sakit yang paling jauh adalah desa Toronan yaitu 6 km. Untuk akses terhadap Puskesmas terdekat juga memiliki jarak yang dekat di setiap desa yaitu kurang dari 5 km dengan desa terjauh yaitu Nylabu Daya dan Barurambat Kota yang memiliki jarak 4 km.

Tabel III.3
Jarak Kantor Desa/Kelurahan ke Fasilitas (Km) di Kecamatan Pamekasan 2017

Desa/Kelurahan	Kantor Kecamatan Setempat	Kantor Polisi Setempat	Rumah Sakit Terdekat	Puskesmas Terdekat
1. Teja Barat	2.3	2.5	3.0	2.0

2. Teja Timur	2.0	1.0	2.5	0.5
3. Jalmak	1.0	1.0	1.5	2.0
4. Laden	0.5	0.5	1.5	1.0
5. Panempan	0.7	1.5	1.3	3.0
6. Kangenan	1.0	1.6	1.0	3.0
7. Patemon	0.4	0.2	1.0	1.0
8. Barurambat Kota	2.0	0.5	1.2	4.0
9. Parteker	0.8	0.3	2.0	2.0
10. Jungcangcang	2.0	3.0	2.0	2.0
11. Bettet	2.0	1.5	2.3	1.2
12. Nylabu Laok	3.0	4.0	5.0	0.2
13. Nylabu Daya	6.0	3.0	5.5	4.0
14. Bugih	2.8	3.0	1.7	0.1
15. Gladak Anyar	3.0	1.5	0.5	2.0
16. Kolpajung	3.5	1.0	1.0	0.5
17. Kowel	4.5	3.0	2.0	0.2
18. Toronan	7.5	3.0	6.0	1.0

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

1.2. Pemerintahan Kecamatan Pamekasan

Pemerintahan Kecamatan Pamekasan dipimpin oleh seorang camat yang bertanggungjawab secara langsung kepada Bupati sebagai kepala daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, camat dibantu oleh staff kecamatan maupun kepala desa beserta seluruh perangkatnya.

Secara administrative, wilayah Kecamatan Pamekasan terbagi kedalam 98 dusun yang masing-masing dikepalai oleh seorang kepala dusun atau kepala kampung. Dusun-dusun tersebut juga terbagi kedalam 108 Rukun Warga dan 339 Rukun Tetangga.

Tabel III.4
Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan di Kecamatan Pamekasan 2017

Desa/Kelurahan	Dusun/ Kampung/ Lingkungan	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1. Teja Barat	4	10	23
2. Teja Timur	4	6	15
3. Jalmak	3	5	14
4. Laden	5	5	17
5. Panempan	3	3	15
6. Kangenan	12	12	36
7. Patemon	3	3	15
8. Barurambat Kota	8	8	25
9. Parteker	4	4	17

10. Jungcangcang	5	5	16
11. Bettet	4	4	12
12. Nylabu Laok	5	5	12
13. Nylabu Daya	3	3	13
14. Bugih	9	9	36
15. Gladak Anyar	9	9	31
16. Kolpajung	6	6	15
17. Kowel	7	7	17
18. Toronan	4	4	10
Jumlah	98	108	339

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

Adapun jumlah perangkat desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Pamekasan pada tahun 2017 mencapai 81 Kepala Urusan dan 36 Kepala Dusun yang tersebar di masing-masing desa kecuali Desa Kangenan, Patemon, Barurambat Kota, Parteker, Jungcangcang, Bugih, Gladak Anyar, Kolpajung dan Kowel dimana desa-desa tersebut tidak ada Kepala Dusun.

Tabel III.5
Banyaknya Perangkat Desa/Kelurahan Menurut Desa di Kecamatan Pamekasan 2017

Desa/Kelurahan	Banyaknya	
	Kepala Urusan	Kepala Dusun
1. Teja Barat	6	4
2. Teja Timur	6	4
3. Jalmak	6	3
4. Laden	6	5
5. Panempan	6	3
6. Kangenan	3	-
7. Patemon	3	-
8. Barurambat Kota	3	-
9. Parteker	3	-
10. Jungcangcang	3	-
11. Bettet	6	5
12. Nylabu Laok	6	5
13. Nylabu Daya	6	3
14. Bugih	3	-
15. Gladak Anyar	3	-
16. Kolpajung	3	-
17. Kowel	3	-
18. Toronan	6	4
Jumlah	81	36

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

Terbaginya wilayah kerja Kecamatan Pamekasan kedalam desa-desa tersebut tentunya mempermudah pemerintah dalam melakukan koordinasi dalam

rangka pembangunan maupun pelayanan public yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan.

1.3. Penduduk Kecamatan Pamekasan

Perubahan status desa menjadi kelurahan tidak hanya menyangkut aspek pelayanan public, melainkan juga harus melihat aspek penduduk. Perubahan status desa menjadi kelurahan akan membawa perubahan bagi penduduk terutama dalam hal administrasi public. Seringkali dalam perubahan terjadi pro dan kontra karena adanya berbagai kekhawatiran di masyarakat terutama terkait dengan administrasi.

Menurut catatan BPS, pada tahun 2017 jumlah penduduk Kecamatan Pamekasan mencapai 95.318 jiwa dengan komposisi 46.692 laki-laki dan 48.626 perempuan. Adapun sex ratio daerah tersebut mencapai 96%. Hal ini menunjukkan bahwa di Kecamatan Pamekasan jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Selisih jumlah tersebut menggambarkan kemungkinan bahwa: pertama, angka kelahiran penduduk perempuan lebih tinggi di Kecamatan Pamekasan. Kedua, angka harapan hidup perempuan lebih lama dapat berarti pula bahwa derajat kesehatan perempuan di wilayah tersebut tinggi. Ketiga, lebih banyak perempuan yang migrasi masuk ke Kecamatan Pamekasan. Namun ada pula desa yaitu Juncangcang dan Bettet yang memiliki sex ratio lebih dari 100%. Hal tersebut berarti bahwa penduduk laki-laki lebih besar dibanding perempuan di wilayah tersebut. Kondisi tersebut memberikan indikator yang sebaliknya.

Sedangkan penduduk di Kecamatan Pamekasan sebagian besar terkonsentrasi di Desa Bugih yaitu sebanyak 13.967 jiwa. Selanjutnya adalah Desa Gladak Anyar dengan jumlah penduduk sebanyak 9.925 jiwa dan Desa Juncangcang 7.001 jiwa, Desa Kowel 6.683 jiwa dan Desa Bettet 6.552 jiwa. Untuk desa lainnya jumlahnya kurang dari 6.000 jiwa.

Tabel III.6
Banyaknya Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin di Kecamatan Pamekasan 2017

Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio (%)
	Laki-laki	Perempuan		
1. Teja Barat	1.895	2.052	3.947	92,3
2. Teja Timur	1.723	1.738	3.461	99,1
3. Jalmak	1.353	1.438	2.791	94,1
4. Laden	2.500	2.636	5.136	94,8
5. Panempan	1.179	1.324	2.503	89

6. Kangeran	2.527	2.676	5.203	94,4
7. Patemon	1.857	2.066	3.923	89,9
8. Barurambat Kota	3.297	3.704	7.001	89
9. Parteker	1.751	1.965	3.716	89,1
10. Juncangcang	3.833	3.469	7.302	110,5
11. Bettet	3.548	2.974	6.522	119,3
12. Nylabu Laok	1.133	1.247	2.380	90,9
13. Nylabu Daya	1.288	1.337	2.625	96,3
14. Bugih	6.778	7.189	13.967	94,3
15. Gladak Anyar	4.773	5.152	9.925	92,6
16. Kolpajung	2.836	2.956	5.792	95,9
17. Kowel	3.225	3.458	6.683	93,3
18. Toronan	1.196	1.245	2.441	96,1
Jumlah	46.692	48.626	95.318	96

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

Adapun kepadatan penduduk Kecamatan Pamekasan 3.601 jiwa/km² dengan rata-rata 3,9 jiwa/ruta. Kepadatan penduduk tertinggi berada di Desa Parteker yaitu 11.260,6 jiwa/km². Meskipun jumlah penduduk di Desa Parteker tidak sebanyak Desa Bugih, namun luas wilayah Parteker lebih kecil yaitu 941 km². Kepadatan juga terjadi di Desa Patemon yaitu 8.346,8 jiwa/km², Desa Barurambat Kota 7.778,9 jiwa/km², Bugih 6.634,4 jiwa/km².

Sementara dilihat dari kepadatan rumah tangga, Desa Bettet memiliki kepadatan rumah tangga tertinggi yaitu 9,4 jiwa/ruta. Desa Teja Timur memiliki kepadatan 4,1 jiwa/ruta dan Desa Juncangcang memiliki kepadatan 4,1 jiwa/ruta. Kondisi yang terjadi di Bettet menunjukkan karakteristik yaitu: Pertama, keluarga di wilayah tersebut merupakan extended family. Kedua, tingkat kelahiran di setiap keluarga tinggi. Sementara desa-desa lainnya memiliki kepadatan kurang dari 4 jiwa/ruta yang artinya setiap rumah tangga ada 3 hingga 4 orang.

Tabel III.7
Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Pamekasan 2017

Desa/Kelurahan	Banyaknya		Kepadatan Penduduk Per	
	Penduduk	Rumah Tangga	(Km ²)	Ruta
1. Teja Barat	3.947	1.228	1.512,3	3,2
2. Teja Timur	3.461	848	1.966,5	4,1
3. Jalmak	2.791	761	1.453,6	3,7
4. Laden	5.136	1.407	3.642,6	3,7
5. Panempan	2.503	649	3.052,4	3,9
6. Kangeran	5.203	1.582	3.060,6	3,3

7. Patemon	3.923	1.068	8.346,8	3,7
8. Barurambat Kota	7.001	1.903	7.778,9	3,7
9. Parteker	3.716	941	11.260,6	3,9
10. Juncangcang	7.302	1.790	5.490,2	4,1
11. Bettet	6.522	695	2.848	9,4
12. Nylabu Laok	2.380	616	2.505,3	3,9
13. Nylabu Daya	2.625	731	1.761,7	3,6
14. Bugih	13.967	3.286	6.436,4	4,3
15. Gladak Anyar	9.925	2.894	7.815	3,4
16. Kolpajung	5.792	1.532	4.560	3,8
17. Kowel	6.683	1.800	2.280,9	3,7
18. Toronan	2.441	662	2.871,8	3,7
Jumlah	95.318	24.393	3.601	3,9

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

1.4. Fasilitas Publik Kecamatan Pamekasan

Pendidikan

Bidang pelayanan Pendidikan di Kecamatan Pamekasan telah tersedia dari PAUD hingga tingkat SMA. Adanya penyediaan fasilitas-fasilitas dalam bidang Pendidikan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui Pendidikan. Ketersediaan fasilitas di desa-desa minimal pada level kecamatan sebagai upaya dalam pemerataan hasil pembangunan bidang Pendidikan agar dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Pamekasan.

Di Kecamatan Pamekasan telah ada 36 fasilitas sekolah dasar yang tersebar dimasing-masing desa minimal 1 unit. Beberapa desa yang memiliki 4 unit sekolah yaitu Juncangcang dan Bugih. Desa Teja Timur, Gladak Anyar dan Barurambat Kota masing-masing memiliki 3 unit sekolah SD. Desa Teja Barat, Panempan, Patemon, Bettet, Nylabu Daya dan Kowel memiliki masing-masing 2 unit sekolah dasar, sementara desa lainnya memiliki 1 unit sekolah dasar.

Dari fasilitas yang telah tersedia terdapat sebanyak 656 guru yang mengajar 3.901 murid laki-laki dan 3.568 murid perempuan. Jumlah sarana guru yang paling banyak terdapat di Desa Juncangcang sebanyak 69 orang, Gladak Anyar 67 orang, dan Budih sebanyak 66 orang. Perbedaan jumlah guru di masing-masing menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan atau murid yang ada di masing-masing desa.

Tabel III.8
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Sekolah Dasar
Negeri di Kecamatan Pamekasan 2016/2017

Desa/Kelurahan	Sekolah (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
			Laki-laki	Perempuan
1. Teja Barat	2	36	171	137
2. Teja Timur	3	42	184	164
3. Jalmak	1	22	127	103
4. Laden	1	30	164	129
5. Panempan	2	28	110	101
6. Kangenan	1	36	216	236
7. Patemon	2	29	107	104
8. Barurambat Kota	3	76	567	545
9. Parteker	1	12	29	37
10. Juncangcang	4	69	425	354
11. Bettet	2	21	98	114
12. Nylabu Laok	1	14	98	76
13. Nylabu Daya	2	24	163	120
14. Bugih	4	66	541	530
15. Gladak Anyar	3	67	381	315
16. Kolpajung	1	25	201	176
17. Kowel	2	47	268	251
18. Toronan	1	12	51	76
Jumlah	36	656	3.901	3.568

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

Selain sekolah dasar negeri, di Kecamatan Pamekasan juga terdapat sekolah dasar yang dikelola oleh swasta. Ada sebanyak 2 unit sekolah dasar swasta di Barurambat Kota. Sedangkan di beberapa desa yaitu Teja Barat, Panempan, Juncangcang, Nylabu Daya, Gladak Anyar, Kolpajung dan Toronan masing-masing tersedia 1 unit sekolah dasar swasta. Secara keseluruhan jumlah sekolah dasar di Kecamatan Pamekasan sebanyak 9 unit dengan 193 orang yang mengajar 1.205 murid laki-laki dan 1.160 murid perempuan.

Dilihat dari data yang ada, jumlah murid terbanyak di Desa Juncangcang. Hal ini bias dikarenakan jumlah penduduk usia sekolah dasar di wilayah tersebut lebih banyak dibandingkan dengan desa-desa yang lain. Kondisi tersebut harus diimbangi dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal tersebut terlihat dari banyaknya jumlah sekolah dasar maupun guru di Desa Juncangcang tersebut.

Tabel III.9
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Sekolah Dasar
Swasta di Kecamatan Pamekasan 2016/2017

Desa/Kelurahan	Sekolah (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
			Laki-laki	Perempuan
1. Teja Barat	1	14	41	34
2. Teja Timur	-	-	-	-
3. Jalmak	-	-	-	-
4. Laden	-	-	-	-
5. Panempan	1	20	39	46
6. Kangenan	-	-	-	-
7. Patemon	-	-	-	-
8. Barurambat Kota	2	52	397	355
9. Parteker	-	-	-	-
10. Juncangcang	1	50	408	412
11. Bettet	-	-	-	-
12. Nylabu Laok	-	-	-	-
13. Nylabu Daya	1	17	34	34
14. Bugih	-	-	-	-
15. Gladak Anyar	1	18	196	181
16. Kolpajung	1	11	24	27
17. Kowel	-	-	-	-
18. Toronan	1	11	66	71
Jumlah	9	193	1.205	1.160

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

Sekolah tingkat SLTP tidak terdapat di setiap desa. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk usia SLTP yang seharusnya sekolah pada jenjang tersebut kemungkinan tidak melanjutkan setelah lulus SD. Sedikitnya minat atau permintaan terhadap sekolah pada tingkat tersebut menjadikan ketersediaan fasilitas tersebut tidak tersedia di setiap desa seperti halnya sekolah SD.

Fasilitas sekolah SLTP Negeri di Kecamatan Pamekasan tersedia sebanyak unit yang tersebar di Desa Jalmak, Barurambat Kota, Juncangcang, Bettet, dan Bugih. Adapun jumlah guru yang tersedia sebanyak 312 orang dengan jumlah murid 2.136 laki-laki dan 1.969 perempuan.

Tabel III.10
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SLTP Negeri di
Kecamatan Pamekasan 2016/2017

Desa/Kelurahan	Sekolah (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
			Laki-laki	Perempuan
1. Teja Barat	-	-	-	-
2. Teja Timur	-	-	-	-
3. Jalmak	1	40	377	261

4. Laden	-	-	-	-
5. Panempan	-	-	-	-
6. Kangenan	-	-	-	-
7. Patemon	-	-	-	-
8. Barurambat Kota	1	60	384	412
9. Parteker	-	-	-	-
10. Jungcangcang	2	107	679	791
11. Bettet	1	31	215	146
12. Nylabu Laok	-	-	-	-
13. Nylabu Daya	-	-	-	-
14. Bugih	2	74	481	359
15. Gladak Anyar	-	-	-	-
16. Kolpajung	-	-	-	-
17. Kowel	-	-	-	-
18. Toronan	-	-	-	-
Jumlah	7	312	2.136	1.969

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

Selain SLTP Negeri juga terdapat SLTP yang dikelola oleh swasta. Keberadaan SLTP swasta ini merupakan alternative bagi penduduk usia sekolah SLTP yang ingin bersekolah di SLTP negeri atau swasta. Ada sebanyak 8 sekolah SLTP Swasta yang tersebar di beberapa desa yaitu Teja Barat, Jalmak, Panempan, Barurambat Kota, Gladak Anyar dan Kowel.

Adapun jumlah guru yang tersedia sebanyak 109 dengan jumlah murid sebanyak 327 laki-laki dan 186 perempuan. Perbandingan jumlah murid antara sekolah SLTP Negeri dan SLTP Swasta yang cukup signifikan ini dikarena lebih banyak murid yang biasanya memilih sekolah negeri dengan alasan ekonomi yang lebih terjangkau.

Tabel III.11
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SLTP Swasta di Kecamatan Pamekasan 2016/2017

Desa/Kelurahan	Sekolah (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
			Laki-laki	Perempuan
1. Teja Barat	2	22	41	38
2. Teja Timur	-	-	-	-
3. Jalmak	1	14	32	25
4. Laden	-	-	-	-
5. Panempan	1	19	96	0
6. Kangenan	-	-	-	-
7. Patemon	-	-	-	-
8. Barurambat Kota	1	16	34	18
9. Parteker	-	-	-	-
10. Jungcangcang	-	-	-	-

11. Bettet	-	-	-	-
12. Nylabu Laok	-	-	-	-
13. Nylabu Daya	-	-	-	-
14. Bugih	-	-	-	-
15. Gladak Anyar	1	13	64	68
16. Kolpajung	-	-	-	-
17. Kowel	2	25	60	37
18. Toronan	-	-	-	-
Jumlah	8	109	327	186

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

Selanjutnya adalah tingkat SMU yaitu tingkat yang lebih tinggi dari SLTP. Jumlah fasilitas untuk sekolah pada tingkat SMU ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah sekolah SLTP. Di Kecamatan Pamekasan tersedia sebanyak 4 unit SMU Negeri yang berada di Desa Barurambat Kota, Bugih dan Kowel. Jumlah guru yang tersedia sebanyak 281 orang dengan jumlah murid sebanyak 2.058 laki-laki dan 2.197 perempuan.

Tabel III.12
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SMU Negeri di Kecamatan Pamekasan 2016/2017

Desa/Kelurahan	Sekolah (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
			Laki-laki	Perempuan
1. Teja Barat	-	-	-	-
2. Teja Timur	-	-	-	-
3. Jalmak	-	-	-	-
4. Laden	-	-	-	-
5. Panempan	-	-	-	-
6. Kangenan	-	-	-	-
7. Patemon	-	-	-	-
8. Barurambat Kota	1	74	461	687
9. Parteker	-	-	-	-
10. Jungcangcang	-	-	-	-
11. Bettet	-	-	-	-
12. Nylabu Laok	-	-	-	-
13. Nylabu Daya	-	-	-	-
14. Bugih	2	155	1111	1.194
15. Gladak Anyar	-	-	-	-
16. Kolpajung	-	-	-	-
17. Kowel	1	52	481	365
18. Toronan	-	-	-	-
Jumlah	4	281	2.058	2.197

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

Adapun Desa Bugih memiliki fasilitas terbanyak yaitu sebanyak 2 unit SMU Negeri, sehingga jumlah guru yang ada sebanyak 155 guru dengan jumlah murid mencapai 1.111 laki-laki dan 1.194 perempuan. Desa Barurambat Kota memiliki 1 unit sekolah SMU Negeri dengan jumlah guru sebanyak 75 orang yang mengajar 461 murid laki-laki dan 687 perempuan. Sedangkan Desa Kowel memiliki 1 unit sekolah SMU Negeri dengan 52 guru yang mengajar 481 murid laki-laki dan 365 murid perempuan.

Di Kecamatan Pamekasan juga terdapat fasilitas SMU yang dikelola oleh swasta sebanyak 6 unit yang tersebar di Teja Barat, Teja Timur, Patemon, Parteker dan Bugih. Ada sebanyak 128 guru yang mengajar sebanyak 351 murid laki-laki dan 205 murid perempuan.

Tabel III.13
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SMU Swasta di Kecamatan Pamekasan 2016/2017

Desa/Kelurahan	Sekolah (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
			Laki-laki	Perempuan
1. Teja Barat	1	15	39	32
2. Teja Timur	1	22	36	33
3. Jalmak	-	-	-	-
4. Laden	-	-	-	-
5. Panempan	-	-	-	-
6. Kangenan	-	-	-	-
7. Patemon	1	27	136	82
8. Barurambat Kota	-	-	-	-
9. Parteker	1	25	88	13
10. Jungcangcang	-	-	-	-
11. Bettet	-	-	-	-
12. Nylabu Laok	-	-	-	-
13. Nylabu Daya	-	-	-	-
14. Bugih	2	39	52	45
15. Gladak Anyar	-	-	-	-
16. Kolpajung	-	-	-	-
17. Kowel	-	-	-	-
18. Toronan	-	-	-	-
Jumlah	6	128	351	205

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

Selain SMU, juga terdapat Sekolah Menengah Kejuruan atau biasa disebut sebagai SMK. SMK merupakan sekolah kejuruan dimana murid langsung dibekali praktek keahlian. Dengan demikian, ketika mereka lulus dari SMK diharapkan

mereka menjadi tenaga yang siap bekerja karena telah dibekali skill atau keahlian tertentu.

Ada sebanyak 3 unit SMK Negeri di Kecamatan Pamekasan yang terdapat di Desa Bugih dengan 282 guru. Adapun jumlah murid yang bersekolah di SMK Negeri sebanyak 1.940 laki-laki dan 1.104 perempuan.

Tabel III.14
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SMK Negeri di Kecamatan Pamekasan 2016/2017

Desa/Kelurahan	Sekolah (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
			Laki-laki	Perempuan
1. Teja Barat	-	-	-	-
2. Teja Timur	-	-	-	-
3. Jalmak	-	-	-	-
4. Laden	-	-	-	-
5. Panempan	-	-	-	-
6. Kangeran	-	-	-	-
7. Patemon	-	-	-	-
8. Barurambat Kota	-	-	-	-
9. Parteker	-	-	-	-
10. Jungcangcang	-	-	-	-
11. Bettet	-	-	-	-
12. Nylabu Laok	-	-	-	-
13. Nylabu Daya	-	-	-	-
14. Bugih	3	282	1.940	1.104
15. Gladak Anyar	-	-	-	-
16. Kolpajung	-	-	-	-
17. Kowel	-	-	-	-
18. Toronan	-	-	-	-
Jumlah	3	282	1.940	1.104

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

Di Kecamatan Pamekasan juga terdapat SMK Swasta sebanyak 4 unit yang terletak di Desa Panempan, Bugih dan Kowel. Ada sebanyak 24 guru yang mengajar di desa tersebut. Adapun jumlah murid yang bersekolah di SMK tersebut yaitu 110 laki-laki.

Di Desa Bugih juga terdapat 1 SMK Swasta dengan jumlah guru sebanyak 34 orang yang mengajar 31 murid laki-laki dan 82 murid perempuan. Sementara di Desa Kowel terdapat sebanyak 2 SMK Swasta dengan 42 guru. Adapun jumlah murid yang bersekolah sebanyak 64 laki-laki dan 71 perempuan.

Tabel III.15
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SMK Swasta di
Kecamatan Pamekasan 2016/2017

Desa/Kelurahan	Sekolah (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
			Laki-laki	Perempuan
1. Teja Barat	-	-	-	-
2. Teja Timur	-	-	-	-
3. Jalmak	-	-	-	-
4. Laden	-	-	-	-
5. Panempan	1	24	110	-
6. Kangeran	-	-	-	-
7. Patemon	-	-	-	-
8. Barurambat Kota	-	-	-	-
9. Parteker	-	-	-	-
10. Jungcangcang	-	-	-	-
11. Bettet	-	-	-	-
12. Nylabu Laok	-	-	-	-
13. Nylabu Daya	-	-	-	-
14. Bugih	1	34	31	82
15. Gladak Anyar	-	-	-	-
16. Kolpajung	-	-	-	-
17. Kowel	2	42	64	71
18. Toronan	-	-	-	-
Jumlah	4	100	205	153

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

Selain sekolah umum, di Kecamatan juga terdapat sekolah yang berbasis religi mulai dari madrasah ibtidaiyah, tsnawiyah hingga Aliyah. Keberadaan sekolah-sekolah ini merupakan alternative bagi Masyarakat di Kecamatan Pamekasan yang tidak hanya ingin mendapatkan pengetahuan tetapi juga ilmu agama yang sesuai dengan kultur masyarakat setempat yang mayoritas merupakan pemeluk agama islam.

Jumlah sekolah Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Pamekasan sebanyak 3 unit yang tersebar di Desa Teja Barat, Panempan, dan Toronan. Adapun jumlah guru Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 45 orang dan mengajar sebanyak 163 murid laki-laki dan 54 murid perempuan.

Tabel III.16
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Ibtidaiyah di
Kecamatan Pamekasan 2016/2017

Desa/Kelurahan	Sekolah (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
			Laki-laki	Perempuan
1. Teja Barat	1	17	54	46
2. Teja Timur	-	-	-	-

3. Jalmak	-	-	-	-
4. Laden	-	-	-	-
5. Panempan	1	12	61	66
6. Kangenan	-	-	-	-
7. Patemon	-	-	-	-
8. Barurambat Kota	-	-	-	-
9. Parteker	-	-	-	-
10. Juncangcang	-	-	-	-
11. Bettet	-	-	-	-
12. Nylabu Laok	-	-	-	-
13. Nylabu Daya	-	-	-	-
14. Bugih	-	-	-	-
15. Gladak Anyar	-	-	-	-
16. Kolpajung	-	-	-	-
17. Kowel	-	-	-	-
18. Toronan	1	16	48	54
Jumlah	3	45	163	166

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

sekolah Madrasah Tsanawiyah merupakan sekolah yang sederajat dengan SLTP. Di Kecamatan Pamekasan terdapat sebanyak 10 sekolah yang masing-masing tersebar di Teja Timur, Panempan, Juncangcang, Bettet, Bugih, Gladak Anyar, Kolpajung, Kowel dan Toronan. Adapun jumlah guru yang mengajar di Madrasah tsanawiyah sebanyak 225 orang.

Tabel III.17
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Madrasah Tsanawiyah di Kecamatan Pamekasan 2016/2017

Desa/Kelurahan	Sekolah (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
			Laki-laki	Perempuan
1. Teja Barat	-	-		
2. Teja Timur	1	16		
3. Jalmak	-	-		
4. Laden	-	-		
5. Panempan	1	24		
6. Kangenan	-	-		
7. Patemon	-	-		
8. Barurambat Kota	-	-		
9. Parteker	-	-		
10. Juncangcang	1	23		
11. Bettet	1	31		
12. Nylabu Laok	-	-		
13. Nylabu Daya	-	-		
14. Bugih	2	24		
15. Gladak Anyar	1	17		
16. Kolpajung	1	44		

17. Kowel	1	22		
18. Toronan	1	24		
Jumlah	10	225		

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

Selanjutnya adalah sekolah Madrasah Aliyah atau sederajat dengan SMU. Ada sebanyak 8 Madrasah Aliyah yang terdapat di beberapa desa yaitu Teja Barat, Panempan, Juncangcang, Bettet, Bugih, Gladak Anyar dan Toronan. Ada sebanyak 185 guru yang terdistribusi ke masing-masing sekolah dengan jumlah murid sebanyak 916 laki-laki dan 972 perempuan.

Tabel III.18
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Madrasah Aliyah di Kecamatan Pamekasan 2016/2017

Desa/Kelurahan	Sekolah (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
			Laki-laki	Perempuan
1. Teja Barat	1	24	99	45
2. Teja Timur	-	-	-	-
3. Jalmak	-	-	-	-
4. Laden	-	-	-	-
5. Panempan	1	36	-	241
6. Kangeran	-	-	-	-
7. Patemon	-	-	-	-
8. Barurambat Kota	-	-	-	-
9. Parteker	-	-	-	-
10. Juncangcang	1	22	57	44
11. Bettet	1	49	547	507
12. Nylabu Laok	-	-	-	-
13. Nylabu Daya	-	-	-	-
14. Bugih	2	22	104	62
15. Gladak Anyar	1	17	50	34
16. Kolpajung	-	-	-	-
17. Kowel	-	-	-	-
18. Toronan	1	15	58	39
Jumlah	8	185	916	972

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

Di Kecamatan Pamekasan juga terdapat Madrasah Diniyah dan Pesantren. Kedua sekolah ini merupakan Lembaga Pendidikan berbasis agama dengan kurikulum yang mengedepankan pembelajaran ilmu agama. Ada sebanyak 38 Madrasah Diniyah yang tersebar di setiap desa kecuali Desa Parteker dan Desa Nylabu Laok. Pesantren telah menjadi bagian dari kultur masyarakat Madura, maka tidak heran jika di Kecamatan Pamekasan juga terdapat banyak pesantren

yaitu sebanyak 21 unit yang tersebar di beberapa desa kecuali Teja Barat, teja Timur, Laden, Petemon, Parteker, Nylabu Laok, Gladak Anyar dan Kolpajung.

Tabel III.19
Banyaknya Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah di Kecamatan Pamekasan 2017

Desa/Kelurahan	Madrasah Diniyah	Pondok Pesantren
1. Teja Barat	5	-
2. Teja Timur	3	-
3. Jalmak	1	1
4. Laden	2	-
5. Panempan	2	3
6. Kangenan	2	1
7. Patemon	1	-
8. Barurambat Kota	1	1
9. Parteker	-	-
10. Jungcangcang	3	5
11. Bettet	1	1
12. Nylabu Laok	-	-
13. Nylabu Daya	3	1
14. Bugih	4	2
15. Gladak Anyar	2	-
16. Kolpajung	3	-
17. Kowel	4	5
18. Toronan	1	1
Jumlah	38	21

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

Kesehatan

Upaya Pemerintah Kabupaten Pamekasan dalam peningkatan sumber daya manusia salah satunya dengan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai. Keberadaan sarana dan prasarana yang memadai merupakan salah satu alat untuk meningkatkan derajat kesehatan di masyarakat. Pentingnya kondisi derajat kesehatan yang tinggi di masyarakat karena mereka merupakan subyek dalam pembangunan. Sebuah keluarga yang memiliki tulang punggung yang dalam kondisi fisik tengah sakit, niscaya akan mengganggu perekonomian keluarga tersebut. Pada suatu keluarga yang memiliki salah satu anggota yang secara fisik tidak sehat, niscaya juga terganggu kondisi perekonomiannya karena mereka harus mengeluarkan biaya untuk penanganan kondisi tersebut.

Meskipun pemerintah telah menyediakan akses layanan kesehatan gratis berupa BPJS kesehatan, akan tetapi selain biaya berobat yang gratis masyarakat

masih terbebani oleh biaya lain diluar pelayanan medis seperti biaya transport dan akomodasi lainnya. Keberadaan sarana dan prasarana kesehatan yang dekat dengan lingkungan masyarakat sekitar tentu saja sangat dibutuhkan untuk memangkas biaya-biaya diluar biaya pengobatan.

Di Kecamatan Pamekasan, fasilitas kesehatan yang ada meliputi rumah sakit umum yang terdapat di Barurambat Kota sebanyak 2 unit dan Bugih sebanyak 1 unit. Untuk menolong persalinan, telah tersedia rumah sakit yang khusus menangani persalinan sebanyak 2 unit yang masing-masing terletak di Barurambat Kota dan Bugih.

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat. Di Kecamatan Pamekasan telah tersedia 2 unit yang masing-masing terletak di Juncangcang dan Kowel. Puskesmas dalam melaksanakan fungsi pelayanan juga dibantu dengan adanya fasilitas puskesmas pembantu sebanyak 14 unit yang tersebar di beberapa desa.

Pada level desa, pelayanan kesehatan dasar di masyarakat dilayani oleh 12 unit Polindes dan 11 unit Poskesdes. Pelayanan bagi khusus balita juga telah tersedia dengan adanya 103 Posyandu yang tersebar di setiap desa. Adanya Posyandu ini sangat penting karena semua penanganan dan pengawasan tumbuh kembang anak mulai dari bayi hingga balita dilakukan oleh Posyandu. Keberadaan Posyandu guna memastikan kondisi setiap bayi yang lahir sehat serta terjaga asupan gizinya, sehingga dapat dihindarkan kasus-kasus stunting, kurang gizi atau kelebihan gizi pada anak-anak usia bayi hingga balita di Kecamatan Pamekasan.

Terdapat juga fasilitas kesehatan yang merupakan tempat praktek pribadi seperti praktek dokter sebanyak 26 unit. Untuk praktek bidan ada sebanyak 77 unit yang tersebar di seluruh desa. Praktek mantri kesehatan di Kecamatan Pamekasan ada sebanyak 55 unit yang tersebar di seluruh desa kecuali Desa Jalmak, Panempan dan Parteker. Sementara Batra ada sebanyak 48 unit yang tersebar di setiap desa. Untuk pelayanan kesehatan dasar bias disimpulkan telah ada di setiap desa, namun untuk penanganan penyakit yang membutuhkan tindakan lebih lanjut masih ditangani oleh 3 unit rumah sakit yang ada di Kecamatan Pamekasan.

Tabel III.20
Banyaknya Fasilitas Kesehatan Masyarakat Menurut Desa di
Kecamatan Pamekasan 2017

Desa/Kelurahan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Bersalin	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Polindes	Poskesdes	Posyandu	Dokter	Bidan	Mantri Kesehatan	Batra
1. Teja Barat	-	-	-	-	-	1	5	-	1	4	1
2. Teja Timur	-	-	-	-	1	1	5	1	4	1	4
3. Jalmak	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	2
4. Laden	-	-	-	-	-	1	5	-	1	5	3
5. Panempan	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	1
6. Kangeran	-	-	-	1	-	1	4	2	1	1	1
7. Patemon	-	-	-	1	-	-	4	2	2	3	2
8. Barurambat Kota	2	1	-	1	-	-	9	15	10	11	4
9. Parteker	-	-	-	-	-	1	4	3	3	-	3
10. Jungcangcang	-	-	1	-	1	1	7	2	4	2	3
11. Bettet	-	-	-	1	-	1	5	-	3	2	1
12. Nylabu Laok	-	-	-	2	1	-	6	-	2	3	1
13. Nylabu Daya	-	-	-	1	-	1	3	-	2	2	4
14. Bugih	1	1	-	2	3	-	11	-	18	4	5
15. Gladak Anyar	-	-	-	1	2	-	11	1	12	6	5
16. Kolpajung	-	-	-	1	2	-	7	-	4	2	4
17. Kowel	-	-	1	2	2	-	7	-	4	3	2
18. Toronan	-	-	-	1	-	1	4	-	3	6	2
Jumlah	3	2	2	14	12	11	103	26	77	55	48

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

Adanya fasilitas kesehatan tentunya akan bermakna jika tersedia pula tenaga kesehatan sebagai pelaksana pelayanan kepada masyarakat. Di Kecamatan Pamekasan telah terdapat 27 dokter umum dan 12 dokter gigi. Untuk tenaga kesehatan bidan ada sebanyak 74 sedangkan mantri kesehatan sebanyak 1 orang yaitu di Teja Barat. Tenaga kesehatan perawat sebanyak 140 orang sedangkan non perawat ada 1 orang yaitu di Desa Teja Barat.

Tabel III.21
Banyaknya Tenaga Kesehatan Masyarakat Menurut Desa di Kecamatan
Pamekasan 2017

Desa/Kelurahan	Dokter Umum	Dokter Gigi	Bidan	Mantri Kesehatan	Perawat	Non Perawat
1. Teja Barat	-	-	1	1	3	1
2. Teja Timur	1	-	4	-	5	-
3. Jalmak	1	-	2	-	1	-
4. Laden	2	-	3	-	8	-
5. Panempan	-	-	1	-	1	-
6. Kangeran	1	1	1	-	6	-
7. Patemon	2	2	2	-	8	-
8. Barurambat Kota	12	1	5	-	53	-
9. Parteker	1	1	3	-	4	-
10. Jungcangcang	-	1	4	-	11	-
11. Bettet	-	-	3	-	4	-
12. Nylabu Laok	-	-	2	-	6	-
13. Nylabu Daya	-	-	2	-	2	-
14. Bugih	3	2	18	-	10	-
15. Gladak Anyar	2	1	12	-	7	-
16. Kolpajung	2	-	4	-	2	-

17. Kowel	-	2	4	-	3	-
18. Toronan	-	1	3	-	6	-
Jumlah	27	12	74	1	140	1

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

Keagamaan

Penduduk di Kecamatan Pamekasan sebagaimana masyarakat Madura pada umumnya memiliki kultur religious islam. Maka tidak heran jika mayoritas penduduk memeluk agama islam. Adapun fasilitas peribadatan untuk umat islam di Kecamatan Pamekasan sebanyak 95 unit dan mushola sebanyak 347 unit yang tersebar di seluruh desa. Sementara fasilitas perubadatan lainnya yaitu berupa gereja sebanyak 3 unit yang terletak di Barurambat Kota.

Tabel III.22
Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Desa di Kecamatan Pamekasan 2017

Desa/Kelurahan	Jenis Tempat Peribadatan				
	Masjid	Mushola	Gereja	Pura	Vihara
1. Teja Barat	4	13	-		
2. Teja Timur	6	14	-		
3. Jalmak	2	7	-		
4. Laden	6	9	-		
5. Panempan	4	9	-		
6. Kangenan	6	22	-		
7. Patemon	4	7	-		
8. Barurambat Kota	11	29	3		
9. Parteker	2	20	-		
10. Jungcangcang	7	25	-		
11. Bettet	2	8	-		
12. Nylabu Laok	2	8	-		
13. Nylabu Daya	4	13	-		
14. Bugih	8	50	-		
15. Gladak Anyar	8	35	-		
16. Kolpajung	7	25	-		
17. Kowel	9	40	-		
18. Toronan	3	13	-		
Jumlah	95	347	3	0	0

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

Keberadaan fasilitas peribadatan tersebut, bagi masyarakat tidak hanya sebagai tempat untuk menjalankan ritual ibadah tetapi juga sebagai tempat bertemunya antar warga ketika menjalankan ibadah. Dengan adanya pertemuan tersebut maka terjalin pula silaturahmi antar warga masyarakat.

Olahraga

Sebagai sarana kebugaran warga masyarakat di Kecamatan Pamekasan telah tersedia berbagai fasilitas olahraga yang bias digunakan oleh warga untuk berolahraga agar terjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya. Fasilitas olahraga yang tersedia meliputi lapangan sepak bola sebanyak 7 unit yang tersebar di Patemon, Barurambat Kota, Juncangcang, Nylabu Daya, Bugih, Gladak Anyar dan Kowel.

Fasilitas olahraga futsal juga tersedia sebanyak 10 unit dan volley sebanyak 17 unit yang tersedia di setiap desa kecuali Barurambat Kota. Fasilitas kesehatan lainnya berupa bulu tangkis 6 unit, tennis lapangan 3 unit, tennis meja 7 unit, kolam renang 5 unit, pencak silat 6 unit dan basket 1 unit di Desa Juncangcang.

Tabel III.23
Banyaknya Fasilitas Olah Raga Menurut Desa di Kecamatan Pamekasan 2017

Desa/Kelurahan	Sepak Bola	Futsal	Volly	Basket	Bulu tangkis	Tennis Lapangan	Tennis Meja	Kolam Renang	Pencak Silat
1. Teja Barat	-	-	1	-	1	-	1	-	-
2. Teja Timur	-	-	1	-	-	-	-	-	-
3. Jalmak	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4. Laden	-	1	1	-	-	-	-	1	-
5. Panempan	-	-	1	-	-	-	-	-	1
6. Kangeran	-	1	1	-	-	-	1	1	1
7. Patemon	1	1	1	-	-	-	1	-	-
8. Barurambat Kota	1	1	-	-	1	1	1	1	1
9. Parteker	-	1	1	-	-	-	-	-	-
10. Juncangcang	1	1	1	1	1	-	-	-	-
11. Bettet	-	-	1	-	-	-	-	-	-
12. Nylabu Laok	-	1	1	-	-	-	-	-	-
13. Nylabu Daya	1	-	1	-	-	-	-	-	-
14. Bugih	1	-	1	-	1	1	1	1	1
15. Gladak Anyar	1	1	1	-	1	-	1	-	-
16. Kolpajung	-	1	1	-	-	-	-	-	1
17. Kowel	1	1	1	-	1	1	1	1	1
18. Toronan	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Jumlah	7	10	17	1	6	3	7	5	6

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

Keberadaan fasilitas olahraga tersebut juga bermanfaat sebagai tempat bagi warga masyarakat untuk melakukan aktivitas Bersama, serta dapat pula dimanfaatkan sebagai wadah kegiatan bagi para pemuda untuk kegiatan positif, pembentukan karakter dan prestasi.

Ekonomi

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keberadaan sarana ekonomi seperti sarana perdagangan memiliki peran strategis. Misalnya saja pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Di pasar orang dapat menjual hasil produksi dan mendapat barang yang dibutuhkan. Ada sebanyak 12 pasar di Kecamatan Pamekasan. Pasar-pasar tersebut melayani warga masyarakat sekitarnya untuk melakukan aktivitas ekonomi.

Selain pasar juga terdapat mini market/swalayan sebanyak 25 unit. Keberadaan mini market/swalayan tersebut memiliki manfaat yaitu penyerapan tenaga kerja walaupun tidak dalam skala besar. Akan tetapi, jika mini market/swalayan perkembangannya tidak terkendali maka akan memiliki dampak bagi took/kelontong disekitarnya. Sedangkan di Kecamatan Pamekasan tercatat ada sebanyak 1.143 unit toko/kelontong yang merupakan usaha milik warga atau pelaku usaha mikro.

Tabel III.24
Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Desa dan Jenis Sarana di Kecamatan Pamekasan 2017

Desa/Kelurahan	Pasar	Mini Market/ Swalayan	Toko/ Kelontong
1. Teja Barat	1	-	15
2. Teja Timur	-	-	15
3. Jalmak	-	-	18
4. Laden	1	4	37
5. Panempan	1	-	8
6. Kangenan	-	-	33
7. Patemon	-	-	28
8. Barurambat Kota	1	7	127
9. Parteker	1	1	77
10. Jungcangcang	1	4	56
11. Bettet	-	-	18
12. Nylabu Laok	-	1	12
13. Nylabu Daya	-	-	14
14. Bugih	1	6	54
15. Gladak Anyar	2	2	517
16. Kolpajung	1	-	57
17. Kowel	2	-	41
18. Toronan	-	-	16
Jumlah	12	25	1.143

Sumber: Kecamatan Pamekasan Dalam Angka 2018

Dalam banyak kasus, keberadaan mini market/swalayan yang lebih modern dengan pemilikan modal yang besar mematikan usaha-usaha toko/kelontong di sekitarnya yang memiliki modal atau asset produksi terbatas atau pas-pasan.

2. Kecamatan Tlanakan

2.1. Kondisi Geografis Kecamatan Tlanakan



Gambar III.1. Peta Kecamatan Tlanakan
Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018

Kecamatan Tlanakan memiliki topografi terletak pada 22 meter dari permukaan laut, sehingga memiliki kelembaban rata-rata 80% dengan suhu rata-rata maksimum 30°C dan minimum 28°C. Berdasarkan letak astronominya, Kecamatan Tlanakan memiliki 2 musim yaitu penghujan dan kemarau. Adanya 2 musim tersebut juga mempengaruhi mata pencaharian penduduk setempat.

Secara administrative, wilayah yang memiliki luas 48,19 km² ini berbatasan dengan Kecamatan Pamekasan dan Proppo di sebelah utara. Di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Selat Madura. Sebelah barat berbatasan

dengan Kabupaten Sampang dan di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pademawu.

Tabel III.25
Keadaan Umum Geografis dan Iklim di Kecamatan Tlanakan 2017

No.	Aspek Geografis	Keterangan
1.	Luas wilayah	48,10 km ²
2.	Letak Wilayah	113°19' - 113°58' BT 6°51' - 7°31' LS
3.	Batas Wilayah a. Utara b. Selatan c. Barat d. Timur	Kec. Pamekasan, Proppo Selat Madura Kabupaten Sampang Kec. Pademawu
4.	Musim c. Oktober-April d. April-Oktober	Penghujan Kemarau
5.	Temparetur Rata-rata c. Maksimum d. Minimum	30°C 28°C
6.	Ketinggian dari permukaan laut	22 meter
7.	Kelembaban udara rata-rata	80%

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018

Wilayah Kecamatan Tlanakan terbagi kedalam 17 desa dengan wilayah paling luas adalah Desa Larangan Slampar yaitu 8,47 km² atau 17,61% dari luas Kecamatan Tlanakan. Selanjutnya adalah Desa Gugul yang memiliki luas wilayah 4,84 km² atau 10,06% dari luas Kecamatan Tlanakan.

Desa Terrak juga termasuk desa yang memiliki wilayah luas yaitu 4,74 km² atau 9,85% dari luas Kecamatan Tlanakan dan Desa Larangan Tokol dengan luas 4,52 km² atau 9,40% dari luas Kecamatan Tlanakan. Sedangkan desa lainnya memiliki luas wilayah kurang dari 8 km².

Tabel III.26
Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Tlanakan 2017

Desa	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1. Dabuan	1.55	3.22
2. Terrak	4.74	9.85
3. Mangngar	2.30	4.78
4. Bandaran	1.89	3.93
5. Kramat	1.96	4.07
6. Ambat	3.75	7.80

7. Tlanakan	2.92	6.07
8. Branta Pesisir	0.19	0.40
9. Branta Tinggi	1.30	2.70
10. Tlesa	0.56	1.16
11. Larangan Tokol	4.52	9.40
12. Ceguk	2.17	4.51
13. Panglegur	2.82	5.86
14. Gugul	4.84	10.06
15. Bukek	1.71	3.56
16. Larangan Slampar	8.47	17.61
17. Toro'an	2.41	5.01
Jumlah	48.10	100

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018

Meskipun Larangan Slampar memiliki luas wilayah yang sangat luas dibanding dengan desa lainnya, namun akses desa tersebut ke pusat pemerintahan kecamatan memiliki orbitasi yang jauh yaitu 10 km sama halnya dengan Desa Dabuan dan Mangngar. Desa Terrak juga memiliki jarak yang lumayan jauh dengan pusat pemerintahan kecamatan yaitu sejauh 11 km.

Untuk jarak antara desa dengan fasilitas pelayanan public seperti kantor polisi terdekat, rumah sakit terdekat dan Puskesmas terdekat rata-rata memiliki jarak hanya 2 km. Bahkan beberapa desa hanya memiliki jarak 1 km saja seperti Branta Pesisir yang memiliki jarak 1 km dari kantor polisi setempat, Panglegur yang memiliki jarak 1 km dari rumah sakit terdekat serta Bandaran dan Tlanakan yang memiliki jarak 1 km dari Puskesmas terdekat.

Tabel III.27
Jarak Kantor Desa/Kelurahan ke Fasilitas (Km) di Kecamatan Tlanakan 2017

Desa	Kantor Kecamatan Setempat	Kantor Polisi Setempat	Rumah Sakit Terdekat	Puskesmas Terdekat
1. Dabuan	10	2	2	2
2. Terrak	11	2	2	2
3. Mangngar	10	2	2	2
4. Bandaran	9	2	2	1
5. Kramat	8	2	2	2
6. Ambat	7	2	2	2
7. Tlanakan	3	2	2	1
8. Branta Pesisir	1	1	2	2
9. Branta Tinggi	1	2	2	2
10. Tlesa	4	2	2	2
11. Larangan Tokol	2	2	2	2

12. Ceguk	3	2	2	2
13. Panglegur	6	2	1	2
14. Gugul	3	2	2	2
15. Bukek	5	2	2	2
16. Larangan Slampar	10	2	2	2
17. Toro'an	7	2	2	2

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018

2.2. Pemerintahan Kecamatan Tlanakan

Pemerintahan Kecamatan Tlanakan dipimpin oleh seorang camat yang bertanggungjawab kepada Bupati selaku kepala daerah. Adapun wilayah kerja pemerintah Kecamatan Tlanakan terbagi kedalam 17 desa. Dari 17 desa yang ada terbagi kedalam 92 dusun yang masing-masing dipimpin oleh kepala dusun. Semua dusun tidak terbagi lagi kedalam RW maupun RT. Hanya Desa Larangan Tokol saja yang terbagi kedalam 8 RT yang masing-masing dipimpin oleh seorang ketua RT.

Tabel III.28
Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan di Kecamatan Tlanakan 2017

Desa	Dusun/ Kampung/ Lingkungan	Rukun Tetangga
1. Dabuan	3	-
2. Terrak	5	-
3. Mangngar	6	-
4. Bandaran	8	-
5. Kramat	6	-
6. Ambat	8	-
7. Tlanakan	5	-
8. Branta Pesisir	7	-
9. Branta Tinggi	3	-
10. Tlesa	3	-
11. Larangan Tokol	9	8
12. Ceguk	3	-
13. Panglegur	4	-
14. Gugul	6	-
15. Bukek	5	-
16. Larangan Slampar	8	-
17. Toro'an	3	-
Jumlah	92	8

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018

Dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan, Camat dibantu oleh staff kecamatan beserta perangkat desa. Pada tingkat desa, tugas dan fungsi pemerintahan dilaksanakan oleh kepala desa yang dibantu oleh 92 kepala dusun, 17 modin dan 145 anggota BPD.

Tabel III.29
Banyaknya Perangkat Desa/Kelurahan Menurut Desa di Kecamatan Tlanakan 2017

Desa	Banyaknya		Anggota BPD
	Kepala Dusun	Modin	
1. Dabuan	3	1	7
2. Terrak	5	1	9
3. Mangngar	6	1	7
4. Bandaran	8	1	11
5. Kramat	6	1	9
6. Ambat	8	1	11
7. Tlanakan	5	1	7
8. Branta Pesisir	7	1	11
9. Branta Tinggi	3	1	7
10. Tlesa	3	1	5
11. Larangan Tokol	9	1	11
12. Ceguk	3	1	7
13. Panglegur	4	1	11
14. Gugul	6	1	9
15. Bukek	5	1	5
16. Larangan Slampar	8	1	11
17. Toro'an	3	1	7
Jumlah	92	17	145

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018

2.3. Penduduk Kecamatan Tlanakan

Di dalam melakukan suatu pembangunan wilayah sangat penting mengetahui karakteristik penduduk agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan penduduk. Tidak jarang pembangunan yang mengabaikan partisipasi penduduk lokal yang merupakan obyek pembangunan tidak bermanfaat secara maksimal, bahkan acapkali kontraproduktif.

Didalam pembangunan sumber daya manusia, partisipasi penduduk memegang peranan penting dimana penduduk tidak serta merta diposisikan sebagai obyek tetapi subyek yang melaksanakan pembangunan. Sehingga, keberadaan penduduk di Kecamatan Tlanakan merupakan asset bagi daerah tersebut dalam pelaksanaan pembangunan terutama memajukan daerahnya.

Menurut catatan BPS, pada tahun 2017 jumlah penduduk di Kecamatan Tlanakan mencapai 63.660 jiwa dengan komposisi 31.030 laki-laki dan 32.630 jiwa perempuan. Adapun sex ratio menunjukkan angka 95,1%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penduduk di Kecamatan Tlanakan lebih banyak perempuan dibanding laki-laki. Kondisi tersebut ditunjukkan oleh setiap desa dimana angka sex ratio tidak mencapai 100%, kecuali Desa Mangngar dimana sex ratio mencapai 100,8%. Adapun jumlah penduduk laki-laki di Desa Mangngar sebanyak 1.195 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 1.186 jiwa.

Kondisi di Desa Mangngar tersebut menunjukkan indikator terkait dengan kondisi perempuan di wilayah tersebut. Kondisi tersebut dapat diprediksi melalui tiga hal yaitu angka kelahiran penduduk perempuan, angka migrasi penduduk perempuan serta angka harapan hidup atau kondisi kesehatan penduduk perempuan yang ada di wilayah tersebut.

Secara umum banyaknya penduduk perempuan dibanding laki-laki di Kecamatan Tlanakan harus direspon positif dengan adanya program-program pembangunan yang berwawasan gender terutama partisipasi perempuan dalam pembangunan. Sebab mau tidak mau asset sumber daya manusia yang dimiliki merupakan perempuan, sebab itu perempuan juga harus ditempatkan sebagai subyek pembangunan. Kebutuhan perempuan akan pendidikan, akses kesehatan, akses ekonomi, akses politik harus terjamin setara dengan laki-laki. Demikian dengan kualitas penduduk perempuan dalam hal pendidikan, kesehatan, politik, ekonomi juga harus ditingkatkan.

Tabel III.30
Banyaknya Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin di Kecamatan Tlanakan 2017

Desa	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio (%)
	Laki-laki	Perempuan		
1. Dabuan	916	993	1.909	92,2
2. Terrak	1.812	1.869	3.681	97
3. Mangngar	1.195	1.186	2.381	100,8
4. Bandaran	3.078	3.196	6.274	96,3
5. Kramat	2.027	2.121	4.148	95,6
6. Ambat	2.469	2.482	4.951	99,5
7. Tlanakan	1.877	1.881	3.758	99,8
8. Branta Pesisir	2.953	3.071	6.024	96,2
9. Branta Tinggi	1.034	1.167	2.201	88,6

10. Tlesa	617	692	1.309	89,2
11. Larangan Tokol	3.802	3.974	7.776	95,7
12. Ceguk	1.146	1.238	2.384	92,6
13. Panglegur	2.399	2.524	4.923	95
14. Gugul	1.758	1.903	3.661	92,4
15. Bukek	856	914	1.770	93,7
16. Larangan Slampar	1.982	2.228	4.210	89
17. Toro'an	1.109	1.191	2.300	93,1
Jumlah	31.030	32.630	63.660	95,1

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018

Kepadatan penduduk di Kecamatan Tlanakan mencapai 1.323,49 jiwa/km². Adapun wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu Desa Branta Pesisir 31.705,26. Tingginya kepadatan di wilayah ini dibanding dengan wilayah lain karena jumlah penduduknya yang relative besar sementara luas wilayah hanya 0,19 km².

Tabel III.31
Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Tlanakan 2017

Desa	Banyaknya		Kepadatan Penduduk Per	
	Penduduk	Rumah Tangga	(Km ²)	Ruta
1. Dabuan	1.909	429	1.231,61	4,4
2. Terrak	3.681	1.121	776,58	3,3
3. Mangngar	2.381	648	1.035,22	3,7
4. Bandaran	6.274	1.744	3.319,58	3,6
5. Kramat	4.148	1.331	2.116,33	3,1
6. Ambat	4.951	1.506	1.320,27	3,3
7. Tlanakan	3.758	930	1.286,99	4,0
8. Branta Pesisir	6.024	1.424	31.705,26	4,2
9. Branta Tinggi	2.201	523	1.693,08	4,2
10. Tlesa	1.309	302	2.337,50	4,3
11. Larangan Tokol	7.776	2.060	1.720,35	3,8
12. Ceguk	2.384	654	1.098,62	3,6
13. Panglegur	4.923	1.326	1.745,74	3,7
14. Gugul	3.661	1.062	756,40	3,4
15. Bukek	1.770	565	1.035,09	3,1
16. Larangan Slampar	4.210	1.086	497,05	3,9
17. Toro'an	2.300	559	954,36	4,1
Jumlah	63.660	17.270	1.323,49	3,7

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018

Untuk wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk terendah yaitu Larangan Slampar yaitu 497,5 jiwa/km². Hal ini dikarenakan meskipun jumlah

penduduknya berjumlah 4.210 jiwa, namun Larangan Slampar memiliki luas wilayah yang lebih luas dibanding wilayah lain yaitu 8,47 km².

Dari sisi kepadatan rumah tangga, Kecamatan Tlanakan memiliki kepadatan 3,7 jiwa/ruta. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa didalam setiap keluarga di Kecamatan Tlanakan rata-rata ada 3,7 jiwa. Adapun kepadatan rumah tangga paling tinggi di Desa Dabuan mencapai 4,4 jiwa/ruta. Selanjutnya Desa Tlesa mencapai 4,3 jiwa/ruta, Desa Branta Pesisir dan Branta Tinggi masing-masing 4,2 jiwa/ruta, dan Desa Toro'an yaitu 4,1 jiwa/ruta. Kondisi ini menunjukkan bahwa jumlah anggota keluarga di desa-desa tersebut rata-rata lebih dari 4 orang.

2.4. Fasilitas Publik Kecamatan Tlanakan

Pendidikan

Pendidikan seringkali menjadi factor terjadinya kemiskinan. Penduduk yang dalam kondisi miskin seringkali memiliki tingkat Pendidikan yang minim serta karena kemiskinan yang dialami juga tidak mampu mengakses Pendidikan yang lebih tinggi. Namun kemiskinan terkadang juga diakibatkan karena kultur masyarakat yang menghambat warganya untuk memiliki Pendidikan yang tinggi.

Untuk melepaskan penduduk dari belenggu kemiskinan, maka harus diatasi penyebabnya yaitu Pendidikan. Pendidikan merupakan elevator bagi penduduk miskin untuk melakukan mobilitas social vertical. Upaya peningkatan Pendidikan di masyarakat, tentunya juga dibutuhkan adanya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai mulai dari sarana sekolah dari PAUD hingga Perguruan Tinggi.

Di Kecamatan Tlanakan, selain PAUD dan TK, sarana Pendidikan sekolah dasar negeri juga telah tersedia. Ada sebanyak 32 unit sekolah dasar yang tersebar diseluruh desa. Adapun Desa Bandaran memiliki 4 unit sekolah dasar. Desa Larangan Tokol dan Panglegur masing-masing memiliki 3 unit sekolah dasar negeri. Sedangkan desa lainnya memiliki 1 hingga 2 unit sekolah dasar negeri.

Tabel III.32
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Sekolah Dasar
Negeri di Kecamatan Tlanakan 2016/2017

Desa	Sekolah (Unit)	Ruang Kelas (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
				Laki- laki	Peremp uan
1. Dabuan	2	Ts	Ts	Ts	Ts
2. Terrak	2	Ts	Ts	Ts	Ts
3. Mangngar	1	Ts	Ts	Ts	Ts
4. Bandaran	4	Ts	Ts	Ts	Ts
5. Kramat	1	Ts	Ts	Ts	Ts
6. Ambat	2	Ts	Ts	Ts	Ts
7. Tlanakan	1	Ts	Ts	Ts	Ts
8. Branta Pesisir	2	Ts	Ts	Ts	Ts
9. Branta Tinggi	2	Ts	Ts	Ts	Ts
10. Tlesa	1	Ts	Ts	Ts	Ts
11. Larangan Tokol	3	Ts	Ts	Ts	Ts
12. Ceguk	2	Ts	Ts	Ts	Ts
13. Panglegur	3	Ts	Ts	Ts	Ts
14. Gugul	2	Ts	Ts	Ts	Ts
15. Bukek	1	Ts	Ts	Ts	Ts
16. Larangan Slampar	2	Ts	Ts	Ts	Ts
17. Toro'an	1	ts	ts	ts	ts
Jumlah	32	0	0	0	0

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018

Selain sekolah dasar negeri, di Kecamatan Tlanakan juga terdapat sekolah dasar swasta sebanyak 1 unit yang terdapat di Panglegur. Sekolah tersebut memiliki ruang kelas sebanyak 6 unit. Adapun jumlah guru yang mengajar tercatat 1 orang dengan jumlah murid 63 laki-laki dan 54 perempuan.

Tabel III.33
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Sekolah Dasar
Swasta di Kecamatan Tlanakan 2016/2017

Desa	Sekolah (Unit)	Ruang Kelas (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
				Laki- laki	Peremp uan
1. Dabuan	-	-	-	-	-
2. Terrak	-	-	-	-	-
3. Mangngar	-	-	-	-	-
4. Bandaran	-	-	-	-	-
5. Kramat	-	-	-	-	-
6. Ambat	-	-	-	-	-
7. Tlanakan	-	-	-	-	-
8. Branta Pesisir	-	-	-	-	-
9. Branta Tinggi	-	-	-	-	-

10. Tlesa	-	-	-	-	-
11. Larangan Tokol	-	-	-	-	-
12. Ceguk	-	-	-	-	-
13. Panglegur	1	6	1	63	54
14. Gugul	-	-	-	-	-
15. Bukek	-	-	-	-	-
16. Larangan Slampar	-	-	-	-	-
17. Toro'an	-	-	-	-	-
Jumlah	1	6	1	63	54

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018

Untuk penduduk usia sekolah dasar yang berkebutuhan khusus telah tersedia sekolah dasar luar biasa sebanyak 1 unit. Sekolah tersebut memiliki ruang kelas sebanyak 5 unit dan 2 orang guru. Adapun jumlah murid sekolah dasar luar biasa sebanyak 16 laki-laki dan 11 perempuan.

Tabel III.34
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Sekolah Dasar Luar Biasa di Kecamatan Tlanakan 2016/2017

Desa	Sekolah (Unit)	Ruang Kelas (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
				Laki-laki	Perempuan
18. Dabuan	-	-	-	-	-
19. Terrak	-	-	-	-	-
20. Mangngar	-	-	-	-	-
21. Bandaran	-	-	-	-	-
22. Kramat	-	-	-	-	-
23. Ambat	-	-	-	-	-
24. Tlanakan	-	-	-	-	-
25. Branta Pesisir	-	-	-	-	-
26. Branta Tinggi	-	-	-	-	-
27. Tlesa	-	-	-	-	-
28. Larangan Tokol	-	-	-	-	-
29. Ceguk	-	-	-	-	-
30. Panglegur	1	5	2	16	11
31. Gugul	-	-	-	-	-
32. Bukek	-	-	-	-	-
33. Larangan Slampar	-	-	-	-	-
34. Toro'an	-	-	-	-	-
Jumlah	1	5	2	16	11

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018

Pendidikan SLTP yaitu tingkat diatas sekolah dasar di Kecamatan Tlanakan juga telah tersedia baik yang dikelola oleh pemerintah maupun swasta. Ada 1 unit SLTP yang terletak di Desa Branta Tinggi. Sekolah tersebut memiliki

15 ruang kelas dengan 27 tenaga pengajar. Adapun jumlah murid yang bersekolah di SLTP Negeri sebanyak 235 laki-laki dan 267 perempuan.

Tabel III.35
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SLTP Negeri di Kecamatan Tlanakan 2016/2017

Desa	Sekolah (Unit)	Ruang Kelas (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
				Laki-laki	Perempuan
1. Dabuan	-	-	-	-	-
2. Terrak	-	-	-	-	-
3. Mangngar	-	-	-	-	-
4. Bandaran	-	-	-	-	-
5. Kramat	-	-	-	-	-
6. Ambat	-	-	-	-	-
7. Tlanakan	-	-	-	-	-
8. Branta Pesisir	-	-	-	-	-
9. Branta Tinggi	1	15	27	235	267
10. Tlesa	-	-	-	-	-
11. Larangan Tokol	-	-	-	-	-
12. Ceguk	-	-	-	-	-
13. Panglegur	-	-	-	-	-
14. Gugul	-	-	-	-	-
15. Bukek	-	-	-	-	-
16. Larangan Slampar	-	-	-	-	-
17. Toro'an	-	-	-	-	-
Jumlah	1	15	27	235	267

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018

Keberadaan SLTP Swasta di Kecamatan Tlanakan jauh lebih banyak dibanding SLTP Negeri. Ada sebanyak 10 unit sekolah yang tersebar di Mangngar, Kramat, Tlanakan, Branta Tinggi, Larangan Tokol, Panglegur, Gugul dan Toro'an.

Adapun jumlah ruang yang tersedia sebanyak 46 unit dan jumlah guru yang mengajar di SLTP Swasta sebanyak 61 orang. Banyaknya fasilitas SLTP Swasta menjadikan jumlah murid yang bersekolah juga lebih banyak dibanding dengan ALTP Negeri yaitu 273 laki-laki dan 233 perempuan.

Tabel III.36
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SLTP Swasta di
Kecamatan Tlanakan 2016/2017

Desa	Sekolah (Unit)	Ruang Kelas (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
				Laki- laki	Peremp uan
1. Dabuan	-	-	-	-	-
2. Terrak	-	-	-	-	-
3. Mangngar	1	3	7	15	12
4. Bandaran	-	-	-	-	-
5. Kramat	1	3	6	19	14
6. Ambat	-	-	-	-	-
7. Tlanakan	2	6	12	21	24
8. Branta Pesisir	-	-	-	-	-
9. Branta Tinggi	2	18	11	151	106
10. Tlesa	-	-	-	-	-
11. Larangan Tokol	1	4	5	17	23
12. Ceguk	-	-	-	-	-
13. Panglegur	1	3	7	13	11
14. Gugul	1	6	7	16	19
15. Bukek	-	-	-	-	-
16. Larangan Slampar	-	-	-	-	-
17. Toro'an	1	3	6	21	24
Jumlah	10	46	61	273	233

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018

Tingkat Pendidikan SMU di Kecamatan Tlanakan hanya ada yang dikelola oleh Swasta yaitu sebanyak 5 unit yang tersebar di Desa Mangngar, Kramat, Larangan Tokol, Panglegur, dan Bukek. Adapun jumlah ruang kelas yang tersedia sebanyak 13 unit dengan jumlah guru sebanyak 35 orang dan murid sebanyak 107 laki-laki dan 107 perempuan.

Tabel III.37
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SMU Swasta di
Kecamatan Tlanakan 2016/2017

Desa	Sekolah (Unit)	Ruang Kelas (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
				Laki- laki	Peremp uan
1. Dabuan	-	-	-	-	-
2. Terrak	-	-	-	-	-
3. Mangngar	1	3	9	21	26
4. Bandaran	-	-	-	-	-
5. Kramat	1	2	6	19	21
6. Ambat	-	-	-	-	-
7. Tlanakan	-	-	-	-	-
8. Branta Pesisir	-	-	-	-	-

9. Branta Tinggi	-	-	-	-	-
10. Tlesa	-	-	-	-	-
11. Larangan Tokol	1	2	7	24	18
12. Ceguk	-	-	-	-	-
13. Panglegur	1	3	5	27	23
14. Gugul	-	-	-	-	-
15. Bukek	1	3	8	16	19
16. Larangan Slampar	-	-	-	-	-
17. Toro'an	-	-	-	-	-
Jumlah	5	13	35	107	107

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018

Selain SMU, juga terdapat SMK Negeri sebanyak 1 unit yang terletak di Tlanakan. Sekolah tersebut memiliki 20 unit ruang atau kelas. Adapun jumlah guru yang mengajar sebanyak 46 orang dengan jumlah murid sebanyak 101 laki-laki dan 267 perempuan.

Jika dilihat dari perkembangan jumlah sarana dan prasarana maupun jumlah murid yang semakin berkurang pada jenjang Pendidikan yang semakin tinggi yaitu dari SD hingga SMU merupakan indikator bahwa ada banyak anak usia sekolah pada usia sekolah tersebut yang tidak mengakses sarana dan prasarana Pendidikan yang ada.

Tabel III.38
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SMK Negeri di Kecamatan Tlanakan 2016/2017

Desa	Sekolah (Unit)	Ruang Kelas (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
				Laki-laki	Perempuan
1. Dabuan	-	-	-	-	-
2. Terrak	-	-	-	-	-
3. Mangngar	-	-	-	-	-
4. Bandaran	-	-	-	-	-
5. Kramat	-	-	-	-	-
6. Ambat	-	-	-	-	-
7. Tlanakan	1	20	46	101	267
8. Branta Pesisir	-	-	-	-	-
9. Branta Tinggi	-	-	-	-	-
10. Tlesa	-	-	-	-	-
11. Larangan Tokol	-	-	-	-	-
12. Ceguk	-	-	-	-	-
13. Panglegur	-	-	-	-	-
14. Gugul	-	-	-	-	-
15. Bukek	-	-	-	-	-
16. Larangan Slampar	-	-	-	-	-

17. Toro'an	-	-	-	-	-
Jumlah	1	20	46	101	267

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018

Selain sekolah umum, di Kecamatan Tlanakan juga terdapat sarana dan prasarana Pendidikan berbasis agama. Seperti adanya madrasah ibtidaiyah yang jumlahnya mencapai 14 unit dengan jumlah ruang 84 unit. Adapun guru yang mengajar di madrasah ibtidaiyah sebanyak 146 orang dengan jumlah murid sebanyak 467 laki-laki dan 495 perempuan.

Tabel III.39
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Ibtidaiyah di Kecamatan Tlanakan 2016/2017

Desa	Sekolah (Unit)	Ruang Kelas (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
				Laki-laki	Perempuan
1. Dabuan	1	6	10	23	20
2. Terrak	-	-	-	-	-
3. Mangngar	-	-	-	-	-
4. Bandaran	-	-	-	-	-
5. Kramat	1	6	13	34	38
6. Ambat	3	18	32	151	146
7. Tlanakan	1	6	10	17	19
8. Branta Pesisir	-	-	-	-	-
9. Branta Tinggi	1	6	5	-	29
10. Tlesa	-	-	-	-	-
11. Larangan Tokol	1	6	10	26	28
12. Ceguk	-	-	-	-	-
13. Panglegur	1	6	10	38	35
14. Gugul	1	6	12	31	32
15. Bukek	-	-	-	-	-
16. Larangan Slampar	2	12	20	70	86
17. Toro'an	2	12	24	77	62
Jumlah	14	84	146	467	495

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018

Pada tingkat madrasah tsanawiyah yang sederajat dengan SLTP ada sebanyak 12 unit sekolah dengan 36 unit ruang kelas. Adapun jumlah murid yang bersekolah di madrasah tsanawiyah sebanyak 429 laki-laki dan 507 perempuan.

Tabel III.40
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Madrasah
Tsanawiyah di Kecamatan Tlanakan 2016/2017

Desa	Sekolah (Unit)	Ruang Kelas (Unit)	Murid	
			Laki-laki	Perempuan
1. Dabuan	2	6	52	69
2. Terrak	-	-	-	-
3. Mangngar	-	-	-	-
4. Bandaran	2	6	74	114
5. Kramat	1	3	22	23
6. Ambat	3	9	100	106
7. Tlanakan	-	-	-	-
8. Branta Pesisir	1	3	41	33
9. Branta Tinggi	1	3	30	33
10. Tlesa	-	-	-	-
11. Larangan Tokol	1	3	98	113
12. Ceguk	-	-	-	-
13. Panglegur	1	3	12	16
14. Gugul	-	-	-	-
15. Bukek	-	-	-	-
16. Larangan Slampar	-	-	-	-
17. Toro'an	-	-	-	-
Jumlah	12	36	429	507

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018

Pada tingkat Pendidikan madrasah Aliyah atau setara SMU terdapat 6 unit sekolah yang terletak di Desa Dabuan, Bandaran, Ambat, Branta Tinggi, dan Larangan Tokol. Adapun jumlah ruang kelas yang tersedia sebanyak 18 unit yang menampung 311 murid laki-laki dan 337 murid perempuan.

Tabel III.41
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Madrasah Aliyah di
Kecamatan Tlanakan 2016/2017

Desa	Sekolah (Unit)	Ruang Kelas (Unit)	Murid	
			Laki-laki	Perempuan
1. Dabuan	1	3	26	25
2. Terrak	-	-	-	-
3. Mangngar	-	-	-	-
4. Bandaran	1	3	38	31
5. Kramat	-	-	-	-
6. Ambat	2	6	136	154
7. Tlanakan	-	-	-	-
8. Branta Pesisir	-	-	-	-

9. Branta Tinggi	1	3	42	64
10. Tlesa	-	-	-	-
11. Larangan Tokol	1	3	69	63
12. Ceguk	-	-	-	-
13. Panglegur	-	-	-	-
14. Gugul	-	-	-	-
15. Bukek	-	-	-	-
16. Larangan Slampar	-	-	-	-
17. Toro'an	-	-	-	-
Jumlah	6	18	311	337

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018

Jika diperhatikan dari data yang ada, di Kecamatan Larangan jumlah sarana dan prasarana sekolah serta murid lebih banyak sekolah yang berbasis agama dibandingkan dengan sekolah umum. Artinya permintaan masyarakat akan layanan Pendidikan berbasis agama lebih tinggi. Kondisi tersebut dikarenakan kultur masyarakat yang religious, sehingga dalam menimba ilmu mereka tidak hanya ingin belajar tentang pengetahuan umum tetapi juga pengetahuan agama.

Kesehatan

Untuk menjamin pelayanan kesehatan yang memadai bagi seluruh lapisan masyarakat di Kecamatan Tlanakan ada 1 rumah sakit umum yang terletak di Panglegur. Selain rumah sakit umum, fasilitas pelayanan kesehatan dasar yang tersedia yaitu 2 unit Puskesmas yang terdapat di Bandaran dan Tlanakan.

Untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan, tugas dan fungsi Puskesmas dibantu oleh adanya Puskesmas pembantu yang ada di Mangngar, Dabuan, Branta Tinggi dan Larangan Slampar. Pelayanan kesehatan pada lebel desa dilakukan oleh Polindes sebanyak 5 unit yang terletak di Desa Ambat, Tlanakan, Larangan Tokol dan Panglegur. Layanan kesehatan dasar pada tingkat desa juga dilakukan oleh Poskesdes yang telah tersedia sebanyak 8 unit. Untuk Posyandu yang merupakan sarana kesehatan untuk bayi dan balitas sebanyak 75 unit yang telah tersebar di semua desa. Sedangkan untuk dokter praktek ada sebanyak 2 orang saja yang terletak di Desa Bandaran.

Tabel III.42
Banyaknya Fasilitas Kesehatan Masyarakat Menurut Desa di Kecamatan Tlanakan 2017

Desa	Rumah Sakit Umum	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Polindes	Poskesdes	Posyandu	Dokter
1. Dabuan	-	-	1	-	-	3	-
2. Terrak	-	-	-	-	-	4	-
3. Mangngar	-	-	1	-	-	4	-
4. Bandaran	-	1	-	-	-	5	2
5. Kramat	-	-	-	-	-	3	-
6. Ambat	-	-	-	1	1	7	-
7. Tlanakan	-	1	-	1	-	5	-
8. Branta Pesisir	-	-	-	-	1	4	-
9. Branta Tinggi	-	-	1	-	1	3	-
10. Tlesa	-	-	-	-	1	2	-
11. Larangan Tokol	-	-	-	1	1	10	-
12. Ceguk	-	-	-	-	1	3	-
13. Panglegur	1	-	-	2	-	6	-
14. Gugul	-	-	-	-	1	5	-
15. Bukek	-	-	-	-	1	2	-
16. Larangan Slampar	-	-	1	-	-	6	-
17. Toro'an	-	-	-	-	-	3	-
Jumlah	1	2	4	5	8	75	2

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018

Adanya fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Tlanakan juga telah didukung oleh ketersediaan tenaga kesehatan, meskipun jika dilihat dari sisi kuantitas masih sedikit. Misalnya saja dokter umum yang tersedia hanya 2 orang dan dokter gigi sebanyak 1 orang yang terletak di Tlanakan. Untuk tenaga bidan telah tersedia sebanyak 24 orang yang tersebar di semua desa dan tenaga perawat sebanyak 22 orang yang tersebar di semua desa kecuali Terrak, Gugul dan Tlesa.

Tabel III.43
Banyaknya Tenaga Kesehatan Masyarakat Menurut Desa di Kecamatan Tlanakan 2017

Desa	Dokter Umum	Dokter Gigi	Bidan	Perawat
1. Dabuan	-	-	1	1
2. Terrak	-	-	1	-
3. Mangngar	-	-	2	2
4. Bandaran	-	-	1	5
5. Kramat	-	-	2	2
6. Ambat	-	-	2	1

7. Tlanakan	2	1	1	1
8. Branta Pesisir	-	-	1	1
9. Branta Tinggi	-	-	1	-
10. Tlesa	-	-	1	1
11. Larangan Tokol	-	-	2	1
12. Ceguk	-	-	1	1
13. Panglegur	-	-	2	-
14. Gugul	-	-	1	1
15. Bukek	-	-	1	1
16. Larangan Slampar	-	-	2	2
17. Toro'an	-	-	2	2
Jumlah	2	1	24	22

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018

Keagamaan

Kondisi kultural masyarakat di Kecamatan Tlanakan tidak jauh berbeda dengan masyarakat di Kecamatan Pamekasan yang mayoritas merupakan pemeluk agama islam. Sehingga fasilitas peribadatan yang ada semuanya merupakan fasilitas masjid sebanyak 72 unit dan mushola sebanyak 413 unit.

Tabel III.44
Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Desa di Kecamatan Tlanakan 2017

Desa	Jenis Tempat Peribadatan				
	Masjid	Mushola	Gereja	Pura	Vihara
1. Dabuan	5	21	-	-	-
2. Terrak	4	31	-	-	-
3. Mangngar	5	28	-	-	-
4. Bandaran	4	34	-	-	-
5. Kramat	4	16	-	-	-
6. Ambat	6	42	-	-	-
7. Tlanakan	3	21	-	-	-
8. Branta Pesisir	4	10	-	-	-
9. Branta Tinggi	4	20	-	-	-
10. Tlesa	1	4	-	-	-
11. Larangan Tokol	7	50	-	-	-
12. Ceguk	5	10	-	-	-
13. Panglegur	7	29	-	-	-
14. Gugul	4	20	-	-	-
15. Bukek	2	24	-	-	-
16. Larangan Slampar	5	39	-	-	-
17. Toro'an	2	14	-	-	-
Jumlah	72	413	0	0	0

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018

Olahraga

Pemerintah Kecamatan Tlanakan juga menyediakan fasilitas olahraga bagi warga masyarakat. Aktivitas olahraga penting bagi masyarakat untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh. Fasilitas olahraga yang tersedia adalah 3 unit lapangan sepak bola yang terletak di Teraak, Badaran dan Larangan Tokol. Keberadaan lapangan sepak bola bagi masyarakat desa memiliki banyak fungsi, tidak hanya sebagai tempat untuk berolahraga tetapi juga melakukan aktivitas Bersama.

Fasilitas olah raga lainnya yaitu bulu tangkis sebanyak 2 unit yang terletak di Bandaran dan Mangngar. Fasilitas tennis meja yang tersedia sebanyak 2 unit terletak di Desa Bandaran, sedangkan pencak silat sebanyak 1 unit terletak di Desa Gugul. Adanya fasilitas olahraga tersebut diharapkan dapat meningkatkan prestasi para pemuda dalam bidang olahraga.

Tabel III.45
Banyaknya Fasilitas Olah Raga Menurut Desa di Kecamatan Tlanakan 2017

Desa	Sepak Bola	Bulu tangkis	Tennis Meja	Pencak Silat
1. Dabuan	-	-	-	-
2. Terrak	1	-	-	-
3. Mangngar	-	1	-	-
4. Bandaran	1	1	2	-
5. Kramat	-	-	-	-
6. Ambat	-	-	-	-
7. Tlanakan	-	-	-	-
8. Branta Pesisir	-	-	-	-
9. Branta Tinggi	-	-	-	-
10. Tlesa	-	-	-	-
11. Larangan Tokol	1	-	-	-
12. Ceguk	-	-	-	-
13. Panglegur	-	-	-	-
14. Gugul	-	-	-	1
15. Bukek	-	-	-	-
16. Larangan Slampar	-	-	-	-
17. Toro'an	-	-	-	-
Jumlah	3	2	2	1

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018

Ekonomi

Aktivitas ekonomi penduduk di Kecamatan Tlanakan selama ini didukung oleh adanya berbagai fasilitas atau sarana perdagangan yang memudahkan masyarakat untuk melakukan permintaan dan penawaran. Ada sebanyak 4 unit pasar yang masing-masing terletak di Desa Dabuan, Bandaran, Branta Pesisir dan ceguk.

Keberadaan mini market atau swalayan di Kecamatan Tlanakan cukup banyak yaitu 436 unit. Banyaknya swalayan yang beroperasi tersebut memiliki potensi bagi penyerapan tenaga kerja lokal, akan tetapi dalam perkembangannya juga mempertimbangkan kondisi usaha masyarakat yang lain yang merupakan pelaku usaha toko atau kelontong yang seringkali kalah bersaing dengan mini market/swalayan. Pada tahun 2017 ada sebanyak 71 kios/pedagang kaki lima dan 5 unit toko/swalayan/toserba.

Tabel III.46
Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Desa dan Jenis Sarana di Kecamatan Tlanakan 2017

Desa	Pasar	Mini Market/ Swalayan	Toko/ Swalayan/ Toserba	Kios/ Padagang Kaki Lima
1. Dabuan	1	18	-	-
2. Terrak	-	32	-	-
3. Manggar	-	-	-	-
4. Bandaran	1	72	-	45
5. Kramat	-	66	-	-
6. Ambat	-	-	-	-
7. Tlanakan	-	105	1	-
8. Branta Pesisir	1	-	-	-
9. Branta Tinggi	-	-	-	-
10. Tlesa	-	22	-	-
11. Larangan Tokol	-	45	4	15
12. Ceguk	1	-	-	-
13. Panglegur	-	-	-	-
14. Gugul	-	28	-	-
15. Bukek	-	19	-	11
16. Larangan Slampar	-	29	-	-
17. Toro'an	-	-	-	-
Jumlah	4	436	5	71

Sumber: Kecamatan Tlanakan Dalam Angka 2018

3. Kecamatan Pademawu

3.1. Kondisi Geografis Kecamatan Pademawu



Gambar III.1. Peta Kecamatan Pademawu

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

Kecamatan Pademawu terletak pada $113^{\circ}19' - 113^{\circ}58'$ BT dan $6^{\circ}51' - 7^{\circ}31'$ LS. Letak astronomis tersebut menjadikan Kecamatan Pademawu memiliki 2 musim dalam satu tahun yaitu penghujan dan kemarau. Wilayah yang memiliki luas wilayah $71,90 \text{ km}^2$ ini berbatasan dengan Kecamatan Galis dan Larangan di sebelah utara. Berbatasan dengan Selat Madura di sebelah selatan menjadikan wilayah Pademawu ini juga memiliki karakteristik kultur nelayan.

Di sebelah barat, Kecamatan Pademawu berbatasan dengan Kecamatan Tlanakan dan Pamekasan dan di sebelah timur berbatasan dengan Galis dan Sumenep. Wilayah Kecamatan Pademawu memiliki topografi terletak pada 8 meter dari permukaan laut dengan kelembaban udara rata-rata 80% dan suhu rata-rata maksimum 30°C dan minimum 28°C .

Tabel III.47
Keadaan Umum Geografis dan Iklim di Kecamatan Pademawu 2017

No.	Aspek Geografis	Keterangan
1.	Luas wilayah	71,90 km ²
2.	Letak Wilayah	113°19' - 113°58' BT 6°51' - 7°31' LS
3.	Batas Wilayah a. Utara b. Selatan c. Barat d. Timur	Kec. Galis & Larangan Selat Madura Kec. Tlanakan & Pamekasan Kec. Galis & Sumenep
4.	Musim a. Oktober-April b. April-Oktober	Penghujan Kemarau
5.	Temparetur Rata-rata a. Maksimum b. Minimum	30°C 28°C
6.	Ketinggian dari permukaan laut	8 meter
7.	Kelembaban udara rata-rata	80%

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

Wilayah Kecamatan Pademawu secara administrative terbagi kedalam 22 desa dengan desa yang memiliki wilayah terluas yaitu Desa Padelegan dengan luas 9,07 km² atau 12,61% dari luas Kecamatan Pademawu. Selanjutnya adalah Desa Tanjung yang memiliki luas 7,45 km² atau 10,36% dari luas Kecamatan Pademawu. Desa lainnya yaitu Desa Pademawu Timur dengan luas wilayah 7,45 km² atau 9,75% dari luas Kecamatan Pademawu. Sedangkan desa lainnya memiliki luas wilayah kurang dari 7 km².

Tabel III.48
Persentase Luas Wilayah Menurut Desa di Kecamatan Pademawu 2017

Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	Persentase (%)
1. Baddurih	2,99	4,16
2. Pagagan	1,42	1,97
3. Majungan	3,62	5,03
4. Padelegan	9,07	12,61
5. Tanjung	7,45	10,36
6. Pademawu Timur	7,01	9,75
7. Jarin	4,94	6,87
8. Prekbun	1,04	1,45
9. Sopa'ah	1,38	1,92
10. Buddih	0,96	1,34
11. Durbuk	2,72	3,78

12. Sumedangan	2,33	3,24
13. Pademawu Barat	4,56	6,34
14. Bunder	4,03	5,61
15. Dasok	3,05	4,24
16. Murtajih	3,23	4,49
17. Lemper	1,18	1,64
18. Barurambat Timur	1,59	2,21
19. Lawangan Daya	2,30	3,20
20. Buddagan	1,97	2,74
21. Tambung	2,11	2,93
22. Sentol	2,95	4,10
Jumlah	71.90	100

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

Orbitrasi atau jarak antara desa dengan pusat pemerintahan Kecamatan Pademawu bervariasi. Beberapa desa yang jauh dari kantor kecamatan seperti Baddurih sejauh 12 km, Pagagan sejauh 10 km, Majungan, Padelegan dan Jarin memiliki jarak 7 km. Untuk desa-desa lainnya memiliki jarak kurang dari 7 km, bahkan Pademawu Barat, Bunder, Murtajih, Lemper, Barurambat Timur dan Tambung hanya berjarak 1 km dari kantor kecamatan.

Demikian dengan jarak desa dengan kantor polisi setempat juga memiliki jarak yang sama. Desa Baddurih misalnya memiliki jarak 12 km dari kantor polisi setempat. Desa Pagagan memiliki jarak 10 km dan Desa Majungan, Pedelgan dan Jarin memiliki jarak 7 km. Sedangkan desa-desa yang hanya memiliki jarak 1 km dari kantor polisi setempat adalah Pademawu Barat, Bunder, Murtajih, Lemper, Barurambat Timur dan Tambung.

Adapun jarak desa dengan rumah sakit terdekat juga berbeda-beda. Beberapa desa memiliki jarak yang relative jauh yaitu diatas 7 km seperti Baddurih, Pagagan, Majungan, Pedelegan, Tanjung, Pademawu Timur dan Bunder. Sedangkan desa-desa lainnya memiliki jarak yang berdekatan dengan rumah sakit terdekat yaitu kurang dari 7 km.

Meskipun jauh dari akses rumah sakit, beberapa desa juga jauh dari akses Puskesmas terdekat. Misalnya saja desa Baddurih, Pedelegan dan Tanjung memiliki jarak 7 km lebih untuk sampai ke Puskesmas terdekat. Sementara desa lainnya berdekatan dengan Puskesmas kecuali Desa Sopa'ah dan Lemper.

Tabel III.49
Jarak Kantor Desa/Kelurahan ke Fasilitas (Km) di Kecamatan
Pademawu 2017

Desa/Kelurahan	Kantor Kecamatan Setempat	Kantor Polisi Setempat	Rumah Sakit Terdekat	Puskesmas Terdekat
1. Baddurih	12	12	8	7
2. Pagagan	10	10	10	5
3. Majungan	7	7	10	6
4. Padelegan	7	7	11	7
5. Tanjung	3	3	10	9
6. Pademawu Timur	2	2	8	5
7. Jarin	7	7	6	2
8. Prekbun	6	6	4,5	0,5
9. Sopa'ah	4	4	2	-
10. Buddih	5	5	2	1
11. Durbuk	4	4	5	1,5
12. Sumedangan	3	3	3,6	2,7
13. Pademawu Barat	1	1	5,5	1
14. Bunder	1	1	9	3,0
15. Dasok	3	3	4,9	3,2
16. Murtajih	1	1	4	-
17. Lemper	1	1	4,9	2,4
18. Barurambat Timur	1	1	2	3
19. Lawangan Daya	2	2	4,5	2,4
20. Buddagan	2	2	5	2
21. Tambung	1	1	4,8	1,4
22. Sentol	2	3	4	3,0

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

3.2. Pemerintahan Kecamatan Pademawu

Pemerintahan Kecamatan Pademawu dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh staff kecamatan maupun perangkat desa. Untuk memudahkan pengorganisasian dan pengkoordinasian, wilayah kecamatan dibagi kedalam 22 wilayah administrative yaitu desa.

Masing-masing desa terbagi kedalam 121 dusun yang dipimpin oleh kepala dusun dengan 98 Rukun Warga dan 218 Rukun tetangga. Ada beberapa desa yang tidak terbagi kedalam RT dan RW yaitu Desa Baddurih, Pagagan, Majungan, Tanjung, Jarik, dan Durbuk.

Tabel III.50
Pembagian Wilayah Administrasi Pemerintah Desa/Kelurahan di
Kecamatan Pademawu 2017

Desa/Kelurahan	Dusun/ Kampung/ Lingkungan	Rukun Warga	Rukun Tetangga
1. Baddurih	4	-	-
2. Pagagan	3	-	-
3. Majungan	6	-	-
4. Padelegan	6	6	12
5. Tanjung	9	-	-
6. Pademawu Timur	9	16	41
7. Jarin	6	-	-
8. Prekbun	2	2	5
9. Sopa'ah	2	2	6
10. Buddih	3	3	6
11. Durbuk	4	-	-
12. Sumedangan	5	5	19
13. Pademawu Barat	7	8	37
14. Bunder	4	4	11
15. Dasok	5	18	5
16. Murtajih	8	8	17
17. Lemper	3	3	6
18. Barurambat Timur	11	4	15
19. Lawangan Daya	9	5	15
20. Buddagan	7	5	11
21. Tambung	4	5	8
22. Sentol	4	4	4
Jumlah	121	98	218

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

Didalam menjalankan urusan pemerintahan desa seorang kepala desa dibantu oleh perangkat desa meliputi kepala dusun, modin, anggota BPD, serta Kepala Urusan yang terdiri dari Urusan Pemerintahan, Ekbang, Keuangan, Kesejahteraan dan Umum. Pada tahun 2018 ada dua dusun yang tidak memiliki kepala dusun yaitu Barurambat Timur dan Lawangan Daya, sehingga untuk urusan pemerintahan ditangani langsung oleh kepala desa Bersama dengan kepala urusan.

Tabel III.51
Banyaknya Perangkat Desa/Kelurahan Menurut Desa di Kecamatan
Pademawu 2017

Desa/Kelurahan	Banyaknya			Kepala Urusan				
	Kepala Dusun	Modin	Anggota BPD	Pemerintahan	Ekban g	Keu	Kesra	Umum
1. Baddurih	4	1	7	1	1	1	1	1
2. Pagagan	3	1	7	1	1	1	1	1
3. Majungan	6	6	7	1	1	-	1	1
4. Padelegan	6	2	9	1	1	1	1	1
5. Tanjung	9	2	9	1	2	1	1	1
6. Pademawu Timur	9	1	9	1	1	1	1	1
7. Jarin	6	1	8	1	1	1	1	1
8. Prekbun	2	1	5	1	1	1	1	1
9. Sopa'ah	2	1	5	1	1	-	1	1
10. Buddih	3	1	5	1	1	1	1	1
11. Durbuk	4	1	7	1	1	1	1	1
12. Sumedangan	5	1	9	1	1	1	1	1
13. Pademawu Barat	6	2	9	1	1	-	1	2
14. Bunder	4	2	7	1	1	1	1	1
15. Dasok	5	1	9	1	1	1	1	1
16. Murtajih	8	1	9	1	1	1	1	1
17. Lemper	3	1	6	1	1	-	1	1
18. Barurambat Timur	-	2	-	-	1	1	1	-
19. Lawangan Daya	-	2	-	1	1	1	1	1
20. Buddagan	7	1	9	1	1	1	1	1
21. Tambung	4	1	6	1	1	1	1	1
22. Sentol	4	1	9	1	1	1	1	1
Jumlah	100	33	151	21	23	18	22	22

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

3.3. Penduduk Kecamatan Pademawu

Penduduk di Kecamatan Pademawu tersebar di 22 desa. Adapun jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Pademawu sebanyak 82.724 jiwa dengan komposisi 40.146 laki-laki dan 42.578 perempuan. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Desa Lawangan Daya sebesar 8.144 jiwa, dan desa dengan jumlah penduduk terkecil adalah Desa Sopa'ah sebanyak 520 jiwa, Prekbun dan Buddih masing-masing 577 jiwa.

Dilihat dari komposisi penduduk laki-laki dan perempuan, secara umum memiliki sex ratio sebesar 94,3%. Hampir semua desa memiliki komposisi penduduk perempuan lebih besar dibanding laki-laki sehingga sex ratio dibawah 100%. Akan tetapi, ada beberapa desa yang menunjukkan sex ratio melebihi 100% yaitu Tambung dengan sex ratio sebesar 100%, Buddagan 100,7% dan Sentol paling tinggi yaitu 101,8%. Kondisi tersebut tentu saja harus diperhatikan

mengingat sex ratio menunjukkan kondisi penduduk perempuan di desa-desa tersebut.

Tabel III.52
Banyaknya Penduduk Menurut Desa dan Jenis Kelamin di Kecamatan Pademawu 2017

Desa/Kelurahan	Jenis Kelamin		Jumlah	Sex Ratio (%)
	Laki-laki	Perempuan		
1. Baddurih	912	992	1.904	91,9
2. Pagagan	1.095	1.188	2.283	92,2
3. Majungan	1.029	1.061	2.090	97
4. Padelegan	1.618	1.638	3.256	98,8
5. Tanjung	3.370	3.597	6.967	93,7
6. Pademawu Timur	3.273	3.548	6.821	92,2
7. Jarin	1.932	2.085	4.017	92,7
8. Prekbun	516	577	1.093	89,4
9. Sopa'ah	489	520	1.009	94
10. Buddih	544	577	1.121	94,3
11. Durbuk	1.324	1.386	2.710	95,5
12. Sumedangan	1.566	1.629	3.195	96,1
13. Pademawu Barat	2.966	3.304	6.270	89,8
14. Bunder	1.307	1.451	2.758	90,1
15. Dasok	1.842	1.980	3.822	93
16. Murtajih	2.926	3.139	6.065	93,2
17. Lemper	1.175	1.220	2.395	96,3
18. Barurambat Timur	2.801	3.080	5.881	90,9
19. Lawangan Daya	3.975	4.169	8.144	95,3
20. Buddagan	2.311	2.295	4.606	100,7
21. Tambung	1.293	1.293	2.586	100
22. Sentol	1.882	1.849	3.731	101,8
Jumlah	40.146	42.578	82.724	94,3

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

Kepadatan penduduk di Kecamatan Pademawu mencapai 1.150,5 jiwa/km². Adapun kepadatan penduduk tertinggi berada di Barurambat Timur sebesar 3.698,7 jiwa/km². Selanjutnya desa Lawangan Daya memiliki kepadatan mencapai 3.540,9 jiwa/km². Sedangkan kepadatan penduduk terendah di Desa Padelagan yaitu 359 jiwa/km². Kepadatan di Desa Padelegan rendah dikarenakan selain jumlah penduduknya sedikit juga memiliki luas wilayah yang paling luas yaitu mencapai 9,07 km².

Dilihat dari kepadatan rumah tangga, Desa Sentol memiliki kepadatan paling tinggi yaitu 4,3 jiwa/ruta. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rata-rata jumlah keluarga di Desa Sentol terdiri dari lebih 4 orang. Beberapa desa juga

memiliki tingkat kepadatan rumah tangga lebih dari 4 jiwa/ruta yaitu Desa Pademawu Barat, Murtajih, Lawangan Daya dan Buddagan.

Tabel III.53
Kepadatan Penduduk Menurut Desa di Kecamatan Pademawu 2017

Desa/Kelurahan	Banyaknya		Kepadatan Penduduk Per	
	Penduduk	Rumah Tangga	(Km ²)	Ruta
1. Baddurih	1.904	603	636,8	3,2
2. Pagagan	2.283	735	1.607,7	3,1
3. Majungan	2.090	641	577,3	3,3
4. Padelegan	3.256	962	359	3,4
5. Tanjung	6.967	1.831	935,2	3,8
6. Pademawu Timur	6.821	1.845	973	3,7
7. Jarin	4.017	1.407	813,2	2,9
8. Prekbun	1.093	356	1.051	3,1
9. Sopa'ah	1.009	312	731,2	3,2
10. Buddih	1.121	329	1.167,7	3,4
11. Durbuk	2.710	753	996,3	3,6
12. Sumedangan	3.195	920	1.371,2	3,5
13. Pademawu Barat	6.270	1.572	1.375	4
14. Bunder	2.758	845	684,4	3,3
15. Dasok	3.822	1.121	1.253,1	3,4
16. Murtajih	6.065	1.464	1.877,7	4,1
17. Lemper	2.395	668	2.029,7	3,6
18. Barurambat Timur	5.881	1.539	3.698,7	3,8
19. Lawangan Daya	8.144	1.938	3.540,9	4,2
20. Buddagan	4.606	1.159	2.338,1	4
21. Tambung	2.586	700	1.225,6	3,7
22. Sentol	3.731	865	1.264,7	4,3
Jumlah	82.724	22.565	1.150,5	3,7

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

3.4. Fasilitas Publik Kecamatan Pademawu

Pendidikan

Pendidikan memiliki peran untuk mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Pademawu. Untuk itu, telah ada sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Kecamatan Pademawu dalam meningkatkan kualitas Pendidikan penduduk di Kecamatan Pademawu.

Sarana dan prasarana Pendidikan yang telah tersedia antara lain pada tingkat pendidikan sekolah dasar ada sebanyak 46 unit. Ada sebanyak 312 unit ruang kelas yang telah difungsikan untuk kegiatan belajar mengajar bagi 3.371 murid laki-laki dan 3.082 murid perempuan. Adapun guru yang mengajar di

sekolah dasar negeri sebanyak 407 orang. Keberadaan sekolah dasar negeri telah tersedia di seluruh desa kecuali Desa Buddih.

Tabel III.54
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Sekolah Dasar Negeri di Kecamatan Pademawu 2016/2017

Desa/Kelurahan	Sekolah (Unit)	Ruang Kelas (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
				Laki-laki	Perempuan
1. Baddurih	1	6	9	97	62
2. Pagagan	2	12	17	120	103
3. Majungan	1	6	8	78	49
4. Padelegan	1	12	14	185	140
5. Tanjung	6	36	47	376	371
6. Pademawu Timur	3	21	30	186	179
7. Jarin	4	24	29	119	125
8. Prekbun	1	6	6	3	34
9. Sopa'ah	1	6	9	71	56
10. Buddih	-	-	-	-	-
11. Durbuk	2	12	17	128	85
12. Sumedangan	2	12	18	148	129
13. Pademawu Barat	3	24	28	276	259
14. Bunder	2	12	19	100	101
15. Dasok	3	18	24	152	131
16. Murtajih	3	23	32	322	316
17. Lemper	2	12	16	157	135
18. Barurambat Timur	2	12	16	114	108
19. Lawangan Daya	2	28	29	430	438
20. Buddagan	1	6	9	55	56
21. Tambung	2	12	15	94	70
22. Sentol	2	12	15	160	135
Jumlah	46	312	407	3.371	3.082

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

Selain tingkat Pendidikan sekolah dasar negeri, juga terdapat sekolah dasar swasta sebanyak 5 unit sekolah yang terdapat di Lawangan Daya sebanyak 4 unit dan Tambung sebanyak 1 unit. Adapun jumlah ruang yang tersedia sebanyak 27 unit dengan jumlah guru sebanyak 71 orang. Adapun jumlah murid sebanyak 269 laki-laki dan 220 perempuan.

Tabel III.55
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Sekolah Dasar Swasta di Kecamatan Pademawu 2016/2017

Desa/Kelurahan	Sekolah (Unit)	Ruang Kelas (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
				Laki-laki	Perempuan
1. Baddurih	-	-	-	-	-
2. Pagagan	-	-	-	-	-
3. Majungan	-	-	-	-	-
4. Padelegan	-	-	-	-	-
5. Tanjung	-	-	-	-	-
6. Pademawu Timur	-	-	-	-	-
7. Jarin	-	-	-	-	-
8. Prekbun	-	-	-	-	-
9. Sopa'ah	-	-	-	-	-
10. Buddih	-	-	-	-	-
11. Durbuk	-	-	-	-	-
12. Sumedangan	-	-	-	-	-
13. Pademawu Barat	-	-	-	-	-
14. Bunder	-	-	-	-	-
15. Dasok	-	-	-	-	-
16. Murtajih	-	-	-	-	-
17. Lemper	-	-	-	-	-
18. Barurambat Timur	-	-	-	-	-
19. Lawangan Daya	4	21	57	205	172
20. Buddagan	-	-	-	-	-
21. Tambung	1	6	14	64	48
22. Sentol	-	-	-	-	-
Jumlah	5	27	71	269	220

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

Untuk siswa yang berkebutuhan khusus telah tersedia sekolah dasar luar biasa sebanyak 1 unit di Desa Buddagan. Adapun ruang kelas yang tersedia sebanyak 6 unit dengan 5 orang guru. Jumlah murid yang bersekolah sebanyak 8 laki-laki dan 5 perempuan.

Tabel III.56
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Sekolah Dasar Luar Biasa di Kecamatan Pademawu 2016/2017

Desa/Kelurahan	Sekolah (Unit)	Ruang Kelas (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
				Laki-laki	Perempuan
1. Baddurih	-	-	-	-	-
2. Pagagan	-	-	-	-	-
3. Majungan	-	-	-	-	-
4. Padelegan	-	-	-	-	-

5. Tanjung	-	-	-	-	-
6. Pademawu Timur	-	-	-	-	-
7. Jarin	-	-	-	-	-
8. Prekbun	-	-	-	-	-
9. Sopa'ah	-	-	-	-	-
10. Buddih	-	-	-	-	-
11. Durbuk	-	-	-	-	-
12. Sumedangan	-	-	-	-	-
13. Pademawu Barat	-	-	-	-	-
14. Bunder	-	-	-	-	-
15. Dasok	-	-	-	-	-
16. Murtajih	-	-	-	-	-
17. Lemper	-	-	-	-	-
18. Barurambat Timur	-	-	-	-	-
19. Lawangan Daya	-	-	-	-	-
20. Buddagan	1	6	5	8	5
21. Tambung	-	-	-	-	-
22. Sentol	-	-	-	-	-
Jumlah	1	6	5	8	5

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

Tingkat Pendidikan SLTP Negeri di Kecamatan Pademawu tersedia sebanyak 5 unit yang terletak di Desa Padelegan sebanyak 1 unit, Pademawu Barat 3 unit dan Barurambat Timur 1 unit. Ruang kelas yang tersedia sebanyak 75 unit dengan jumlah guru sebanyak 190 orang. Adapun jumlah murid yang bersekolah pada SLTP Negeri sebanyak 1.247 laki-laki dan 1.104 perempuan.

Tabel III.57
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SLTP Negeri di Kecamatan Pademawu 2016/2017

Desa/Kelurahan	Sekolah (Unit)	Ruang Kelas (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
				Laki-laki	Perempuan
1. Baddurih	-	-	-	-	-
2. Pagagan	-	-	-	-	-
3. Majungan	-	-	-	-	-
4. Padelegan	1	9	27	167	115
5. Tanjung	-	-	-	-	-
6. Pademawu Timur	-	-	-	-	-
7. Jarin	-	-	-	-	-
8. Prekbun	-	-	-	-	-
9. Sopa'ah	-	-	-	-	-
10. Buddih	-	-	-	-	-
11. Durbuk	-	-	-	-	-
12. Sumedangan	-	-	-	-	-
13. Pademawu Barat	3	44	106	710	609
14. Bunder	-	-	-	-	-

15. Dasok	-	-	-	-	-
16. Murtajih	-	-	-	-	-
17. Lemper	-	-	-	-	-
18. Barurambat Timur	1	22	57	370	380
19. Lawangan Daya	-	-	-	-	-
20. Buddagan	-	-	-	-	-
21. Tambung	-	-	-	-	-
22. Sentol	-	-	-	-	-
Jumlah	5	75	190	1.247	1.104

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

Selain SLTP Negeri juga terdapat SLTP swasta yang memfasilitas kebutuhan masyarakat akan pelayanan Pendidikan ditingkat SLTP. Sampai pada tahun 2017, ada sebanyak 7 unit SLTP Swasta yang terletak di Baddurih sebanyak 1 unit, Jarin sebanyak 1 unit, Pademawu Timur sebanyak 1 unit, Barurambat Timur sebanyak 2 unit dan Lawangan Daya sebanyak 3 unit.

Banyaknya ruang yang tersedia pada SLTP Swasta di Kecamatan Pademawu sebanyak 27 unit dengan 105 orang. Adapun jumlah murid yang sekolah di SLTP Swasta mencapai 232 laki-laki dan 247 perempuan.

Tabel III.58
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SLTP Swasta di Kecamatan Pademawu 2016/2017

Desa/Kelurahan	Sekolah (Unit)	Ruang Kelas (unit)	Guru (Orang)	Murid	
				Laki-laki	Perempuan
1. Baddurih	1	5	22	71	57
2. Pagagan	-	-	-	-	-
3. Majungan	-	-	-	-	-
4. Padelegan	-	-	-	-	-
5. Tanjung	-	-	-	-	-
6. Pademawu Timur	-	-	-	-	-
7. Jarin	1	3	14	62	35
8. Prekbun	-	-	-	-	-
9. Sopa'ah	-	-	-	-	-
10. Buddih	-	-	-	-	-
11. Durbuk	-	-	-	-	-
12. Sumedangan	-	-	-	-	-
13. Pademawu Barat	-	-	-	-	-
14. Bunder	-	-	-	-	-
15. Dasok	-	-	-	-	-
16. Murtajih	-	-	-	-	-
17. Lemper	-	-	-	-	-
18. Barurambat Timur	2	10	30	14	98
19. Lawangan Daya	3	9	39	85	57

20. Buddagan	-	-	-	-	-
21. Tambung	-	-	-	-	-
22. Sentol	-	-	-	-	-
Jumlah	7	27	105	232	247

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

Dibanding dengan fasilitas sekolah tingkat SD maupun SLTP, fasilitas pendidikan tingkat SMU jumlahnya lebih sedikit. Untuk SMU Negeri jumlahnya mencapai 2 unit yang terletak di Bunder dan Barurambat Timur. Meskipun jumlahnya sedikit namun jumlah ruang yang tersedia mencapai 44 unit. Adapun jumlah guru yang mengajar di SMU Negeri sebanyak 116 orang dengan jumlah murid sebanyak 847 laki-laki dan 762 perempuan.

Tabel III.59
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SMU Negeri di Kecamatan Pademawu 2016/2017

Desa/Kelurahan	Sekolah (Unit)	Ruang Kelas (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
				Laki-laki	Perempuan
1. Baddurih	-	-	-	-	-
2. Pagagan	-	-	-	-	-
3. Majungan	-	-	-	-	-
4. Padelegan	-	-	-	-	-
5. Tanjung	-	-	-	-	-
6. Pademawu Timur	-	-	-	-	-
7. Jarin	-	-	-	-	-
8. Prekbun	-	-	-	-	-
9. Sopa'ah	-	-	-	-	-
10. Buddih	-	-	-	-	-
11. Durbuk	-	-	-	-	-
12. Sumedangan	-	-	-	-	-
13. Pademawu Barat	-	-	-	-	-
14. Bunder	1	17	51	359	290
15. Dasok	-	-	-	-	-
16. Murtajih	-	-	-	-	-
17. Lemper	-	-	-	-	-
18. Barurambat Timur	1	27	65	488	472
19. Lawangan Daya	-	-	-	-	-
20. Buddagan	-	-	-	-	-
21. Tambung	-	-	-	-	-
22. Sentol	-	-	-	-	-
Jumlah	2	44	116	847	762

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

Jumlah SMU Swasta di Kecamatan Pademawu sebanyak 2 unit yang terletak di Desa Barurambat Timur dan Lawangan Daya. Keberadaan SMU Swasta ini membantu menyerap anak usia sekolah SMU yang kemungkinan tidak bias diterima disekolah SMU Negeri karena keterbatasan kuota. SMU Swasta ini memiliki 6 unit ruang kelas dengan jumlah murid sebanyak 120 laki-laki dan 82 perempuan. Adapun guru yang mengajar pada SMU Swasta sebanyak 39 orang.

Tabel III.60
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SMU Swasta di Kecamatan Pademawu 2016/2017

Desa/Kelurahan	Sekolah (Unit)	Ruang Kelas (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
				Laki-laki	Perempuan
1. Baddurih	-	-	-	-	-
2. Pagagan	-	-	-	-	-
3. Majungan	-	-	-	-	-
4. Padelegan	-	-	-	-	-
5. Tanjung	-	-	-	-	-
6. Pademawu Timur	-	-	-	-	-
7. Jarin	-	-	-	-	-
8. Prekbun	-	-	-	-	-
9. Sopa'ah	-	-	-	-	-
10. Buddih	-	-	-	-	-
11. Durbuk	-	-	-	-	-
12. Sumedangan	-	-	-	-	-
13. Pademawu Barat	-	-	-	-	-
14. Bunder	-	-	-	-	-
15. Dasok	-	-	-	-	-
16. Murtajih	-	-	-	-	-
17. Lemper	-	-	-	-	-
18. Barurambat Timur	1	3	16	62	42
19. Lawangan Daya	1	3	23	58	40
20. Buddagan	-	-	-	-	-
21. Tambung	-	-	-	-	-
22. Sentol	-	-	-	-	-
Jumlah	2	6	39	120	82

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

Sekolah Menengah Kejuruan atau biasa disebut SMK juga tersedia sebanyak 1 unit yang dikelola oleh swasta. Sekolah yang terletak di Barurambat Timur tersebut memiliki 3 unit ruang kelas dengan 18 orang guru. Adapun jumlah murid laki-laki sebanyak 91 dan perempuan sebanyak 32. Sekolah SMK pada umumnya memiliki kecenderungan lebih banyak murid laki-laki daripada

perempuan karena kejuruan umumnya lebih banyak skill untuk bidang kerja laki-laki seperti teknik mesin, teknik elektro dan lain-lain.

Tabel III.61
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid SMK Swasta di Kecamatan Pademawu 2016/2017

Desa/Kelurahan	Sekolah (Unit)	Ruang Kelas (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
				Laki-laki	Perempuan
1. Baddurih	-	-	-	-	-
2. Pagagan	-	-	-	-	-
3. Majungan	-	-	-	-	-
4. Padelegan	-	-	-	-	-
5. Tanjung	-	-	-	-	-
6. Pademawu Timur	-	-	-	-	-
7. Jarin	-	-	-	-	-
8. Prekbun	-	-	-	-	-
9. Sopa'ah	-	-	-	-	-
10. Buddih	-	-	-	-	-
11. Durbuk	-	-	-	-	-
12. Sumedangan	-	-	-	-	-
13. Pademawu Barat	-	-	-	-	-
14. Bunder	-	-	-	-	-
15. Dasok	-	-	-	-	-
16. Murtajih	-	-	-	-	-
17. Lemper	-	-	-	-	-
18. Barurambat Timur	1	3	18	91	32
19. Lawangan Daya	-	-	-	-	-
20. Buddagan	-	-	-	-	-
21. Tambung	-	-	-	-	-
22. Sentol	-	-	-	-	-
Jumlah	1	3	18	91	32

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

Pada sekolah yang setingkat sekolah dasar ada madrasah ibtidaiyah yang menjadi alternative bagi anak usia sekolah dasar yang ingin bersekolah di sekolah berbasis agama. Di Kecamatan Pademawu ada sebanyak 5 unit sekolah yang terletak di Pademawu Timur, Jarin, Murtajih dan Buddagan. Madrasah Ibtidaiyah yang ada di Kecamatan Pademawu memiliki ruang kelas sebanyak 30 unit dengan 53 guru. Adapun murid yang bersekolah di madrasah ibtidaiyah sebanyak 157 laki-laki dan 175 perempuan.

Tabel III.62
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Ibtidaiyah di
Kecamatan Pademawu 2016/2017

Desa/Kelurahan	Sekolah (Unit)	Ruang Kelas (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
				Laki- laki	Peremp uan
1. Baddurih	-	-	-	-	-
2. Pagagan	-	-	-	-	-
3. Majungan	-	-	-	-	-
4. Padelegan	-	-	-	-	-
5. Tanjung	-	-	-	-	-
6. Pademawu Timur	1	6	9	30	38
7. Jarin	2	12	23	79	80
8. Prekbun	-	-	-	-	-
9. Sopa'ah	-	-	-	-	-
10. Buddih	-	-	-	-	-
11. Durbuk	-	-	-	-	-
12. Sumedangan	-	-	-	-	-
13. Pademawu Barat	-	-	-	-	-
14. Bunder	-	-	-	-	-
15. Dasok	-	-	-	-	-
16. Murtajih	1	6	11	30	32
17. Lemper	-	-	-	-	-
18. Barurambat Timur	-	-	-	-	-
19. Lawangan Daya	-	-	-	-	-
20. Buddagan	1	6	10	18	25
21. Tambung	-	-	-	-	-
22. Sentol	-	-	-	-	-
Jumlah	5	30	53	157	175

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

Madrasah Tsanawiyah setara dengan sekolah SLTP dan merupakan alternative pilihan bagi penduduk di usia sekolah tersebut untuk mengenyam pendidikan SLTP yang berbasis pada ilmu agama yaitu Madrasah Tsanawiyah. Di Kecamatan Pademawu tersedia 4 unit Madrasah Tsanawiyah yang terletak di Pademawu Timur dengan 3 unit ruang kelas. Adapun jumlah guru yang tersedia sebanyak 10 orang dengan jumlah murid 18 laki-laki dan 17 perempuan pada tahun 2016/2017.

Di Desa Buddagan terdapat 1 unit Madrasah Tsanawiyah dengan 3 unit ruang kelas. Adapun jumlah guru yang ada sebanyak 6 orang dengan 10 murid laki-laki dan 17 perempuan. Sementara di Sentol terdapat 2 unit Madrasah Tsanawiyah dengan 6 unit ruang kelas dan 25 orang guru. Adapun jumlah murid sebanyak 42 laki-laki dan 43 perempuan.

Tabel III.63
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Madrasah
Tsanawiyah di Kecamatan Pademawu 2016/2017

Desa/Kelurahan	Sekolah (Unit)	Ruang Kelas (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
				Laki- laki	Peremp uan
1. Baddurih	-	-	-	-	-
2. Pagagan	-	-	-	-	-
3. Majungan	-	-	-	-	-
4. Padelegan	-	-	-	-	-
5. Tanjung	-	-	-	-	-
6. Pademawu Timur	1	3	10	18	17
7. Jarin	-	-	-	-	-
8. Prekbun	-	-	-	-	-
9. Sopa'ah	-	-	-	-	-
10. Buddih	-	-	-	-	-
11. Durbuk	-	-	-	-	-
12. Sumedangan	-	-	-	-	-
13. Pademawu Barat	-	-	-	-	-
14. Bunder	-	-	-	-	-
15. Dasok	-	-	-	-	-
16. Murtajih	-	-	-	-	-
17. Lemper	-	-	-	-	-
18. Barurambat Timur	-	-	-	-	-
19. Lawangan Daya	-	-	-	-	-
20. Buddagan	1	3	6	10	17
21. Tambung	-	-	-	-	-
22. Sentol	2	6	25	42	43
Jumlah	4	12	225	70	77

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

Selanjutnya, juga terdapat Madrasah Aliyah yang setara dengan SMA yaitu sebanyak 4 unit. Adapun jumlah seluruh ruangan 6 unit dan 49 guru. Madrasah Aliyah tersebut memiliki 50 murid laki-laki dan 55 murid perempuan. Sekolah tersebut tersebar di Barurambat Timur, Lawangan Daya, Buddagan dan Sentol masing-masing 1 unit.

Tabel III.64
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Madrasah Aliyah di
Kecamatan Pademawu 2016/2017

Desa/Kelurahan	Sekolah (Unit)	Ruang Kelas (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
				Laki- laki	Peremp uan
1. Baddurih	-	-	-	-	-
2. Pagagan	-	-	-	-	-
3. Majungan	-	-	-	-	-

4. Padelegan	-	-	-	-	-
5. Tanjung	-	-	-	-	-
6. Pademawu Timur	-	-	-	-	-
7. Jarin	-	-	-	-	-
8. Prekbun	-	-	-	-	-
9. Sopa'ah	-	-	-	-	-
10. Buddih	-	-	-	-	-
11. Durbuk	-	-	-	-	-
12. Sumedangan	-	-	-	-	-
13. Pademawu Barat	-	-	-	-	-
14. Bunder	-	-	-	-	-
15. Dasok	-	-	-	-	-
16. Murtajih	-	-	-	-	-
17. Lemper	-	-	-	-	-
18. Barurambat Timur	1	-	17	-	-
19. Lawangan Daya	1	-	9	-	-
20. Buddagan	1	3	14	20	28
21. Tambung	-	-	-	-	-
22. Sentol	1	3	9	30	27
Jumlah	4	6	49	50	55

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

Pendidikan masyarakat di Kecamatan Pademawu banyak pilihannya pada Madrasah Diniyah dimana pada tahun 2016/2017 terdapat 3.519 murid laki-laki dan 4.349 murid perempuan. Banyaknya minat masyarakat terhadap sekolah tersebut menjadikan ketersediaan fasilitas Madrasah Diniyah mencapai 73 yang terletak di masing-masing desa kecuali Sopa'ah. Adapun jumlah ruangan yang tersedia sebanyak 376 dengan jumlah guru sebanyak 717 orang.

Tabel III.65
Banyaknya Sekolah, Ruang Kelas, Guru dan Murid Madrasah Diniyah di Kecamatan Pademawu 2016/2017

Desa/Kelurahan	Sekolah (Unit)	Ruang Kelas (Unit)	Guru (Orang)	Murid	
				Laki-laki	Perempuan
1. Baddurih	2	12	25	111	135
2. Pagagan	2	12	28	125	144
3. Majungan	4	22	47	155	184
4. Padelegan	2	12	22	215	241
5. Tanjung	4	18	37	178	216
6. Pademawu Timur	8	46	82	414	494
7. Jarin	6	28	50	203	257
8. Prekbun	1	6	16	71	85
9. Sopa'ah	-	-	-	-	-
10. Buddih	1	4	6	18	25
11. Durbuk	3	16	28	116	147

12. Sumedangan	3	16	27	157	163
13. Pademawu Barat	3	18	31	162	212
14. Bunder	2	12	19	92	123
15. Dasok	4	22	37	172	244
16. Murtajih	7	34	60	344	439
17. Lemper	2	12	20	155	166
18. Barurambat Timur	4	22	39	165	229
19. Lawangan Daya	7	32	54	229	298
20. Buddagan	4	20	37	211	251
21. Tambung	1	6	12	75	107
22. Sentol	3	6	40	151	189
Jumlah	73	376	717	3.519	4.349

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

Kesehatan

Wilayah yang sumber daya manusianya memiliki derajat kesehatan yang tinggi akan lebih mudah dalam mewujudkan cita-cita pembangunan menjadi wilayah yang maju. Untuk itu, diperlukan fasilitas kesehatan yang memadai untuk menjamin kesehatan masyarakat disegala lapisan atau strata social.

Pelayanan fasilitas kesehatan di Kecamatan Pademawu saat ini sudah tersedia dari mulai rumah sakit hingga tingkat posyandu. Ada sebanyak 2 unit rumah sakit umum yang terletak di Desa Lawangan Daya dan Buddagan. Untuk rumah sakit bersalin terlah ada 1 unit di Desa Lawangan Daya. Untuk pelayanan kesehatan tingkat dasar telah tersedia puskesmas yang terletak di Sopa'ah dan mUrtajih, serta 4 unit puskesmas pembantu yang terletak di Padelagan, Pademawu Timur, Bunder, dan Barurambat Timur.

Fasilitas kesehatan pada level desa juga tersedia di hamper setiap desa yaitu 13 polindes, 13 poskesdes, 99 posyandu. Sedangkan fasilitas kesehatan yang merupakan praktek pribadi ada sebanyak 2 dokter, 20 bidan, 10 mantri kesehatan dan 61 batra.

Tabel III.66
Banyaknya Fasilitas Kesehatan Masyarakat Menurut Desa di Kecamatan Pademawu 2017

Desa/Kelurahan	Rumah Sakit Umum	Rumah Sakit Bersalain	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Polindes	Poskesdes	Posyandu	Dokter	Bidan	Mantri Kesehatan	Batra
1. Baddurih	-	-	-	-	-	1	4	-	1	-	4
2. Pagagan	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	1
3. Majungan	-	-	-	-	1	-	4	-	1	-	2
4. Padelagan	-	-	-	1	-	-	5	-	1	1	7
5. Tanjung	-	-	-	-	1	1	8	-	2	2	9
6. Pademawu Timur	-	-	-	1	2	-	9	-	3	2	12

7. Jarin	-	-	-	-	1	1	6	-	2	1	6
8. Prekbun	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2
9. Sopa'ah	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1
10. Buddih	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3
11. Durbuk	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	4
12. Sumedangan	-	-	-	-	1	-	5	-	-	2	10
13. Pademawu Barat	-	-	-	-	1	-	7	-	1	-	-
14. Bunder	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-
15. Dasok	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-
16. Murtajih	-	-	1	-	1	-	8	1	1	-	-
17. Lemper	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
18. Barurambat Timur	-	-	-	1	1	-	6	-	1	-	-
19. Lawangan Daya	1	1	-	-	1	-	8	-	1	-	-
20. Buddagan	1	-	-	-	1	1	6	-	1	-	-
21. Tambung	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
22. Sentol	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-
Jumlah	2	1	2	4	13	13	99	2	20	10	61

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

Selanjutnya untuk tenaga kesehatan juga telah tersedia sebagai subyek yang melaksanakan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di Kecamatan Pademawu pada tahun 2017 telah terdapat 3 dokter umum yang terletak di Sopa'ah 2 orang dan Murtajih 1 orang. Keberadaan dokter gigi sebanyak 1 orang di Sopa'ah. Melihat banyaknya jumlah masyarakat dibanding dengan jumlah tenaga kesehatan dokter, maka secara kuantitas masih perlu adanya peningkatan agar pelayanan juga bias optimal.

Adapun tenaga kesehatan lainnya yaitu bidan sebanyak 15 orang yang tersebar di beberapa desa serta 9 tenaga perawat yang ada di beberapa desa saja. Beberapa desa lainnya tidak terdapat tenaga bidan maupun perawat tetapi kebutuhan akan pelayanan kesehatan beberapa dilakukan oleh praktek pribadi.

Tabel III.67
Banyaknya Tenaga Kesehatan Masyarakat Menurut Desa di Kecamatan Pademawu 2017

Desa/Kelurahan	Dokter Umum	Dokter Gigi	Bidan	Perawat
1. Baddurih	-	-	1	1
2. Pagagan	-	-	1	1
3. Majungan	-	-	1	1
4. Padelegan	-	-	1	1
5. Tanjung	-	-	2	1
6. Pademawu Timur	-	-	3	-
7. Jarin	-	-	2	1
8. Prekbun	-	-	1	1
9. Sopa'ah	2	1	-	-
10. Buddih	-	-	1	1
11. Durbuk	-	-	1	1
12. Sumedangan	-	-	1	-
13. Pademawu Barat	-	-	-	-
14. Bunder	-	-	-	-

15. Dasok	-	-	-	-
16. Murtajih	1	-	-	-
17. Lemper	-	-	-	-
18. Barurambat Timur	-	-	-	-
19. Lawangan Daya	-	-	-	-
20. Buddagan	-	-	-	-
21. Tambung	-	-	-	-
22. Sentol	-	-	-	-
Jumlah	3	1	15	9

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

Keagamaan

Penduduk di Kecamatan Pademawu memiliki karakteristik kultur islami sebagaimana kultur masyarakat Madura pada umumnya. Oleh sebab itu, maka keberadaan fasilitas ibadah yang ada seperti masjid dan mushola begitu banyak. Ada sebanyak 108 unit masjid dan 411 mushola yang tersebar di semua dusun.

Tabel III.68
Banyaknya Tempat Peribadatan Menurut Desa di Kecamatan Pademawu 2017

Desa/Kelurahan	Jenis Tempat Peribadatan				
	Masjid	Mushola	Gereja	Pura	Vihara
1. Baddurih	3	11			
2. Pagagan	4	9			
3. Majungan	5	23			
4. Padelegan	3	20			
5. Tanjung	7	30			
6. Pademawu Timur	9	28			
7. Jarin	5	23			
8. Prekbun	1	12			
9. Sopa'ah	1	29			
10. Buddih	1	7			
11. Durbuk	4	12			
12. Sumedangan	6	12			
13. Pademawu Barat	9	15			
14. Bunder	3	16			
15. Dasok	6	33			
16. Murtajih	9	28			
17. Lemper	3	4			
18. Barurambat Timur	9	18			
19. Lawangan Daya	7	14			
20. Buddagan	5	12			
21. Tambung	4	30			
22. Sentol	4	25			
Jumlah	108	411	0	0	0

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

Adanya fasilitas ibadah tersebut, mencerminkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari masyarakat di Kecamatan Pademawu sering melakukan aktivitas ibadah di masjid dan mushola. Kegiatan tersebut tentu saja dapat memupuk interaksi antar warga masyarakat sehingga terbentuk ikatan social yang kuat antara masyarakat yang satu dengan yang lain, antara penduduk yang satu dengan yang lain.

Olahraga

Olahraga merupakan salah satu bentuk aktivitas untuk menjaga kesehatan terutama untuk menjaga kesegaran dan kebugaran tubuh. Keberadaan fasilitas olahraga sangat penting bagi masyarakat terutama para pemuda. Bila dilatih sejak dini untuk berolahraga maka tidak hanya kesehatan tubuh saja, tetapi para pemuda juga dapat membentuk minat dan bakat mereka dalam bidang olahraga dan menghasilkan prestasi.

Terdapat 10 unit fasilitas lapangan sepakbola yang tersedia di Desa Baddurih, Pagagan, Durbuk, Bunder, Barurambat Timur, Buddagan dan Sentol. Selain fasilitas lapangan sepak bola juga terdapat 8 unit lapangan futsal, 35 unit lapangan volley, 3 unit lapangan basket, 4 unit lapangan bulutangkis, 1 unit lapangan tennis, 8 unit tennis meja dan 7 unit pencak silat. Dengan adanya berbagai macam fasilitas olahraga tersebut, tentunya Kecamatan Pademawu memiliki potensi untuk mengembangkan sumberdaya manusia yang sehat dan berprestasi.

Tabel III.69
Banyaknya Fasilitas Olah Raga Menurut Desa di Kecamatan Pademawu 2017

Desa/Kelurahan	Sepak Bola	Futsal	Volly	Basket	Bulu tangkis	Tennis Lapangan	Tennis Meja	Pencak Silat
1. Baddurih	2	-	1	-	-	-	1	-
2. Pagagan	2	-	-	-	-	-	-	-
3. Majungan	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Padelegan	-	-	1	-	-	-	-	-
5. Tanjung	-	-	4	-	-	-	-	-
6. Pademawu Timur	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Jarin	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Prekbun	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Sopa'ah	-	-	1	-	1	-	-	-
10. Buddih	-	-	-	-	-	-	-	-
11. Durbuk	1	-	1	-	-	-	-	-
12. Sumedangan	-	-	2	-	-	-	-	1
13. Pademawu Barat	-	1	1	-	1	-	5	2
14. Bunder	2	-	3	-	-	-	-	1
15. Dasok	-	-	2	-	-	-	1	-
16. Murtajih	-	1	6	-	1	-	-	1

17. Lemper	-	1	1	-	-	-	1	1
18. Barurambat Timur	1	-	4	-	-	-	-	-
19. Lawangan Daya	-	1	3	2	-	1	-	-
20. Buddagan	1	2	2	1	-	-	-	-
21. Tambung	-	-	2	-	-	-	-	-
22. Sentol	1	2	1	-	1	-	-	1
Jumlah	10	8	35	3	4	1	8	7

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

Ekonomi

Peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat memerlukan dukungan adanya sarana dan prasarana bagi terjadinya aktivitas ekonomi di masyarakat. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, masyarakat tidak hanya menjadi tempat jual beli tetapi juga penyerapan tenaga kerja. Misalnya saja pasar yang merupakan tempat terjadinya aktivitas jual beli warga masyarakat juga mampu menyerap banyak tenaga kerja di sector informal.

Pada tahun 2017, telah ada pasar sebanyak 10 unit yang terletak di desa Pagagan, Padelegan, Pademawu Timur, Prekbun, Pademawu Barat, Bunder, Murtajih, dan Tambung.

Tabel III.70
Banyaknya Sarana Perdagangan Menurut Desa dan Jenis Sarana di Kecamatan Pademawu 2017

Desa/Kelurahan	Pasar	Pertokoan	Toko/ Swalayan Toserba	Kios/ Pedagang Kaki Lima
1. Baddurih	-	32	-	-
2. Pagagan	1	16	-	17
3. Majungan	-	-	-	-
4. Padelegan	1	-	27	9
5. Tanjung	-	8	-	42
6. Pademawu Timur	2	-	1	200
7. Jarin	-	-	-	135
8. Prekbun	1	10	-	32
9. Sopa'ah	-	-	-	13
10. Buddih	-	-	-	-
11. Durbuk	-	21	-	-
12. Sumedangan	-	25	-	-
13. Pademawu Barat	1	55	-	19
14. Bunder	1	16	-	8
15. Dasok	-	30	-	-
16. Murtajih	2	79	-	70
17. Lemper	-	16	-	7
18. Barurambat Timur	-	36	4	17
19. Lawangan Daya	-	23	4	42

20. Buddagan	-	57	1	13
21. Tambung	1	19	-	20
22. Sentol	-	44	-	-
Jumlah	10	487	37	644

Sumber: Kecamatan Pademawu Dalam Angka 2018

Fasilitas lainnya selain pasar juga terdapat pertokoan sebanyak 487 unit yang tersebar di beberapa desa. Selain itu juga terdapat 37 unit toko/swalayan/toserba dengan persebaran paling banyak di Desa Padelegan yaitu sebanyak 27 unit. Sedangkan kios/pedagang kaki lima sebanyak 644 unit dengan persebaran terbanyak di Desa Pademawu Timur, dan Jarin.

BAB IV

ANALISIS KELAYAKAN PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN DI KABUPATEN PAMEKASAN

Dinamika penduduk di Kabupaten Pamekasan tidak dapat dihindari. Sebagai konsekuensi dari dinamika penduduk tersebut adalah adanya berbagai tuntutan yang terkait dengan kondisi kesejahteraan penduduk seperti ketersediaan lapangan kerja dan pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan berbagai kebutuhan pelayanan public lainnya.

Untuk pemenuhan tuntutan tersebut maka perlu adanya pemerataan pembangunan di berbagai desa agar pembangunan tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan. Penduduk di wilayah pedesaan juga harus ditingkatkan kesejahteraannya melalui penciptaan peluang kerja serja pelayanan public yang mudah diakses. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan adanya ipaya penataan desa yaitu perubahan status desa menjadi kelurahan.

Dengan adanya upaya tersebut diharapkan desa-desa yang telah berganti status dapat berkembang sehingga memiliki kemajuan yang dampaknya dari adanya kemajuan pembangunan tersebut juga dapat berimplikasi pada desa-desa disekitarnya. Untuk memetakan kelayakan sebuah desa menjadi kelurahan maka perlu adanya pertimbangan baik dari aspek yuridis maupun social. Dari aspek yuridis dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Prasyarat Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Dalam perubahan status desa menjadi kelurahan ada 5 tujuan utama ingin dicapai oleh pemerintah yaitu 1) mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa; b) mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa; c) mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d) meningkatkan kualitas tata kelola pemerintah desa dan; e) meningkatkan daya saing desa.

Berdasarkan tujuan tersebut maka perubahan status desa menjadi kelurahan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yaitu Desa dapat berubah status menjadi kelurahan

berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat Desa.

Adapun tata cara perubahan status desa menjadi kelurahan diatur sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kelurahan yang berubah status menjadi Desa, sarana dan prasarana menjadi milik Desa dan dikelola oleh Desa yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat Desa.
3. Pendanaan perubahan status kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
4. Pemerintah dapat memprakarsai pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional.
5. Pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa ditetapkan dalam Peraturan Daerah yaitu:
 - a. Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa yang telah mendapatkan persetujuan bersama Bupati/Walikota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diajukan kepada Gubernur.
 - b. Gubernur melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan/atau perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa berdasarkan urgensi, kepentingan nasional, kepentingan daerah, kepentingan masyarakat Desa, dan/atau peraturan perundang-undangan.
6. Mekanisme Persetujuan Gubernur terhadap Rancangan Peraturan Daerah
 - a. Gubernur menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari setelah menerima Rancangan Peraturan Daerah.

- b. Dalam hal Gubernur memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Peraturan Daerah paling lama 20 (dua puluh) hari.
 - c. Dalam hal Gubernur menolak memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah tersebut tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
 - d. Dalam hal Gubernur tidak memberikan persetujuan atau tidak memberikan penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dalam jangka waktu, Bupati/Walikota dapat mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah tersebut serta sekretaris daerah mengundangkannya dalam Lembaran Daerah.
 - e. Dalam hal Bupati/Walikota tidak menetapkan Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah tersebut dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan, dan perubahan status Desa menjadi kelurahan atau kelurahan menjadi Desa diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota disertai lampiran peta batas wilayah Desa.

Prasyarat perubahan status desa menjadi kelurahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 1 Tahun 2017 tentang Perubahan status desa menjadi kelurahan.

1. Perubahan status meliputi:
 - a. Desa menjadi Kelurahan; dan
 - b. Kelurahan menjadi Desa.
2. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan harus memenuhi syarat:
 - a. luas wilayah tidak berubah;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga untuk wilayah Jawa dan Bali serta

- paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga untuk di luar wilayah Jawa dan Bali;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan Kelurahan;
 - d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
 - e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;
 - f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
 - g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
 - h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
 - i. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.
3. Mekanisme perubahan status desa menjadi kelurahan:
- a. Perubahan status Desa menjadi Kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
 - b. Prakarsa dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.
 - c. Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
 - d. Musyawarah Desa dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dengan tujuan menyepakati perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
 - e. Hasil musyawarah Desa ditetapkan dengan berita acara musyawarah Desa dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
 - f. Hasil musyawarah Desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Wali Kota sebagai usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
 - g. Bupati/Wali Kota setelah menerima laporan Kepala Desa menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.

- h. Hasil kajian dan verifikasi menjadi masukan bagi Bupati/Wali Kota untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
 - i. Kajian dan verifikasi berlaku mutatis muntandis bagi perubahan status Desa menjadi Kelurahan.
4. Dalam hal Bupati/Wali Kota menyetujui usulan perubahan status Desa menjadi Kelurahan, Bupati/Wali Kota menyusun Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan. Rancangan Perda Kabupaten/Kota dibahas dan disetujui bersama antara Bupati/Wali Kota dengan DPRD Kabupaten/Kota. Apabila Rancangan Perda Kabupaten/Kota disetujui bersama oleh Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota menyampaikan Rancangan Perda Kabupaten/Kota kepada Gubernur untuk dievaluasi.

2. Kelayakan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

2.1. Cakupan Wilayah

Prasyarat perubahan status desa menjadi kelurahan adalah cakupan wilayah desa yang terdiri atas dusun atau sebutan lainnya. Di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga disebutkan bahwa di dalam desa atau kelurahan dibentuk RT dan RW. Setiap RT terdiri paling sedikit 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga dan setiap RW paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) RT.

Dari 3 kecamatan yang menjadi objek kajian dalam kajian ini memiliki cakupan wilayah dari tingkat dusun, RW dan RT. Kecamatan Pamekasan dan Pademawu terbagi kedalam dusun, RW dan RT, sementara Kecamatan Tlanakan terbagi hanya pada tingkat dusun dan hanya Desa Larangan Tokol yang memiliki 8 RT.

Cakupan wilayah desa-desa di Kecamatan Pamekasan jika dilihat dari landasan hukumnya, semua desa telah memenuhi persyaratan dimana di setiap RW paling sedikit memiliki 3 RT. Sementara di setiap desa telah memiliki minimal 10 RT disetiap RW.

Di Kecamatan Pademawu beberapa RW tidak memiliki RT misalnya saja Desa Baddurih, Pagagan, Majungan, Tanjung, dan Durbuk. Untuk Desa lainnya telah memiliki RT minimal 4 RT. Desa Pademawu Timur misalnya memiliki 9 dusun dan 16 RW yang terbagi kedalam 41 RT. Sementara Desa Murtajih memiliki 17 RT, Buddagan 11 RT dan Dasok 5 RT. Kondisi Desa Dasok meskipun memiliki 18 RW, namun hanya ada 5 RT saja. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua RW terbagi kedalam RT.

Sedangkan kondisi cakupan wilayah di Kecamatan Tlanakan semua desa hanya terbagi kedalam dusun. Masing-masing desa minimal memiliki 3 dusun seperti desa Dabuan, Branta Tinggi, Tlesa, Ceguk dan Toro'an. Sedangkan desa lainnya memiliki 4 dusun yaitu Panglegur dan lainnya lebih dari 5 dusun.

Tabel IV.1
Cakupan Wilayah Desa/Kelurahan

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Dusun/ Kampung/ Lingkungan	Rukun Warga	Rukun Tetangga
Pamekasan	1. Teja Barat	4	10	23
	2. Teja Timur	4	6	15
	3. Jalmak	3	5	14
	4. Laden	5	5	17
	5. Panempan	3	3	15
	6. Kangeran	12	12	36
	7. Patemon	3	3	15
	8. Barurambat Kota	8	8	25
	9. Parteker	4	4	17
	10. Jungcangcang	5	5	16
	11. Bettet	4	4	12
	12. Nylabu Laok	5	5	12
	13. Nylabu Daya	3	3	13
	14. Bugih	9	9	36
	15. Gladak Anyar	9	9	31
	16. Kolpajung	6	6	15
	17. Kowel	7	7	17
	18. Toronan	4	4	10
Tlanakan	1. Dabuan	3		-
	2. Terrak	5		-
	3. Mangngar	6		-
	4. Bandaran	8		-
	5. Kramat	6		-
	6. Ambat	8		-
	7. Tlanakan	5		-
	8. Branta Pesisir	7		-
	9. Branta Tinggi	3		-
	10. Tlesa	3		-
	11. Larangan Tokol	9		8

	12. Ceguk	3		-
	13. Panglegur	4		-
	14. Gugul	6		-
	15. Bukek	5		-
	16. Larangan Slampar	8		-
	17. Toro'an	3		-
Pademawu	1. Baddurih	4	-	-
	2. Pagagan	3	-	-
	3. Majungan	6	-	-
	4. Padelegan	6	6	12
	5. Tanjung	9	-	-
	6. Pademawu Timur	9	16	41
	7. Jarin	6	-	-
	8. Prekbun	2	2	5
	9. Sopa'ah	2	2	6
	10. Buddih	3	3	6
	11. Durbuk	4	-	-
	12. Sumedangan	5	5	19
	13. Pademawu Barat	7	8	37
	14. Bunder	4	4	11
	15. Dasok	5	18	5
	16. Murtajih	8	8	17
	17. Lemper	3	3	6
	18. Barurambat Timur	11	4	15
	19. Lawangan Daya	9	5	15
	20. Buddagan	7	5	11
	21. Tambung	4	5	8
	22. Sentol	4	4	4

2.2. Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Desa

Luas wilayah dan jumlah penduduk menjadi salah satu prasyarat dalam perubahan status desa menjadi kelurahan. Dari aspek luas wilayah, semua desa di Kecamatan Pamekasan, Tlanakan dan Pademawu tidak mengalami perubahan luasan. Namun bila dilihat dari sisi pertumbuhan penduduk, maka dari tahun ke tahun memang terjadi penambahan penduduk.

Jumlah penduduk di 3 Kecamatan di setiap desa memang bervariasi dan tidak tergantung pada luasan wilayah. Itulah mengapa tingkat kepadatan penduduk di masing-masing desa juga berbeda. Dilihat dari banyaknya penduduk di Kecamatan Pamekasan, desa dengan jumlah penduduk <5.000 jiwa meliputi Teja Barat, Teja Timur, Jalmak, Panempan, Patemon, Perteker, Nylabu Laok, Nylabu Daya, dan Toronan.

Wilayah dengan jumlah penduduk antara 5.000-10.000 jiwa di Kecamatan Pamekasan meliputi Desa Laden, Kangeran, Barurambat Kota, Juncancang,

Bettet, Gladak Anyar, Kolpajung dan Kowel. Sementara wilayah dengan jumlah penduduk >10.000 adalah Desa Bugih yaitu mencapai 13.967 jiwa.

Kecamatan Tlanakan kondisi persebaran penduduk disetiap desa tidak mencapai 8.000 jiwa. Sebagai gambaran, wilayah dengan jumlah penduduk <5.000 jiwa meliputi Desa Dabuan, Terrak, Mangngar, Kramat, Ambat, Tlanakan, Branta Tinggi, Tlesa, Ceguk, Panglegur, guggul, Bukek, Larangan Slampar dan Toro'an. Sementara wilayah dengan jumlah penduduk 5.000-8.000 jiwa meliputi Desa Bandaran, Branta Pesisir, dan Larangan Tokol.

Kondisi sebaran penduduk di Kecamatan Pademawu hampir sebagian besar <5.000 jiwa. Sedangkan wilayah yang memiliki jumlah penduduk antara 5.000-10.000 jiwa meliputi Desa Tanjung, Pademawu Timur, Pademawu Barat, Murtajih, Barurambat Timur dan Lawangan Daya.

Tabel IV.2
Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk di Desa

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
Pamekasan	1. Teja Barat	3.947	2.61	1.512,3
	2. Teja Timur	3.461	1.76	1.966,5
	3. Jalmak	2.791	1.96	1.453,6
	4. Laden	5.136	1.41	3.642,6
	5. Panempan	2.503	0.82	3.052,4
	6. Kangeran	5.203	1.70	3.060,6
	7. Patemon	3.923	0.47	8.346,8
	8. Barurambat Kota	7.001	0.90	7.778,9
	9. Parteker	3.716	0.33	11.260,6
	10. Jungcangcang	7.302	1.33	5.490,2
	11. Bettet	6.522	2.29	2.848
	12. Nylabu Laok	2.380	0.95	2.505,3
	13. Nylabu Daya	2.625	1.49	1.761,7
	14. Bugih	13.967	2.17	6.436,4
	15. Gladak Anyar	9.925	1.27	7.815
	16. Kolpajung	5.792	1.27	4.560
	17. Kowel	6.683	2.93	2.280,9
	18. Toronan	2.441	0.85	2.871,8
Tlanakan	1. Dabuan	1.909	1.55	1.231,61
	2. Terrak	3.681	4.74	776,58
	3. Mangngar	2.381	2.30	1.035,22
	4. Bandaran	6.274	1.89	3.319,58
	5. Kramat	4.148	1.96	2.116,33
	6. Ambat	4.951	3.75	1.320,27
	7. Tlanakan	3.758	2.92	1.286,99

	8. Branta Pesisir	6.024	0.19	31.705,26
	9. Branta Tinggi	2.201	1.30	1.693,08
	10. Tlesa	1.309	0.56	2.337,50
	11. Larangan Tokol	7.776	4.52	1.720,35
	12. Ceguk	2.384	2.17	1.098,62
	13. Panglegur	4.923	2.82	1.745,74
	14. Gugul	3.661	4.84	756,40
	15. Bukek	1.770	1.71	1.035,09
	16. Larangan Slampar	4.210	8.47	497,05
	17. Toro'an	2.300	2.41	954,36
Pademawu	1. Baddurih	1.904	2,99	636,8
	2. Pagagan	2.283	1,42	1.607,7
	3. Majungan	2.090	3,62	577,3
	4. Padelegan	3.256	9,07	359
	5. Tanjung	6.967	7,45	935,2
	6. Pademawu Timur	6.821	7,01	973
	7. Jarin	4.017	4,94	813,2
	8. Prekbun	1.093	1,04	1.051
	9. Sopa'ah	1.009	1,38	731,2
	10. Buddih	1.121	0,96	1.167,7
	11. Durbuk	2.710	2,72	996,3
	12. Sumedangan	3.195	2,33	1.371,2
	13. Pademawu Barat	6.270	4,56	1.375
	14. Bunder	2.758	4,03	684,4
	15. Dasok	3.822	3,05	1.253,1
	16. Murtajih	6.065	3,23	1.877,7
	17. Lemper	2.395	1,18	2.029,7
	18. Barurambat Timur	5.881	1,59	3.698,7
	19. Lawangan Daya	8.144	2,30	3.540,9
	20. Buddagan	4.606	1,97	2.338,1
	21. Tambung	2.586	2,11	1.225,6
	22. Sentol	3.731	2,95	1.264,7

2.3. Kondisi SDM di setiap Desa

Tujuan dari adanya rencana perubahan status desa menjadi kelurahan antara lain juga untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Perubahan status desa menjadi kelurahan diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan public di desa yang mengalami perubahan status menjadi kelurahan. Oleh sebab itu, keberadaan SDM pelaksana pelayanan public di setiap desa diperlukan dimana tidak hanya dari segi kuantitas tetapi juga kualitas.

Dari aspek kondisi sumber daya manusia di setiap desa memiliki kuantitas yang tidak sama. Beberapa jumlah sumber daya manusia di beberapa desa tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang membutuhkan pelayanan public,

sehingga rasio antara jumlah penduduk dengan jumlah sumber daya manusia yang bertugas memberikan pelayanan dalam hal ini aparatur desa tidak sama.

Rasio antara jumlah penduduk dan aparatur desa yang paling rendah di Kecamatan Pamekasan terdapat di wilayah Bugih yaitu sebesar 0.000214792 dan Gladak Anyar sebesar 0.000302267. kondisi tersebut dikarenakan kedua desa memiliki jumlah penduduk yang paling besar diantara desa lainnya, namun memiliki jumlah aparatur yang lebih sedikit. Bandingkan dengan desa-desa seperti Teja Timur, Jalmak, Laden, Panempan, Bettet, Nylabu Laok, Nylabu Daya dan Toronan. Desa-desa tersebut memiliki jumlah penduduk yang relative lebih sedikit, namun aparatur lebih banyak sehingga secara kuantitas memiliki potensi sumber daya manusia pelaksana pelayanan public yang lebih besar.

Kondisi berbeda terlihat di Kecamatan Tlanakan dimana jumlah aparatur desa di kecamatan tersebut bisa dikatakan relative banyak dibandingkan dengan Kecamatan Pamekasan. Di setiap desa minimal ada 9 aparatur desa yang bertugas dalam penyelenggaraan urusan pelayanan public. Desa Tlesa misalnya memiliki rasio paling tinggi yaitu 0.006875477 karena jumlah penduduknya paling sedikit dibanding desa lainnya meskipun jumlah aparatur hanya 9 orang. Desa-desa lainnya yang berpenduduk sedikit juga memiliki rasio yang tinggi seperti Desa Ceguk 0.004614094, Panglegur 0.003250051, Bukek 0.006214689 dan beberapa desa lainnya.

Rasio jumlah penduduk desa dengan jumlah aparatur di Kecamatan Pademawu juga relative tinggi dibanding Kecamatan Pamekasan. Hal ini dikarenakan persebaran penduduk di setiap desa lebih sedikit sementara jumlah aparatur desa lebih banyak. Beberapa desa dengan jumlah penduduk sedikit, memiliki rasio yang tinggi antara lain Desa Majungan, Prakbun, Sopa'ah dan Buddih. Sementara desa-desa yang memiliki jumlah penduduk relative tinggi yaitu >5.000 jiwa seperti Tanjung, Pademawu Timur, Pademawu Barat, Murtajih, Barurambat Timur, dan Lawangan Daya memiliki jumlah rasio yang lebih rendah, meskipun beberapa desa lainnya yang berpenduduk sedikit juga rasionya kecil namun wilayah tersebut juga memiliki jumlah aparatur yang sedikit.

Artinya, ada ketidakmerataan jika dilihat dari perbandingan jumlah penduduk dan jumlah aparatur, sehingga wilayah-wilayah dengan jumlah

penduduk yang tinggi memiliki rasio lebih rendah karena jumlah aparatur yang lebih kecil.

Tabel IV.3
Jumlah SDM Pemerintah di Desa/Kelurahan

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Kepala Dusun	Modin	Kepala Urusan	Anggota BPD	jumlah	rasio
	1. Teja Barat	3947	4	0	6	0	10	0.00253357
	2. Teja Timur	3461	4	0	6	0	10	0.002889338
	3. Jalmak	2791	3	0	6	0	9	0.003224651
	4. Laden	5136	5	0	6	0	11	0.002141745
	5. Panempan	2503	3	0	6	0	9	0.003595685
	6. Kangenan	5203	0	0	3	0	3	0.00057659
	7. Patemon	3923	0	0	3	0	3	0.000764721
	8. Barurambat Kota	7001	0	0	3	0	3	0.00042851
	9. Parteker	3716	0	0	3	0	3	0.00080732
	10. Jungcangcang	7302	0	0	3	0	3	0.000410846
	11. Bettet	6522	5	0	6	0	11	0.001686599
	12. Nylabu Laok	2380	5	0	6	0	11	0.004621849
	13. Nylabu Daya	2625	3	0	6	0	9	0.003428571
	14. Bugih	13967	0	0	3	0	3	0.000214792
	15. Gladak Anyar	9925	0	0	3	0	3	0.000302267
	16. Kolpajung	5792	0	0	3	0	3	0.000517956
	17. Kowel	6683	0	0	3	0	3	0.0004489
	18. Toronan	2441	4	0	6	0	10	0.004096682
	1. Dabuan	1909	3	1	0	7	11	0.005762179
	2. Terrak	3681	5	1	0	9	15	0.00407498
	3. Mangngar	2381	6	1	0	7	14	0.005879882
	4. Bandaran	6274	8	1	0	11	20	0.003187759
	5. Kramat	4148	6	1	0	9	16	0.003857281
	6. Ambat	4951	8	1	0	11	20	0.004039588
	7. Tlanakan	3758	5	1	0	7	13	0.003459287
	8. Branta Pesisir	6024	7	1	0	11	19	0.00315405
	9. Branta Tinggi	2201	3	1	0	7	11	0.004997728
	10. Tlesa	1309	3	1	0	5	9	0.006875477
	11. Larangan Tokol	7776	9	1	0	11	21	0.002700617
	12. Ceguk	2384	3	1	0	7	11	0.004614094
	13. Panglegur	4923	4	1	0	11	16	0.003250051
	14. Gugul	3661	6	1	0	9	16	0.004370391
	15. Bukek	1770	5	1	0	5	11	0.006214689
	16. Larangan Slampar	4210	8	1	0	11	20	0.004750594
	17. Toro'an	2300	3	1	0	7	11	0.004782609

1. Baddurih	1904	4	1	5	7	17	0.008928571
2. Pagagan	2283	3	1	5	7	16	0.007008322
3. Majungan	2090	6	6	4	7	23	0.011004785
4. Padelegan	3256	6	2	5	9	22	0.006756757
5. Tanjung	6967	9	2	6	9	26	0.003731879
6. Pademawu Timur	6821	9	1	5	9	24	0.003518546
7. Jarin	4017	6	1	5	8	20	0.00497884
8. Prekbun	1093	2	1	5	5	13	0.01189387
9. Sopa'ah	1009	2	1	4	5	12	0.011892963
10. Buddih	1121	3	1	5	5	14	0.012488849
11. Durbuk	2710	4	1	5	7	17	0.006273063
12. Sumedangan	3195	5	1	5	9	20	0.006259781
13. Pademawu Barat	6270	6	2	4	9	21	0.003349282
14. Bunder	2758	4	2	5	7	18	0.006526468
15. Dasok	3822	5	1	5	9	20	0.005232862
16. Murtajih	6065	8	1	5	9	23	0.003792251
17. Lemper	2395	3	1	4	6	14	0.005845511
18. Barurambat Timur	5881	0	2	5	0	7	0.001190274
19. Lawangan Daya	8144	0	2	5	0	7	0.000859528
20. Buddagan	4606	7	1	5	9	22	0.004776379
21. Tambung	2586	4	1	5	6	16	0.006187162
22. Sentol	3731	4	1	5	9	19	0.005092469

2.4. Sarana dan Prasarana

Prasyarat perubahan status desa menjadi kecamatan yaitu adanya pertumbuhan sarana dan prasarana. Bila dilihat dari jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang ada di Kecamatan Pamekasan, rasio tertinggi antara jumlah penduduk dengan jumlah keberadaan sarana dan prasarana adalah Desa Barurambat Kota mencapai 0.007570347, Toronan 0.006964359, dan Nylabu Laok 0.006302521. tingginya rasio sarana dan prasarana di ketiga desa tersebut karena jumlah penduduk yang relative sedikit dengan jumlah sarana dan prasara kesehatan yang ada, kecuali Desa Barurambat kota dimana jumlah sarana dan prasarana kesehatan mencapai 53 unit, meskipun jumlah penduduk di wilayah tersebut juga relative besar yaitu mencapau 7.001.

Sedangkan beberapa desa memiliki rasio sarana dan prasarana kesehatan yang kecil karena jumlah sarana dan prasarana yang ada relative lebih sedikit seperti Bettet yaitu 0.001993254, Kangenan 0.002114165, Panempun

0.002397123, Jalmak 0.002866356, Laden 0.002920561 dan Juncancang sebesar 0.002875924.

Di Kecamatan Tlanakan rasio sarana dan prasarana kesehatan paling tinggi terdapat di beberapa desa misalnya saja Tlesa yaitu 0.002291826, Branta Tinggi 0.002271695, Mangngar 0.002099958 dan dabuan sebesar 0.002095338. Jika dilihat dari jumlah penduduk, beberapa desa dengan rasio sarana dan prasarana kesehatan yang tinggi tersebut memang memiliki jumlah penduduk yang relative kecil. Jika dibandingkan dengan beberapa desa yang rasionya kecil seperti Kramat, Branta Pesisir, Panglegur, Larangan Tokol, Bandaran dan beberapa desa lainnya.

Kondisi rasio sarana dan prasarana kesehatan di Kecamatan Pademawu juga sama dimana desa-desa dengan jumlah penduduk yang relative besar memiliki rasio yang lebih kecil misalnya saja Desa Tanjung sebesar 0.00460688, Pademawu Timur 0.004251576, Pademawu Barat 0.001435407, Murtajih 0.001978566, Lawangan Daya 0.001473477 dimana desa-desa tersebut memiliki jumlah penduduk >5.000 jiwa.

Sedangkan beberapa desa yang memiliki jumlah penduduk terkecil memiliki rasio yang tinggi yaitu Baddurih sebesar 0.005252101 dengan jumlah penduduk 1.904 jiwa dan Desa Sumedangan 0.005633803 dengan jumlah penduduk 3.195. Namun beberapa desa juga ada yang memiliki rasio kecil dikarenakan selain jumlah penduduknya relative kecil, jumlah sarana dan prasarana kesehatan yang tersedia juga terbatas seperti Desa Dasok memiliki jumlah penduduk 3.822 dengan sarana dan prasarana kesehatan sebanyak 6 unit saja sehingga rasionya 0.001569859. Desa Buddagan, Tambung dan Sentol juga memiliki kondisi yang sama.

Tabel IV.4
Sarana Fasilitas Kesehatan di Desa/Kelurahan

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Fasilitas Kesehatan	rasio
Pamekasan	1. Teja Barat	3947	12	0.003040284
	2. Teja Timur	3461	17	0.004911875
	3. Jalmak	2791	8	0.002866356
	4. Laden	5136	15	0.002920561

	5.	Panempan	2503	6	0.002397123
	6.	Kangenan	5203	11	0.002114165
	7.	Patemon	3923	14	0.003568697
	8.	Barurambat Kota	7001	53	0.007570347
	9.	Parteker	3716	14	0.003767492
	10.	Jungcangcang	7302	21	0.002875924
	11.	Bettet	6522	13	0.001993254
	12.	Nylabu Laok	2380	15	0.006302521
	13.	Nylabu Daya	2625	13	0.004952381
	14.	Bugih	13967	45	0.00322188
	15.	Gladak Anyar	9925	38	0.003828715
	16.	Kolpajung	5792	20	0.003453039
	17.	Kowel	6683	21	0.003142301
	18.	Toronan	2441	17	0.006964359
Tlanakan	1.	Dabuan	1909	4	0.002095338
	2.	Terrak	3681	4	0.001086661
	3.	Mangngar	2381	5	0.002099958
	4.	Bandaran	6274	8	0.001275104
	5.	Kramat	4148	3	0.00072324
	6.	Ambat	4951	9	0.001817815
	7.	Tlanakan	3758	7	0.001862693
	8.	Branta Pesisir	6024	5	0.000830013
	9.	Branta Tinggi	2201	5	0.002271695
	10.	Tlesa	1309	3	0.002291826
	11.	Larangan Tokol	7776	12	0.00154321
	12.	Ceguk	2384	4	0.001677852
	13.	Panglegur	4923	9	0.001828154
	14.	Gugul	3661	6	0.001638896
	15.	Bukek	1770	3	0.001694915
	16.	Larangan Slampar	4210	7	0.001662708
	17.	Toro'an	2300	3	0.001304348
Pademawu	1.	Baddurih	1904	10	0.005252101
	2.	Pagagan	2283	6	0.002628121
	3.	Majungan	2090	8	0.003827751
	4.	Padelegan	3256	15	0.00460688
	5.	Tanjung	6967	23	0.003301277
	6.	Pademawu Timur	6821	29	0.004251576
	7.	Jarin	4017	17	0.004232014
	8.	Prekbun	1093	5	0.004574565
	9.	Sopa'ah	1009	4	0.003964321
	10.	Buddih	1121	8	0.007136485
	11.	Durbuk	2710	9	0.003321033
	12.	Sumedangan	3195	18	0.005633803

13.	Pademawu Barat	6270	9	0.001435407
14.	Bunder	2758	6	0.002175489
15.	Dasok	3822	6	0.001569859
16.	Murtajih	6065	12	0.001978566
17.	Lemper	2395	3	0.00125261
18.	Barurambat Timur	5881	9	0.001530352
19.	Lawangan Daya	8144	12	0.001473477
20.	Buddagan	4606	10	0.002171081
21.	Tambung	2586	3	0.001160093
22.	Sentol	3731	5	0.001340123

Selain sarana dan prasarana kesehatan, sarana tenaga medis sebagai pelaksana pelayanan juga menjadi perhatian. Beberapa desa memiliki rasio sarana tenaga medis yang tinggi. Di Kecamatan Pamekasan misalnya saja Desa Barurambat Kota memiliki rasio tertinggi mencapai 0.010141408 dengan jumlah penduduk yang besar yaitu 7.001 jiwa, namun jumlah sarana tenaga medis mencapai 71 orang. Kondisi tersebut sangat bertolak belakang dengan Desa Bugih yang memiliki jumlah penduduk 13.967 jiwa, namun sarana tenaga medis hanya 33 orang sehingga rasionya sebesar 0.002362712.

Beberapa wilayah juga memiliki rasio sarana tenaga medis yang kecil diantaranya Desa Jalmak dimana jumlah penduduknya sebesar 2.791 jiwa, namun jumlah sarana tenaga medis yang tersedia hanya 4 orang sehingga rasionya 0.001433178. kemudian Panempen juga sama, meskipun jumlah penduduknya hanya 2.503 jiwa namun sarana tenaga medis yang tersedia hanya 2 orang saja, sehingga rasionya sangat kecil dibanding yang lain yaitu 0.000799041. Desa Bettet juga memiliki rasio yang kecil dibanding desa-desa lainnya yaitu 0.00107329 karena jumlah penduduknya mencapai 6.522 jiwa namun jumlah sarana tenaga medis hanya 7 orang. Beberapa desa lainnya juga memiliki kondisi yang sama dengan jumlah penduduk >5.000 jiwa namun jumlah sarana tenaga medis lebih sedikit seperti Laden, Kangenan, Juncancang, Gladak Anyar, Kolpajung dan Kowel.

Di Kecamatan Tlanakan beberapa desa memiliki rasio sarana tenaga medis yang relative lebih tinggi dibanding desa lainnya yaitu Dabuan, Manggar, Tlanakan, Tlesa, Bukek dan Toro'an. Desa-desa tersebut merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang relative kecil yaitu <4.000 jiwa. Kondisi

sebaliknya yaitu pada desa-desa yang memiliki jumlah penduduk >4.000 jiwa memiliki rasio sarana tenaga medis yang lebih kecil karena jumlah tenaga medis yang ada lebih kecil antara lain Bandaran memiliki jumlah penduduk 6.274 jiwa dengan 6 tenaga medis, sehingga rasionya 0.000956328. kemudian Branta Pesisir, Karamat, Ambat, Branta Tinggi, Larangan Tokol, Panglegur dan Larangan Slampar.

Beberapa wilayah di Kecamatan Pademawu yang memiliki jumlah penduduk sedikit memiliki rasio sarana tenaga medis yang tinggi kecuali Desa Tanjung, Pademawu Timur dan Jarin karena meskipun jumlah penduduknya relative banyak, namun jumlah tenaga medis juga banyak. Sedangkan di Desa seperti Buddagan, Barurambat Timur, Murtajih, Lawangan Daya, Dasok dan Sentol meskipun memiliki jumlah penduduk yang banyak tetapi memiliki jumlah tenaga medis yang sedikit, sehingga rasio sarana tenaga medis di desa-desa tersebut relative lebih kecil dibanding desa lainnya.

Tabel IV.5
Sarana Tenaga Medis

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Tenaga Kesehatan	rasio
Pamekasan	1. Teja Barat	3947	6	0.001520142
	2. Teja Timur	3461	10	0.002889338
	3. Jalmak	2791	4	0.001433178
	4. Laden	5136	13	0.002531153
	5. Panempan	2503	2	0.000799041
	6. Kangeran	5203	9	0.001729771
	7. Patemon	3923	14	0.003568697
	8. Barurambat Kota	7001	71	0.010141408
	9. Parteker	3716	9	0.002421959
	10. Jungcangcang	7302	16	0.00219118
	11. Bettet	6522	7	0.00107329
	12. Nylabu Laok	2380	8	0.003361345
	13. Nylabu Daya	2625	4	0.00152381
	14. Bugih	13967	33	0.002362712
	15. Gladak Anyar	9925	22	0.002216625
	16. Kolpajung	5792	8	0.001381215
	17. Kowel	6683	9	0.001346701
	18. Toronan	2441	10	0.004096682
Tlanakan	1. Dabuan	1909	2	0.001047669

	2.	Terrak	3681	1	0.000271665
	3.	Manggar	2381	4	0.001679966
	4.	Bandaran	6274	6	0.000956328
	5.	Kramat	4148	4	0.00096432
	6.	Ambat	4951	3	0.000605938
	7.	Tlanakan	3758	5	0.001330495
	8.	Branta Pesisir	6024	2	0.000332005
	9.	Branta Tinggi	2201	1	0.000454339
	10.	Tlesa	1309	2	0.001527884
	11.	Larangan Tokol	7776	3	0.000385802
	12.	Ceguk	2384	2	0.000838926
	13.	Panglegur	4923	2	0.000406256
	14.	Gugul	3661	2	0.000546299
	15.	Bukek	1770	2	0.001129944
	16.	Larangan Slampar	4210	4	0.000950119
	17.	Toro'an	2300	4	0.00173913
Pademawu	1.	Baddurih	1904	10	0.005252101
	2.	Pagagan	2283	6	0.002628121
	3.	Majungan	2090	8	0.003827751
	4.	Padelegan	3256	15	0.00460688
	5.	Tanjung	6967	23	0.003301277
	6.	Pademawu Timur	6821	29	0.004251576
	7.	Jarin	4017	17	0.004232014
	8.	Prekbun	1093	5	0.004574565
	9.	Sopa'ah	1009	4	0.003964321
	10.	Buddih	1121	8	0.007136485
	11.	Durbuk	2710	9	0.003321033
	12.	Sumedangan	3195	18	0.005633803
	13.	Pademawu Barat	6270	9	0.001435407
	14.	Bunder	2758	6	0.002175489
	15.	Dasok	3822	6	0.001569859
	16.	Murtajih	6065	12	0.001978566
	17.	Lemper	2395	3	0.00125261
	18.	Barurambat Timur	5881	9	0.001530352
	19.	Lawangan Daya	8144	12	0.001473477
	20.	Buddagan	4606	10	0.002171081
	21.	Tambung	2586	3	0.001160093
	22.	Sentol	3731	5	0.001340123

Sarana ibadah juga memiliki peranan penting di dalam masyarakat. Bagi masyarakat Pamekasan yang mayoritas merupakan pemeluk agama islam,

keberadaan masjid dan mushola sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Tempat ibadah tersebut berfungsi sebagai tempat bagi para pemeluk agama islam di Kabupaten Pamekasan untuk menjalankan ritual ibadah sehari-hari selain disisi lain memiliki nilai-nilai social.

Adapun rasio ketersediaan sarana ibadah di Kecamatan Pamekasan paling tinggi di Desa Kowel yaitu 0.007332037. Selanjutnya rasio sarana ibadah di Desa Toronon sebesar 0.006554691 dan Desa Nylabu Daya sebesar 0.00647619. Sedangkan beberapa desa memiliki rasio sarana ibadah yang lebih kecil dibanding lainnya karena jumlah sarana ibadah wilayah tersebut juga relative sedikit dibanding dengan jumlah penduduknya antara lain Desa Jalmak, Laden, Patemon, dan terkecil adalah Bettet dimana rasionya hanya 0.001533272 karena banyaknya jumlah penduduk mencapai 6.522, sedangkan sarana ibadah yang tersedia hanya 10 unit.

Di Kecamatan Tlanakan beberapa desa memiliki rasio sarana ibadah yang tinggi seperti Desa Bukek, Larangan Slampar, Branta Tinggi, Mangngar dan Dabuan. Sedangkan desa lainnya memiliki rasio yang rendah karena jumlah penduduk yang relative banyak seperti Bandaran, Branta Pesisir, Larangan tokol, Ambat, Panglegur dan Kramat.

Di Kecamatan Pademawu, desa-desa dengan jumlah penduduk kecil memiliki rasio yang lebih tinggi dibanding desa lainnya karena jumlah sarana ibadah yang ada lebih besar dibanding desa lainnya. Misalnya saja desa Sopa'ah memiliki rasio sebesar 0.029732408 dimana jumlah penduduknya hanya 1.009 jiwa sedangkan jumlah sarana ibadah mencapai 30 unit. Selanjutnya Desa Prekbun memiliki rasio 0.01189387 dengan jumlah penduduk sebesar 1.093 dengan jumlah sarana ibadah sebanyak 13 unit. Desa Majungan memiliki rasio yang juga relative besar yaitu 0.013397129 dengan jumlah penduduk 2.090 dan jumlah sarana ibadah sebanyak 28 unit. Kemudian Desa Dasok dan Desa Tambung juga memiliki kondisi yang sama. Sementara itu, beberapa desa dengan jumlah penduduk >5.000 memiliki rasio sarana ibadah lebih kecil yaitu Desa Tanjung, Pademawu Timur, Pademawu Barat, Murtajih, Barurambat Timur dan Lawangan Daya.

Tabel IV.6
Sarana Ibadah di Desa/Kelurahan

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Masjid dan Mushola	rasio
Pamekasan	1. Teja Barat	3947	17	0.004307069
	2. Teja Timur	3461	20	0.005778677
	3. Jalmak	2791	9	0.003224651
	4. Laden	5136	15	0.002920561
	5. Panempan	2503	13	0.005193767
	6. Kangeran	5203	28	0.005381511
	7. Patemon	3923	11	0.002803977
	8. Barurambat Kota	7001	40	0.00571347
	9. Parteker	3716	22	0.005920344
	10. Jungcangcang	7302	32	0.004382361
	11. Bettet	6522	10	0.001533272
	12. Nylabu Laok	2380	10	0.004201681
	13. Nylabu Daya	2625	17	0.00647619
	14. Bugih	13967	58	0.004152646
	15. Gladak Anyar	9925	43	0.004332494
	16. Kolpajung	5792	32	0.005524862
	17. Kowel	6683	49	0.007332037
	18. Toronan	2441	16	0.006554691
Tlanakan	1. Dabuan	1909	26	0.013619696
	2. Terrak	3681	35	0.009508286
	3. Mangngar	2381	33	0.013859723
	4. Bandaran	6274	38	0.006056742
	5. Kramat	4148	20	0.004821601
	6. Ambat	4951	48	0.009695011
	7. Tlanakan	3758	24	0.006386376
	8. Branta Pesisir	6024	14	0.002324037
	9. Branta Tinggi	2201	24	0.010904134
	10. Tlesa	1309	5	0.00381971
	11. Larangan Tokol	7776	57	0.007330247
	12. Ceguk	2384	15	0.006291946
	13. Panglegur	4923	36	0.007312614
	14. Gugul	3661	24	0.006555586
	15. Bukek	1770	26	0.014689266
	16. Larangan Slampar	4210	44	0.010451306
	17. Toro'an	2300	16	0.006956522
Pademawu	1. Baddurih	1904	14	0.007352941
	2. Pagagan	2283	13	0.005694262
	3. Majungan	2090	28	0.013397129
	4. Padelegan	3256	23	0.007063882

5.	Tanjung	6967	37	0.005310751
6.	Pademawu Timur	6821	37	0.005424425
7.	Jarin	4017	28	0.006970376
8.	Prekbun	1093	13	0.01189387
9.	Sopa'ah	1009	30	0.029732408
10.	Buddih	1121	8	0.007136485
11.	Durbuk	2710	16	0.005904059
12.	Sumedangan	3195	18	0.005633803
13.	Pademawu Barat	6270	24	0.003827751
14.	Bunder	2758	19	0.00688905
15.	Dasok	3822	39	0.010204082
16.	Murtajih	6065	37	0.006100577
17.	Lemper	2395	7	0.002922756
18.	Barurambat Timur	5881	27	0.004591056
19.	Lawangan Daya	8144	21	0.002578585
20.	Buddagan	4606	17	0.003690838
21.	Tambung	2586	34	0.013147718
22.	Sentol	3731	29	0.007772715

Keberadaan fasilitas olahraga didesa-desa berbeda. Ada desa yang memiliki banyak fasilitas olahraga yang bervariasi, namun ada juga desa yang hanya memiliki 1 saja sarana atau fasilitas olahraga bahkan beberapa desa tidak memiliki. Adapun Desa di Kecamatan Pamekasan yang memiliki rasio fasilitas kesehatan yang tinggi yaitu Desa Patemon dan Desa Kowel. Di dua desa tersebut memiliki lebih banyak fasilitas olahraga meskipun jumlah penduduknya lebih sedikit.

Sedangkan desa yang memiliki jumlah penduduk >5.000 jiwa memiliki jumlah fasilitas olahraga yang lebih sedikit sehingga rasionya lebih kecil dibanding desa lainnya. Misalnya saja Laden memiliki rasio 0.000584112, Kangeran 0.000960984, Juncangcang 0.00684744, Bettet 0.000153327, Bugih 0.000501181, Gladak Anyar 0.000503778, dan Kolpajung 0.000517956.

Di Kecamatan Tlanakan, masih banyak desa yang belum memiliki fasilitas olahraga meskipun jumlah penduduknya relative banyak. Seperti halnya Desa Bandaran, Kramat, Ambat, Branta Pesisir, Panglegur dan Larangan Slampar tidak memiliki fasilitas olahraga meskipun memiliki jumlah penduduk yang relative lebih banyak dibanding yang lain.

Di Kecamatan Pademawu memiliki kondisi yang berbeda dimana beberapa desa dengan jumlah penduduk yang relative lebih sedikit tidak memiliki fasilitas olahraga seperti Manjungan, Prekbun, dan Budih. Sedangkan Pademawu Timur dan Jarin tidak memiliki fasilitas olahraga meskipun jumlah penduduknya relative banyak. Sedangkan beberapa desa lainnya yang memiliki rasio tinggi adalah Baddurih dan Bunder karena meskipun jumlah penduduknya relative rendah namun memiliki fasilitas olahraga relative banyak. Sedangkan sebagian desa lainnya memiliki rasio relative lebih kecil meskipun jumlah penduduknya besar antara lain Tanjung, Pademawu Barat, Murtajih, Barurambat Timur, Lawangan Daya dan Buddagan.

Tabel IV.7
Jumlah Fasilitas Olahraga

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Fasilitas Olahraga	rasio
Pamekasan	1. Teja Barat	3947	3	0.000760071
	2. Teja Timur	3461	1	0.000288934
	3. Jalmak	2791	1	0.000358295
	4. Laden	5136	3	0.000584112
	5. Panempan	2503	2	0.000799041
	6. Kangenan	5203	5	0.000960984
	7. Patemon	3923	4	0.001019628
	8. Barurambat Kota	7001	7	0.000999857
	9. Parteker	3716	2	0.000538213
	10. Jungcangcang	7302	5	0.000684744
	11. Bettet	6522	1	0.000153327
	12. Nylabu Laok	2380	2	0.000840336
	13. Nylabu Daya	2625	2	0.000761905
	14. Bugih	13967	7	0.000501181
	15. Gladak Anyar	9925	5	0.000503778
	16. Kolpajung	5792	3	0.000517956
	17. Kowel	6683	8	0.001197067
	18. Toronan	2441	1	0.000409668
Tlanakan	1. Dabuan	1909	0	0
	2. Terrak	3681	1	0.000271665
	3. Mangngar	2381	1	0.000419992
	4. Bandaran	6274	4	0.000637552
	5. Kramat	4148	0	0
	6. Ambat	4951	0	0

	7.	Tlanakan	3758	0	0
	8.	Branta Pesisir	6024	0	0
	9.	Branta Tinggi	2201	0	0
	10.	Tlesa	1309	0	0
	11.	Larangan Tokol	7776	1	0.000128601
	12.	Ceguk	2384	0	0
	13.	Panglegur	4923	0	0
	14.	Gugul	3661	1	0.000273149
	15.	Bukek	1770	0	0
	16.	Larangan Slampar	4210	0	0
	17.	Toro'an	2300	0	0
Pademawu	1.	Baddurih	1904	4	0.00210084
	2.	Pagagan	2283	2	0.00087604
	3.	Majungan	2090	0	0
	4.	Padelegan	3256	1	0.000307125
	5.	Tanjung	6967	4	0.000574135
	6.	Pademawu Timur	6821	0	0
	7.	Jarin	4017	0	0
	8.	Prekbun	1093	0	0
	9.	Sopa'ah	1009	2	0.001982161
	10.	Buddih	1121	0	0
	11.	Durbuk	2710	2	0.000738007
	12.	Sumedangan	3195	3	0.000938967
	13.	Pademawu Barat	6270	10	0.001594896
	14.	Bunder	2758	6	0.002175489
	15.	Dasok	3822	3	0.000784929
	16.	Murtajih	6065	9	0.001483924
	17.	Lemper	2395	4	0.001670146
	18.	Barurambat Timur	5881	5	0.000850196
	19.	Lawangan Daya	8144	7	0.000859528
	20.	Buddagan	4606	6	0.001302649
	21.	Tambung	2586	2	0.000773395
	22.	Sentol	3731	6	0.001608148

Ketersediaan sarana pasar di masing-masing desa masih masih jarang, bahkan banyak desa yang belum memiliki pasar sebagai sarana perekonomian. Di Kecamatan Pamekasan, beberapa desa telah memiliki fasilitas pasar yaitu Kowel dan Gladak Anyar masing-masing 2 unit. Sedangkan Desa Teja Barat, Laden, Panempan, Barurambat Kota, Parteker, Juncangcang, Bugih dan Kolpajung masing-masing memiliki 1 unit pasar, sehingga rasio sarana pasar memang rendah. Bahkan beberapa desa lainnya di Kecamatan Pamekasan tidak memiliki

pasar sehingga rasionya bernilai 0. Untuk memenuhi kebutuhan akan sarana pasar biasanya penduduk akan mengakses pasar terdekat yang berada di desa lain.

Di Kecamatan Tlanakan pasar hanya terletak di Desa Dabuan, Bandaran, Branta Pesisir, dan Ceguk masing-masing 1 unit sehingga rasionya juga rendah. Namun dibandingkan desa lainnya yang tidak memiliki pasar, desa-desa tersebut memiliki rasio yang lebih tinggi.

Kondisi yang sama juga terjadi di Kecamatan Pademawu dimana tidak semua desa memiliki fasilitas pasar. Bahkan desa dengan jumlah penduduk terbesarpun belum memiliki pasar seperti Lawangan Daya. Sedangkan desa lainnya yang memiliki jumlah penduduk >5.000 jiwa yang memiliki pasar antara lain Pademawu Timur dengan rasio 0.000293212 dengan 2 unit pasar, Pademawu Barat 0.00015949 dengan 1 unit pasar, Murtajih 0,00329761 dengan 2 unit pasar, dan Tambung 0.000386698 dengan 1 unit pasar. Sedangkan desa lainnya belum memiliki pasar.

Tabel IV.8
Jumlah Pasar di Desa/Kelurahan

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Pasar	rasio
Pamekasan	1. Teja Barat	3947	1	0.000253357
	2. Teja Timur	3461	0	0
	3. Jalmak	2791	0	0
	4. Laden	5136	1	0.000194704
	5. Panempan	2503	1	0.000399521
	6. Kangeran	5203	0	0
	7. Patemon	3923	0	0
	8. Barurambat Kota	7001	1	0.000142837
	9. Parteker	3716	1	0.000269107
	10. Jungcangcang	7302	1	0.000136949
	11. Bettet	6522	0	0
	12. Nylabu Laok	2380	0	0
	13. Nylabu Daya	2625	0	0
	14. Bugih	13967	1	7.15973E-05
	15. Gladak Anyar	9925	2	0.000201511
	16. Kolpajung	5792	1	0.000172652
	17. Kowel	6683	2	0.000299267
	18. Toronan	2441	0	0
Tlanakan	1. Dabuan	1909	1	0.000523834

	2.	Terrak	3681	0	0
	3.	Mangngar	2381	0	0
	4.	Bandaran	6274	1	0.000159388
	5.	Kramat	4148	0	0
	6.	Ambat	4951	0	0
	7.	Tlanakan	3758	0	0
	8.	Branta Pesisir	6024	1	0.000166003
	9.	Branta Tinggi	2201	0	0
	10.	Tlesa	1309	0	0
	11.	Larangan Tokol	7776	0	0
	12.	Ceguk	2384	1	0.000419463
	13.	Panglegur	4923	0	0
	14.	Gugul	3661	0	0
	15.	Bukek	1770	0	0
	16.	Larangan Slampar	4210	0	0
	17.	Toro'an	2300	0	0
Pademawu	1.	Baddurih	1904	0	0
	2.	Pagagan	2283	1	0.00043802
	3.	Majungan	2090	0	0
	4.	Padelegan	3256	1	0.000307125
	5.	Tanjung	6967	0	0
	6.	Pademawu Timur	6821	2	0.000293212
	7.	Jarin	4017	0	0
	8.	Prekbun	1093	1	0.000914913
	9.	Sopa'ah	1009	0	0
	10.	Buddih	1121	0	0
	11.	Durbuk	2710	0	0
	12.	Sumedangan	3195	0	0
	13.	Pademawu Barat	6270	1	0.00015949
	14.	Bunder	2758	1	0.000362582
	15.	Dasok	3822	0	0
	16.	Murtajih	6065	2	0.000329761
	17.	Lemper	2395	0	0
	18.	Barurambat Timur	5881	0	0
	19.	Lawangan Daya	8144	0	0
	20.	Buddagan	4606	0	0
	21.	Tambung	2586	1	0.000386698
	22.	Sentol	3731	0	0

3. Pemetaan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Adanya rencana perubahan status desa menjadi kelurahan karena amanat pemerintahan Kabupaten Pamekasan adalah mensejahterakan penduduk di wilayah tersebut. Salah satu tujuan penting perubahan status desa menjadi kelurahan adalah untuk pemerataan pembangunan terutama sarana dan prasarana agar wilayah-wilayah yang berubah status tersebut nantinya mampu menjadi wilayah yang maju.

Rentang kendali merupakan jarak antara desa ke kecamatan dimana wilayah-wilayah yang paling dekat dengan kecamatan. Wilayah-wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan ini memiliki control atau pengawasan yang lebih tinggi serta lebih mudah bagi pemerintah kecamatan dalam pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah desa.

Dilihat dari rentang kendali wilayah, di Kecamatan Pamekasan terdapat beberapa desa yang memiliki rentang kendali relative dekat dengan kecamatan yaitu Laden, Patemon dan Panempun memiliki rentang kendali kurang dari 1 km. Desa Jalmak dan Kangenan memiliki rentang kendali 1 km dengan pusat pemerintahan kecamatan. Sedangkan Desa Teja Timur, Barurambat Kota, Juncangcang dan Bettet memiliki rentang kendali sejauh 2 km dari pusat pemerintahan kecamatan.

Di Kecamatan Tlanakan, Desa Branta Pesisir dan Branta Tinggi memiliki rentang kendali paling dekat yaitu sejauh 1 km. Desa Larangan Tokol memiliki rentang kendali sejauh yaitu 2 km dari pusat pemerintahan kecamatan. Selanjutnya Desa Ceguk, Guguk dan Tlanakan memiliki rentang kendali sejauh 3 km. Desa Bukek memiliki rentang kendali sejauh 5 km dan Desa Panglegur memiliki rentang kendali sejauh 6 km dari pusat pemerintahan kecamatan.

Beberapa desa di Kecamatan Pademawu memiliki rentang kendali cukup dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan yaitu 1 km antara lain Desa Pademawu Barat, Bunder, Murtajih, Lemper, Barurambat Timur dan Tambung. Adapun desa yang memiliki rentang kendali sejauh 2 km dari pusat pemerintahan kecamatan antara lain Pademawu Timur, Buddagan dan Sentol. Sedangkan yang memiliki rentang kendali 3 km dari pusat pemerintahan kecamatan adalah Tanjung, Semedangan dan Desa Dasok.

Tabel IV.9
Distribusi Penduduk dan Luas Wilayah Serta Rentang Kendali Antara
Kecamatan dengan Desa/Kelurahan di Kabupaten Pamekasan

Kecamatan	Desa/Kelurahan	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah (Km²)	Rentang Kendali (Jarak ke Kecamatan (Km²))
Pamekasan	1. Teja Barat	3.947	2.61	2.3
	2. Teja Timur	3.461	1.76	2.0
	3. Jalmak	2.791	1.96	1.0
	4. Laden	5.136	1.41	0.5
	5. Panempan	2.503	0.82	0.7
	6. Kangeran	5.203	1.70	1.0
	7. Patemon	3.923	0.47	0.4
	8. Barurambat Kota	7.001	0.90	2.0
	9. Parteker	3.716	0.33	0.8
	10. Jungcangcang	7.302	1.33	2.0
	11. Bettet	6.522	2.29	2.0
	12. Nylabu Laok	2.380	0.95	3.0
	13. Nylabu Daya	2.625	1.49	6.0
	14. Bugih	13.967	2.17	2.8
	15. Gladak Anyar	9.925	1.27	3.0
	16. Kolpajung	5.792	1.27	3.5
	17. Kowel	6.683	2.93	4.5
	18. Toronan	2.441	0.85	7.5
Tlanakan	1. Dabuan	1.909	1.55	10
	2. Terrak	3.681	4.74	11
	3. Mangngar	2.381	2.30	10
	4. Bandaran	6.274	1.89	9
	5. Kramat	4.148	1.96	8
	6. Ambat	4.951	3.75	7
	7. Tlanakan	3.758	2.92	3
	8. Branta Pesisir	6.024	0.19	1
	9. Branta Tinggi	2.201	1.30	1
	10. Tlesa	1.309	0.56	4
	11. Larangan Tokol	7.776	4.52	2
	12. Ceguk	2.384	2.17	3
	13. Panglegur	4.923	2.82	6
	14. Gugul	3.661	4.84	3
	15. Bukek	1.770	1.71	5
	16. Larangan Slampar	4.210	8.47	10
	17. Toro'an	2.300	2.41	7
Pademawu	1. Baddurih	1.904	2,99	12
	2. Pagagan	2.283	1,42	10
	3. Majungan	2.090	3,62	7
	4. Padelegan	3.256	9,07	7
	5. Tanjung	6.967	7,45	3

6.	Pademawu Timur	6.821	7,01	2
7.	Jarin	4.017	4,94	7
8.	Prekbun	1.093	1,04	6
9.	Sopa'ah	1.009	1,38	4
10.	Buddih	1.121	0,96	5
11.	Durbuk	2.710	2,72	4
12.	Sumedangan	3.195	2,33	3
13.	Pademawu Barat	6.270	4,56	1
14.	Bunder	2.758	4,03	1
15.	Dasok	3.822	3,05	3
16.	Murtajih	6.065	3,23	1
17.	Lemper	2.395	1,18	1
18.	Barurambat Timur	5.881	1,59	1
19.	Lawangan Daya	8.144	2,30	2
20.	Buddagan	4.606	1,97	2
21.	Tambung	2.586	2,11	1
22.	Sentol	3.731	2,95	2

Dengan memperhatikan berbagai pertimbangan antara lain; kondisi geografis kewilayahan yang dapat disimak melalui Peta Kabupaten Pamekasan, rentang kendali atau jarak wilayah dan jumlah penduduk serta luas wilayah sebagaimana tertera dalam tabel diatas maka dapat dikemukakan bahwa ditemukan adanya beberapa wilayah desa yang secara lokalistik kewilayahan memiliki rentang kendali yang cukup dekat sehingga berpotensi untuk dirubah statusnya menjadi kelurahan. Di samping itu perubahan status desa menjadi kelurahan memang dibutuhkan untuk kepentingan pemerataan serta peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan public dibeberapa wilayah yang nantinya akan menjadi pusat keramaian bagi desa-desa disekitarnya.

Implikasi praktis dengan adanya ketentuan tersebut amaka upaya perubahan status desa menjadi kelurahan perlu dilakukan dibeberapa desa sebagai berikut:

Tabel IV.10
Kelayakan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Penduduk >4.000	Luas Wilayah (Tidak Berubah)	Cakupan Wilayah (Dusun/RW/RT ≥3)	SDM (≥5 orang)	Fasilitas Kesehatan	Tenaga Medis	Sarana Ibadah	Fasilitas Olahraga	Sarana Pasar	Rentang Kendali (≤3 km)
Pamekasan	Teja Barat		√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Teja Timur		√	√	√	√	√	√	√		√
	Jalmak		√	√	√	√	√	√	√		√
	Laden	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Panempan		√	√	√	√	√	√	√	√	√
	Kangenan	√	√	√		√	√	√	√		√
	Patemon		√	√		√	√	√	√		√
	Barurambat Kota	√	√	√		√	√	√	√	√	√
	Parteker		√	√		√	√	√	√	√	√
	Jungcangcang	√	√	√		√	√	√	√	√	√
	Bettet	√	√	√	√	√	√	√	√		√
	Nylabu Laok		√	√	√	√	√	√	√		√
	Nylabu Daya		√	√	√	√	√	√	√		
	Bugih	√	√	√		√	√	√	√	√	√
	Gladak Anyar	√	√	√		√	√	√	√	√	√
	Kolpajung	√	√	√		√	√	√	√	√	
	Kowel	√	√	√		√	√	√	√	√	
	Toronan			√	√	√	√	√	√	√	

Tlanakan	Dabuan		√	√	√	√	√	√	√		√	
	Terrak		√	√	√	√	√	√	√	√		
	Manggar		√	√	√	√	√	√	√	√		
	Bandaran	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Kramat	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Ambat	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Tlanakan		√	√	√	√	√	√	√		√	√
	Branta Pesisir	√	√	√	√	√	√	√	√			√
	Branta Tinggi		√	√	√	√	√	√	√			√
	Tlesa		√	√	√	√	√	√	√			
	Larangan Tokol	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√
	Ceguk		√	√	√	√	√	√	√		√	√
	Panglegur	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Gugul		√	√	√	√	√	√	√	√		√
	Bukek		√	√	√	√	√	√	√			
	Larangan Slampar	√	√	√	√	√	√	√	√			
Toro'an		√	√	√	√	√	√	√				
Pademawu	Baddurih		√	√	√	√	√	√	√	√		
	Pagagan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Majungan		√	√	√	√	√	√	√			
	Padelegan		√	√	√	√	√	√	√	√	√	
	Tanjung	√	√	√	√	√	√	√	√	√		√
	Pademawu Timur	√	√	√	√	√	√	√	√		√	√
	Jarin	√	√	√	√	√	√	√	√			
	Prekbun		√		√	√	√	√	√		√	

Sopa'ah		√		√	√	√	√	√		
Buddih		√	√	√	√	√	√			
Durbuk		√	√	√	√	√	√	√		
Sumedangan		√	√	√	√	√	√	√		√
Pademawu Barat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Bunder		√	√	√	√	√	√	√	√	√
Dasok		√	√	√	√	√	√	√		√
Murtajih	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
Lemper		√	√	√	√	√	√	√		√
Barurambat Timur	√	√	√	√	√	√	√	√		√
Lawangan Daya	√	√	√	√	√	√	√	√		√
Buddagan	√	√	√	√	√	√	√	√		√
Tambung		√	√	√	√	√	√	√	√	√
Sentol		√	√	√	√	√	√	√		√

Tabel IV.11
Pemetaan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

No.	Kecamatan	Perubahan Status Desa	Pertimbangan Perubahan Status Desa
1.	Pamekasan	Laden	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Laden memiliki jumlah penduduk yang relative banyak - Dari sisi cakupan wilayah, Desa Laden telah memenuhi prasyarat serta SDM yang berkecukupan untuk pelayanan public - Desa Laden juga telah memiliki sarana dan prasarana baik kesehatan, social dan ekonomi - Memiliki rentang kendali yang dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan
2.	Pamekasan	Panempan	<ul style="list-style-type: none"> - Dari sisi jumlah penduduk, Desa Panempan kurang dari 4.000 jiwa, namun desa tersebut memiliki atau memenuhi prasyarat lain yaitu luas wilayah yang tidak berubah, cakupan wilayah, SDM, sarana dan prasarana serta rentang kendali yang dekat dengan pusat pemerintaha kecamatan.
3.	Pamekasan	Teja Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Dari sisi jumlah penduduk, Desa Teja Barat kurang dari 4.000 jiwa, namun desa tersebut memiliki atau memenuhi prasyarat lain yaitu luas wilayah yang tidak berubah, cakupan wilayah, SDM, sarana dan prasarana serta rentang kendali yang dekat dengan pusat pemerintaha kecamatan.
4.	Pamekasan	Bettet	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Bettet memiliki potensi berubah status menjadi kelurahan. Selain dari sisi jumlah penduduk, luas wilayah, cakupan wilayah yang memenuhi syarat, Desa Bettet juga memiliki sarana dan prasarana yang mendukung serta rentang kendali yang dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan. Satu kendala yang dihadapi oleh Desa Bettet adalah

			belum adanya sarana atau fasilitas pasar sebagai pusat kegiatan ekonomi jika beralih status menjadi kelurahan.
5.	Pamekasan	Teja Timur	- Desa Teja Timur memiliki penduduk yang relative sedikit serta tidak memiliki fasilitas pasar sebagai tempat warga masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Akan tetapi wilayah ini perlu menjadi pertimbangan mengingat rentang kendali dengan pusat pemerintahan kecamatan yang relative dekat.
6.	Pamekasan	Jalmak	- Desa Jalmak memiliki penduduk yang relative sedikit serta tidak memiliki fasilitas pasar sebagai tempat warga masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi. Akan tetapi wilayah ini perlu menjadi pertimbangan mengingat rentang kendali dengan pusat pemerintahan kecamatan yang relative dekat.
7.	Tlanakan	Bandaran	- Dari sisi jumlah penduduk, luas wilayah, cakupan wilayah serta sarana dan prasarana yang dimiliki Desa Bandaran bisa berpotensi menjadi kelurahan, namun perlu menjadi pertimbangan mengingat rentang kendali desa tersebut yang cukup jauh dari pusat pemerintahan kecamatan yaitu 9 km. rentang kendali yang cukup jauh tersebut apakah nantinya akan mempermudah dalam proses control serta koordinasi dan implikasi wilayah tersebut terhadap desa-desa lain disekitarnya.
8.	Tlanakan	Larangan Tokol	- Desa Larangan Tokol memiliki jumlah penduduk yang relative besar. Dari segi luas wilayah, desa tersebut tidak ada perubahan serta memiliki cakupan wilayah yang telah

			<p>memenuhi syarat. Dari sisi sarana dan prasarana juga telah tersedia serta memiliki rentang kendali yang cukup dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan. Satu kelemahan yang ada adalah tidak memiliki fasilitas pasar sebagai tempat aktivitas perekonomian warga.</p>
9.	Tlanakan	Ceguk	<p>- Desa Ceguk memang tidak memiliki jumlah penduduk yang relative besar. Dari segi luas wilayah, desa tersebut tidak ada perubahan serta memiliki cakupan wilayah yang telah memenuhi syarat. Dari sisi sarana dan prasarana juga telah tersedia serta memiliki rentang kendali yang cukup dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan. Satu kelemahan yang ada adalah tidak memiliki fasilitas olahraga yang dalam hal ini bukan merupakan pemenuhan kebutuhan yang sifatnya primer bagi penduduk desa. Sedangkan disisi lain, Desa Ceguk Memiliki Pasar yang keberadaannya memiliki peran strategis dalam perekonomian warga masyarakat.</p>
10.	Tlanakan	Tlanakan	<p>- Desa Tlanakan tidak memiliki jumlah penduduk yang relative besar. Dari segi luas wilayah, desa tersebut tidak ada perubahan serta memiliki cakupan wilayah yang telah memenuhi syarat. Dari sisi sarana dan prasarana juga telah tersedia serta memiliki rentang kendali yang cukup dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan. Satu kelemahan yang ada adalah tidak memiliki fasilitas olahraga yang dalam hal ini bukan merupakan pemenuhan kebutuhan yang sifatnya primer bagi penduduk desa. Sedangkan</p>

			disisi lain, Desa Tlanakan Memiliki Pasar yang keberadaannya memiliki peran strategis dalam perekonomian warga masyarakat.
11.	Tlanakan	Panglegur	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Panglegur dilihat dari sisi ketersediaan sarana dan prasarana, desa ini tidak memiliki sarana olahraga dan pasar, bahkan juga memiliki rentang kendali 6 km dari kecamatan. Namun, desa Panglegur memiliki potensi berupa jumlah penduduk yang relative besar, sehingga bisa untuk sebagai bahan pertimbangan.
12.	Pademawu	Pademawu Barat	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Pademawu Barat memiliki jumlah penduduk yang relative banyak - Dari sisi cakupan wilayah, Desa Pademawu Barat telah memenuhi prasyarat serta SDM yang berkecukupan untuk pelayanan public - Desa Pademawu Barat juga telah memiliki sarana dan prasarana baik kesehatan, social dan ekonomi - Memiliki rentang kendali yang dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan
13.	Pademawu	Murtajih	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Murtajih memiliki jumlah penduduk yang relative banyak - Dari sisi cakupan wilayah, Desa Murtajih telah memenuhi prasyarat serta SDM yang berkecukupan untuk pelayanan public - Desa Murtajih juga telah memiliki sarana dan prasarana baik kesehatan, social dan ekonomi - Memiliki rentang kendali yang dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan
14.	Pademawu	Buddagan	<ul style="list-style-type: none"> - Desa Buddagan memiliki jumlah penduduk yang relative besar.

			<p>Dari segi luas wilayah, desa tersebut tidak ada perubahan serta memiliki cakupan wilayah yang telah memenuhi syarat. Dari sisi sarana dan prasarana juga telah tersedia serta memiliki rentang kendali yang cukup dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan. Satu kelemahan yang ada adalah tidak memiliki fasilitas pasar sebagai tempat aktivitas perekonomian warga.</p>
15.	Pademawu	Tanjung	<p>- Desa Tanjung memiliki jumlah penduduk yang relative besar. Dari segi luas wilayah, desa tersebut tidak ada perubahan serta memiliki cakupan wilayah yang telah memenuhi syarat. Dari sisi sarana dan prasarana juga telah tersedia serta memiliki rentang kendali yang cukup dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan. Satu kelemahan yang ada adalah tidak memiliki fasilitas pasar sebagai tempat aktivitas perekonomian warga.</p>
16.	Pademawu	Pademawu Timur	<p>- Desa Pademawu Timur memiliki jumlah penduduk yang relative besar. Dari segi luas wilayah, desa tersebut tidak ada perubahan serta memiliki cakupan wilayah yang telah memenuhi syarat. Dari sisi sarana dan prasarana juga telah tersedia serta memiliki rentang kendali yang cukup dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan. Satu kelemahan yang ada adalah tidak memiliki fasilitas olahraga yang dalam hal ini bukan merupakan pemenuhan kebutuhan yang sifatnya primer bagi penduduk desa. Sedangkan disisi lain, Desa Pademawu Timur Memiliki Pasar yang keberadaannya memiliki peran</p>

			strategis dalam perekonomian warga masyarakat.
17.	Pademawu	Tambung	- Desa Tambung tidak memiliki jumlah penduduk yang relative besar. Dari segi luas wilayah, desa tersebut tidak ada perubahan serta memiliki cakupan wilayah yang telah memenuhi syarat. Dari sisi sarana dan prasarana juga telah tersedia serta memiliki rentang kendali yang cukup dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan. Desa Tambung juga memiliki Pasar yang keberadaannya memiliki peran strategis dalam perekonomian warga masyarakat.
18.	Pademawu	Dasok	- Desa Dasok memiliki jumlah penduduk yang relative kecil. Akan tetapi dari sisi sarana dan prasarana sudah tersedia kecuali pasar. Desa ini bisa masuk dalam pertimbangan karena memiliki rentang kendali yang dekat dengan pusat pemerintahan kecamatan, sehingga memudahkan dalam control, pengendalian dan koordinasi antara desa tersebut dengan kecamatan.

Hasil dari pemetaan diatas merupakan pertimbangan dari sisi prasyarat dari aspek legal formal dimana perubahan status desa menjadi kelurahan meliputi jumlah penduduk, ketetapan luas wilayah, cakupan wilayah, pertumbuhan sarana dan prasarana serta rentang kendali wilayah. Selanjutnya perlu adanya pertimbangan lain yaitu partisipasi masyarakat itu sendiri sebagai stakeholder dalam perubahan status desa menjadi kelurahan.

BAB V

KEBUTUHAN DAN PANDANGAN MASYARAKAT TENTANG PERUBAHAN STATUS DESA MENJADI KELURAHAN

Perubahan status desa menjadi kelurahan sesungguhnya bukan sekadar perubahan administrative status desa, tetapi juga harus mempertimbangkan apa implikasi perubahan status desa menjadi kelurahan bagi masyarakat. Perubahan status desa menjadi kelurahan, tidak akan berarti apa-apa jika tidak berimplikasi pada peningkatan kualitas layanan public yang dibutuhkan masyarakat desa.

Menurut ketentuan hukum, khususnya dalam Permendagri Nomor 28 Tahun 2006 disebutkan bahwa sebuah desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) penduduk desa yang mempunyai hak pilih, yang teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam peraturan desa. Kunci utama untuk menentukan apakah sebuah desa perlu diubah menjadi kelurahan, dengan demikian adalah kehendak warga desa itu sendiri. Tidak bisa perubahan status desa menjadi kelurahan hanya menjadi inisiatif Kepala Desa dan perangkatnya atau sebaliknya tidak mungkin Kepala Desa menolak harapan dan aspirasi masyarakat yang menginginkan desanya berubah menjadi kelurahan jika memang paling sedikit dua pertiga masyarakat menghendaknya.

Pengalaman selama ini telah banyak memperlihatkan bahwa kurangnya informasi tentang prosedur perubahan status desa menjadi kelurahan telah menjadi factor yang menghambat keinginan masyarakat desa untuk dapat meningkatkan statusnya menjadi kelurahan. Olehnya itu, berdasarkan PP Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa telah diulas syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh desa sebelum mengusulkan perubahan status menjadi kelurahan. Sejumlah syarat perubahan status desa menjadi kelurahan, antara lain: (1) luas wilayah tidak berubah; (2) jumlah penduduk paling sedikit 8.000 (delapan ribu) jiwa atau 1.600 (seribu enam ratus) kepala keluarga untuk wilayah Jawa dan Bali serta paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga untuk di luar

wilayah Jawa dan Bali; (3) sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan; (4) potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian; (5) kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa; dan (6) meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan.

Di desa-desa tertentu di Kabupaten Pamekasan, harus diakui dalam lima-sepuluh tahun terakhir telah terjadi perkembangan yang pesat –terutama pasca dioperasikannya Jembatan Suramadu. Akselerasi perkembangan wilayah, terutama desa-desa yang ada di Pamekasan berubah makin cepat hingga membutuhkan perubahan status desa menjadi kelurahan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bab ini membahas bagaimana aspirasi masyarakat desa di Kabupaten Pamekasan terhadap perubahan status desa menjadi kelurahan, terutama yang berkaitan dengan akses dan kualitas layanan publik. Apa yang dipaparkan dalam bab ini penting untuk mengetahui bagaimana sebetulnya kebutuhan dan aspirasi masyarakat jika desa mereka diusulkan berubah statusnya menjadi kelurahan.

1. Karakteristik Responden

Untuk memetakan bagaimana sikap dan harapan masyarakat terhadap kemungkinan perubahan status desa menjadi kelurahan, studi ini telah mewawancarai 200 responden yang berasal dari tiga kecamatan dan 10 desa yang tersebar di Kecamatan Pademawu, Tlanakan dan Kecamatan Pamekasan Kota. Sebanyak 51% responden berjenis kelamin laki-laki dan 49% responden berjenis kelamin perempuan. Usia responden berkisar antara 21 tahun hingga 57 tahun. Mereka semua umumnya penduduk usia produktif. Sebanyak 36,5% responden berusia 41-50 tahun, dan 32% responden berusia 31-40 tahun. Sementara itu yang berusia di atas 50 tahun sebanyak 23,45% responden.

Pendidikan terakhir responden, sebagian besar (49,5%) setara SMA dan yang berpendidikan SMP sebanyak 19%. Hanya 13,5% yang berpendidikan SD dan 1,5% responden mengaku tidak sekolah. Dari 200 responden, sebanyak 16,5% responden berpendidikan lulusan PT atau Akademi. Bagi masyarakat desa di

Pamekasan, terutama yang tinggal di desa sekitar wilayah perkotaan, mereka umumnya memiliki rata-rata tingkat pendidikan yang lebih baik daripada masyarakat di wilayah pedalaman.

Tabel V.1
Identitas Responden (N=200)

Identitas	Keterangan	Frekuensi	Presentase
Jenis Kelamin	Laki-laki	102	51%
	Perempuan	98	49 %
Umur	21 – 30	16	8,0 %
	31 – 40	64	32,0 %
	41 – 50	73	36,5 %
	Lebih dari 50	47	23,5 %
Pendidikan terakhir	Tidak sekolah	3	1,5 %
	SD	27	13,5 %
	SLTP	38	19,0 %
	SLTA	99	49,5 %
	PT/Akademi	33	16,5 %
Status keluarga	Batih	134	67,0 %
	Somah	66	33,0 %
Jumlah anak	Tidak punya anak	10	5,0 %
	1 orang	54	27,0 %
	2 orang	76	38,0 %
	3 orang	40	20,0 %
	Lebih dari 3 orang	20	10,0 %
Pekerjaan pokok responden	Petani	31	15,5 %
	Nelayan	0	0 %
	Wiraswasta	32	16,0 %
	Pedagang	35	17,5 %
	PNS/Polisi/ABRI	31	15,5 %
	Sektor informal	42	21,0 %
	Pegawai swasta	13	6,5 %
	Ibu rumah tangga	16	8,0 %
Status penduduk	Penduduk asli	178	89,0 %
	Penduduk Pendetang	22	11,0 %

Status keluarga responden sebagian besar (67%) adalah keluarga batih, dan sisanya sebanyak 33% merupakan keluarga somah atau *extended family*. Di kalangan masyarakat Pamekasan, kecenderungan keluarga yang bertipe somah masih cukup populer meski sebagian besar kini mulai mengembangkan tipe keluarga batih atau keluarga inti saja.

Hampir semua responden mengaku saat penelitian dilakukan, mereka sudah memiliki anak. Dari 200 responden yang diteliti, hanya 5% yang mengaku belum memiliki anak. Sebanyak 27% responden memiliki 1 orang anak, dan 38% responden memiliki 2 orang anak. Cukup banyak responden yang termasuk keluarga besar dengan 3 orang anak (20%), dan bahkan ada 10% responden yang memiliki anak lebih dari 3 orang. Prinsip banyak anak banyak rejeki dalam batas-batas tertentu tampaknya masih dipercaya responden, sehingga bisa dipahami jika mereka memiliki anak lebih dari 1 atau 2 orang anak.

Pekerjaan pokok yang ditekuni responden, sebagian besar di sector informal (21%) dan petani (15,5%). Di kalangan penduduk yang kurang berpendidikan, mereka umumnya memang lebih banyak yang bisa masuk dan bekerja di sector perekonomian firma, Menjadi petani atau bekerja di sector informal adalah pilihan yang realistis ditekuni sebagian responden. Dari 200 responden yang diwawancarai, sebanyak 15,5% bekerja sebagai PNS/Polisi atau ABRI. Sedangkan sebanyak 17,5% merupakan pedagang. Sebanyak 16% mengaku tengah berwiraswasta. Sebanyak 6,5% merupakan pegawai swasta, dan 8% ibu rumah tangga.

Status penduduk yang diteliti, sebagian besar adalah penduduk asli (89%). Mereka adalah penduduk yang lahir dan tinggal di lokasi penelitian. Sedangkan sebanyak 11% merupakan penduduk pendatang –entah dari wilayah desa dan kecamatan yang lain atau dari kabupaten lain di luar Pamekasan. Penduduk asli kelahiran desa di mana penelitian dilakukan, di atas kertas mereka lebih memiliki keterikatan dengan tanah kelahirannya daripada penduduk pendatang.

Tabel V.2
Kondisi Ekonomi Keluarga Responden

Pertanyaan	Kategori	Persentase
Apakah pendapatan yang diperoleh cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarga	Sangat kurang	6,0 %
	Relatif kurang	10,5 %
	Pas-pasan	19,0 %
	Cukup	63,5 %
	Berlebih	1,0 %
Kepemilikan tabungan	Tidak memiliki	50,5 %
	Ya memiliki	49,5 %
Kepemilikan utang	Tidak memiliki	34,0 %
	Ya memiliki	66,0 %
Jumlah hutang yang	Rp 0 – Rp 500.000	66,5 %

dimiliki	Rp 500.001 – Rp 1.500.000	3,0 %
	Rp 1.500.001 – Rp 2.500.000	3,5 %
	Rp 2.500.001 – Rp 3.500.000	2,5 %
	Lebih dari Rp 3.500.000	24,5 %
Apakah saat ini memiliki sumber penghasilan tetap	Ya memiliki sumber penghasilan tetap	70,0 %
	Ya memiliki tapi tidak pasti	26,0 %
	Tidak memiliki sumber penghasilan	4,0 %
Kondisi kesejahteraan keluarga setahun terakhir	Membaik	33,5 %
	Relatif sama saja	64,0 %
	Memburuk	2,5 %

Dari 200 masyarakat yang diteliti, studi ini menemukan sebagian besar termasuk keluarga menengah ke atas –dalam arti secara ekonomi relative cukup. Sebanyak 63,5% responden menyatakan pendapatan yang mereka peroleh relatif cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan ada 1% responden yang mengaku kehidupannya termasuk berlebih alias mapan. Hanya 10,5% responden yang kondisi ekonomia kurang, dan 6% termasuk sangat kurang. Sebanyak 19% responden mengaku kondisi ekonominya termasuk pas-pasan.

Sebanyak 49,5% responden mengaku saat ini mereka memiliki tabungan – meski jumlahnya bervariasi dan berbeda antara responden satu dengan yang lain. Tetapi, separuh lebih responden mengaku tidak memiliki tabungan (50,5%). Alih-alih memiliki tabungan untuk menyangga kebutuhan mendadak, studi ini menemukan justru 66% responden mengaku saat ini tengah memiliki tanggungan utang.

Meski mayoritas responden (66,5) mengaku utang yang mereka tanggung di bawah 500 ribu, tetapi sebagian responden mengaku utang mereka saat ini mencapai jutaan rupiah. Sebanyak 24,5% responden mengaku memiliki utang lebih dari 3,5 juta rupiah.

Sebanyak 70% responden memiliki sumber penghasilan tetap, dan 26% responden memiliki sumber penghasilan meski tidak tetap. Hanya 4% responden yang mengaku saat ini tengah tidak memiliki sumber penghasilan

Kondisi kesejahteraan keluarga responden dalam setahun terakhir, sebagian besar relative sama (64%) –artinya mereka tidak membaik, tetapi juga tidak makin memburuk. Dari 200 responden yang diteliti, hanya 2,5% responden yang

mengajku kondisinya memburuk, sementara sebanyak 33,5% responden mengaku kondisi kesejahteraan keluarga mereka membaik.

2. Akses Ke Pusat Layanan Publik

Secara umum, masyarakat yang tinggal di lokasi penelitian umumnya mengaku tidak mengalami kesulitan untuk mencari berbagai layanan public, baik itu layanan kesehatan, administrasi kependudukan maupun layanan pendidikan: sekolah untuk anak-anaknya.

Sebanyak 80% responden mengaku jarak rumah mereka dengan layanan kesehatan relative dekat. Hanya 3,5% responden yang mengaku jarak rumahnya dengan layanan kesehatan terlalu jauh, dan 16,5% menyatakan jauh. Ketika ada anghota keluarga yang sakit dan membutuhkan layanan kesehatan, sebagian besar responden menyatakan selama ini tidak merasa kesulitan karena jaraknya yang dekat dengan tepat tinggal responden.

Sebanyak 84% responden juga menyatakan jarak rumah mereka dengan sekolah bagi anak-anaknya relative dekat. Hanya 1,5% responden yang mengaku terlalu jauh, dan 14,5% menyatakan jauh. Untuk keperluan anak pergi ke sekolah, bagi responden akan lebih baik jika jaraknya dekat dengan tempat tinggal mereka. Lokasi sekolah yang jauh, selain membuat was-was karena anak harus berangkat sendiri ke sekolah, juga membuat biaya transport menjadi mahal dan membebani kondisi keuangan responden.

Untuk layanan admiistrasi kependudukan, sebanyak 66% responden mengaku jarak rumah mereka relative dekat. Namun demikian, cukup banyak responden (22%) yang mengaku jarak rumah mereka dengan kantor desa dan kantor kecamatan jauh, bahkan 12% mengaku terlalu jauh. Untuk keperluan mengurus surat keterangan dari desa, bagi responden yang rumahnya jauh, mereka biasanya memanfaatkan sepeda motor yang dimiliki untuk mencapai kantor kepala desa atau kantor kecamatan.

Tabel V. 3
Kesulitan Yang Dhadapi Responden Ketika Pusat
Layanan Publik Relatif Jauh (N=200)

Keterangan	Terlalu jauh	Jauh	Dekat
Mencari layanan kesehatan	3,5%	16,5%	80,0%
Mengurus surat adminitrasi kependudukan	12,0%	22,0%	66,0%
Mencari sekolah untuk anak	1,5%	14,5%	84,0%
Mengurus surat untuk usaha	11,5%	38,5%	50,0%

Di antara berbagai layanan public yang dibutuhkan masyarakat, layanan yang dirasakan jauh dari tempat tinggal masyarakat adalah ketika mereka membutuhkan surat untuk usaha. Dari 200 responden yang diteliti, hanya separuh (50%) yang mengaku jaraknya dengan tempat tinggal mereka relative dekat. Sementara itu, sebanyak 38,5% responden mengaku jauh, dan bahkan 11,5% responden mengaku terlalu jauh.

Mobilitas warga masyarakat dalam mencari layanan public, selama ini banyak terbantu dan dimudahkan karena mereka umumnya memiliki sepeda motor yang fleksibel dan relatif mampu menjangkau berbagai wilayah –tanpa harus tergantung pada ketersediaan kendaraan umum. Sejumlah informan menyatakan, ketika upaya warga untuk memiliki sepeda motot menjadi makin mudah dan bisa dicicil, maka mereka pun akhirnya lebih memilih membeli sepeda motor daripada naik kendaraan umum yang rutanya terbatas.

Studi ini menemukan, rata-rata sekitar 90% lebih responden mengaku selalu mempergunakan sepeda motor ketika pergi ke Puskesmas (90%), Rumah Sakit (92%), dokter praktik swasta (92,5%), kantor kepala desa (90,5%), kantor kecamatan (93%), atau ketika mengantar anak ke sekolah.

Tabel V.4
Upaya Yang Dilakukan Untuk Mencapai Layanan
Publik Yang Dibutuhkan

Kategori	Keterangan	Persentase
Puskesmas	Jalan kaki	1,5 %
	Naik kendaraan umum	3,0 %
	Mobil	4,0 %
	Sepeda motor	90,0 %
	Sepeda	1,5 %
Rumah Sakit	Jalan kaki	1,5 %
	Naik kendaraan umum	0,5 %
	Mobil	5,0 %

	Sepeda motor	92,0 %
	Sepeda	1,0 %
Dokter praktik swasta	Jalan kaki	3,0 %
	Naik kendaraan umum	0,5 %
	Mobil	3,0 %
	Sepeda motor	92,5 %
	Sepeda	1,0 %
Kantor kepala desa	Jalan kaki	4,5 %
	Naik kendaraan umum	0,5 %
	Mobil	2,5 %
	Sepeda motor	90,5 %
	Sepeda	2,0 %
Kantor kecamatan	Jalan kaki	2,5 %
	Naik kendaraan umum	0 %
	Mobil	3,5 %
	Sepeda motor	93,0 %
	Sepeda	1,0 %
Taman kanak-kanak	Jalan kaki	4,0 %
	Naik kendaraan umum	0 %
	Mobil	3,0 %
	Sepeda motor	91,0 %
	Sepeda	2,0 %
Sekolah dasar	Jalan kaki	4,0 %
	Naik kendaraan umum	0 %
	Mobil	3,0 %
	Sepeda motor	90,5 %
	Sepeda	2,5 %
Sekolah menengah pertama	Jalan kaki	4,0 %
	Naik kendaraan umum	0 %
	Mobil	3,0 %
	Sepeda motor	91,0 %
	Sepeda	2,0 %
Sekolah menengah atas	Jalan kaki	2,5 %
	Naik kendaraan umum	0 %
	Mobil	3,0 %
	Sepeda motor	93,5 %
	Sepeda	1,0 %
KUA	Jalan kaki	0,5 %
	Naik kendaraan umum	0 %
	Mobil	8,5 %
	Sepeda motor	90,0 %
	Sepeda	1,0 %

Bagi anak-anak responden, ketika mereka ke sekolah umumnya banyak terbantu karena adanya sepeda motor. Baik untuk anak-anak responden yang masih di jenjang TK, SD, SMP maupun SMA, mereka sebagian besar mengaku

tidak menjadi masalah karena memiliki sepeda motor yang mendukung mobilitas social mereka. Dari 200 warga masyarakat yang diwawancarai nyaris tidak ada responden yang mengandalkan kendaraan umum untuk mendukung kebutuhan mobilitas social mereka.

Bagi responden yang secara ekonomi mapan, sekitar 3-8%, mereka mengaku memanfaatkan mobil atau kendaraan roda empat miliknya untuk berkunjung ke berbagai pusat layanan public.

Tabel V.5
Jarak Tempat Tinggal Responden Dengan Berbagai
Pusat Layanan Publik

Jarak rumah responden dengan pusat layanan public	Kategori	Persentase
Puskesmas	Kurang dari 1 kilometer	47,5 %
	1,1 kilometer – 2 kilometer	27,0 %
	2,1 kilometer – 3 kilometer	12,5 %
	3,1 kilometer – 4 kilometer	13,0 %
	Lebih dari 4 kilometer	0 %
Rumah Sakit	Kurang dari 1 kilometer	35,5 %
	1,1 kilometer – 2 kilometer	16,0 %
	2,1 kilometer – 3 kilometer	14,5 %
	3,1 kilometer – 4 kilometer	14,0 %
	Lebih dari 4 kilometer	20,0 %
Dokter praktik swasta	Kurang dari 1 kilometer	39,5 %
	1,1 kilometer – 2 kilometer	27,5 %
	2,1 kilometer – 3 kilometer	10,5 %
	3,1 kilometer – 4 kilometer	5,0 %
	Lebih dari 4 kilometer	17,5 %
Kantor kepala desa	Kurang dari 1 kilometer	83,0 %
	1,1 kilometer – 2 kilometer	11,0 %
	2,1 kilometer – 3 kilometer	5,0 %
	3,1 kilometer – 4 kilometer	0,5 %
	Lebih dari 4 kilometer	0,5 %
Kantor kecamatan	Kurang dari 1 kilometer	34,5 %
	1,1 kilometer – 2 kilometer	19,5 %
	2,1 kilometer – 3 kilometer	18,0 %
	3,1 kilometer – 4 kilometer	9,0 %
	Lebih dari 4 kilometer	19,0 %
Taman kanak-kanak	Kurang dari 1 kilometer	93,5 %
	1,1 kilometer – 2 kilometer	3,5 %
	2,1 kilometer – 3 kilometer	3,0 %
	3,1 kilometer – 4 kilometer	0 %
	Lebih dari 4 kilometer	0 %
Sekolah dasar	Kurang dari 1 kilometer	95,0 %

	1,1 kilometer – 2 kilometer	5,0 %
	2,1 kilometer – 3 kilometer	0 %
	3,1 kilometer – 4 kilometer	0 %
	Lebih dari 4 kilometer	0 %
Sekolah menengah pertama	Kurang dari 1 kilometer	72,5 %
	1,1 kilometer – 2 kilometer	15,0 %
	2,1 kilometer – 3 kilometer	10,0 %
	3,1 kilometer – 4 kilometer	2,5 %
	Lebih dari 4 kilometer	0 %
Sekolah menengah atas	Kurang dari 1 kilometer	60,5 %
	1,1 kilometer – 2 kilometer	23,0 %
	2,1 kilometer – 3 kilometer	9,5 %
	3,1 kilometer – 4 kilometer	6,5 %
	Lebih dari 4 kilometer	0,5 %
KUA	Kurang dari 1 kilometer	5,5 %
	1,1 kilometer – 2 kilometer	23,0 %
	2,1 kilometer – 3 kilometer	34,0 %
	3,1 kilometer – 4 kilometer	18,0 %
	Lebih dari 4 kilometer	19,5 %

Sekolah untuk anak-anak responden umumnya dekat, hanya dalam radius kurang dari 1 kilometer. Lokasi Kantor Kepala Desa umumnya juga dekat, sehingga sebagian besar warga mengaku tidak mengalami kesulitan untuk mengakses sekolah bagi anak-anaknya atau ketika membutuhkan mengurus surat di kantor balai desa.

Untuk Puskesmas dan Rumah Sakit, meski tidak sebanyak jumlah warga yang rumahnya hanya berjarak kurang dari 1 kilometer dengan Kantor Kepala desa, tetapi cukup banyak responden yang menyatakan rumah mereka jaraknya kurang dari 1 kilometer bila ingin mencari Puskesmas atau RS. Untuk tempat praktik dokter swasta, meski sebagian responden mengaku lokasinya relative jauh (lebih dari 2 kilometer, bahkan lebih dari 4 kilometer). Tetapi, sebagian besar responden mengaku tidak terlalu mempermasalahkannya.

Lokasi KUA relatif jauh dari tempat tinggal responden. Sebagian besar responden menyatakan jarak rumah mereka dengan KUA lebih dari 2 kilometer, bahkan ada 19,5% responden yang mengaku jarak rumah mereka dengan KUA lebih dari 4 kilometer.

3. Manfaat yang Diperoleh Masyarakat

Dari segi geografis sebetulnya tidak ada perubahan yang berarti, berkaitan dengan akses masyarakat pada pusat layanan public. Tetapi, ketika desa berubah status menjadi kelurahan, salah satu indikatornya adalah pada perkembangan jumlah dan kualitas layanan public yang tersedia di wilayah itu. Ketika sebuah desa jumlah penduduknya makin berkembang menjadi paling sedikit 8.000 jiwa atau 1.600 KK, maka desa yang bersangkutan bukan tidak mungkin berubah statusnya menjadi kelurahan.

Desa-desa yang lokasinya berdekatan dengan pusat keramaian dan pusat pertumbuhan, mereka adalah desa-desa yang berpotensi berubah status menjadi kelurahan. Menurut penilaian masyarakat, manfaat yang bakal mereka peroleh ketika desa mereka berubah menjadi kelurahan adalah upaya untuk mengurus administrasi kependudukan (85%) menjadi lebih cepat –di samping biaya yang harus dikeluarkan juga menjadi lebih murah (84%). Sebanyak 69% responden mengaku untuk layanan administrasi kependudukan menjadi lebih dekat dan prosedur mengurusnya pun menjadi tidak berbelit ketika desa tempat mereka tinggal berubah menjadi kelurahan.

Tabel V.6
Manfaat Yang Diperoleh Jika Status Desa
Berubah Menjadi Kelurahan (N=200)

Manfaat layanan publik di bidang administrasi kependudukan	Ya	Tidak
Lokasi layanan yang dibutuhkan menjadi lebih dekat	69,0%	31,0%
Mengurus layanan public tidak berbelit	78,5%	21,5%
Biaya yang dibutuhkan semakin murah	84,0%	16,0%
Mengurus administrasi kependudukan semakin cepat	85,0%	15,0%
Manfaat layanan publik di bidang kesehatan	Ya	Tidak
Lokasinya semakin dekat	61,5%	38,5%
Jam layanan semakin tidak terbatas	66,5%	33,5%
Biaya yang dibutuhkan relative murah	84,5%	15,5%
Mengurusnya cepat	84,0%	16,0%
Manfaat layanan publik di bidang pendidikan	Ya	Tidak
Lokasi sekolah dekat	63,5%	36,5%
Kondisi sekolah menjadi lebih baik	90,5%	9,5%
Biaya yang dibutuhkan menjadi lebih murah	86,0%	14,0%

Untuk layanan kesehatan dan pendidikan, sama seperti layanan administrasi kependudukan, menurut sebagian besar responden kondisinya diyakini akan lebih baik jika desa tempat tinggal mereka berubah menjadi kelurahan. Untuk layanan kesehatan, biaya yang dibutuhkan menjadi lebih murah (84,5%), dan proses pengurusannya pun diyakini menjadi lebih mudah.

Untuk layanan di bidang pendidikan, sebanyak 63,5% responden mengaku lokasi sekolah akan lebih dekat ketika desa tempat di mana mereka tinggal berubah menjadi kelurahan. Sebanyak 86% responden menilai biaya yang dibutuhkan akan lebih murah, dan 90,5% responden mengaku kondisi sekolah niscaya juga akan lebih baik.

4. Kebutuhan dan Harapan Masyarakat

Layanan publik yang dikehendaki dan dibutuhkan masyarakat, bukan hanya yang mudah diakses dan murah, tetapi juga cepat, prosedurnya mudah, dan kualitas layanannya bagus. Dari studi yang dilakukan diketahui hampir semua responden menghendaki dan membutuhkan layanan public yang memudahkan dan benar-benar berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Tabel V.7
Harapan Masyarakat Terhadap Layanan Publik
Yang Disediakan Pemerintah (N=200)

Kebutuhan utama dalam layanan public yang disediakan pemerintah daerah	Kategori	Persentase
Mudah diakses	Sangat dibutuhkan	58,0 %
	Dibutuhkan	40,5 %
	Kurang dibutuhkan	1,5 %
	Tidak dibutuhkan	0 %
Murah	Sangat dibutuhkan	55,5 %
	Dibutuhkan	43,5 %
	Kurang dibutuhkan	1,0 %
	Tidak dibutuhkan	0 %
Layanan cepat	Sangat dibutuhkan	57,5 %
	Dibutuhkan	42,5 %
	Kurang dibutuhkan	0 %
	Tidak dibutuhkan	0 %
Prosedurnya mudah	Sangat dibutuhkan	56,0 %
	Dibutuhkan	43,5 %
	Kurang dibutuhkan	0,5 %

	Tidak dibutuhkan	0 %
Kualitas layanan bagus	Sangat dibutuhkan	54,5 %
	Dibutuhkan	45,0 %
	Kurang dibutuhkan	0,5 %
	Tidak dibutuhkan	0 %

Dengan berubahnya status desa menjadi kelurahan, bagi masyarakat yang terpenting adalah implikasinya terhadap akses layanan public. Sejumlah informan yang diwawancarai menyatakan, tidak ada artinya desa yang mereka tempati berubah status menjadi kelurahan jika tidak ada konsekuensi terhadap kualitas layanan public.

Sebanyak 66,5% responden berharap dan meyakini perubahan status desa menjadi kelurahan akan membuat layanan kesehatan menjadi makin baik. Hanya 1,5% responden yang menyatakan kualitas layanan kesehatan akan makin buruk kalau desa mereka berubah menjadi kelurahan.

Tabel V.8
Dampak Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Jika desa tempat tinggal responden berganti status menjadi kelurahan apakah itu berdampak pada layanan publik yang dapat diakses	Kategori	Persentase
Layanan kesehatan	Ya makin baik	66,5 %
	Tetap saja	32,0 %
	Makin buruk	1,5 %
Layanan Pendidikan	Ya makin baik	64,0 %
	Tetap saja	34,5 %
	Makin buruk	1,5 %
Layanan administrasi kependudukan	Ya makin baik	63,0 %
	Tetap saja	35,5 %
	Makin buruk	1,5 %
Layanan pengembangan usaha	Ya makin baik	58,5 %
	Tetap saja	40,0 %
	Makin buruk	1,5 %

Sebanyak 64% responden menyatakan kualitas layanan pendidikan cenderung akan makin baik jika desa mereka berubah status menjadi kelurahan. Sebanyak 34,5% responden menyatakan kualitas layanan pendidikan tetap, dan

hanya 2,5% responden yang menyatakan kualitas layanan pendidikan akan makin buruk jika desa mereka berubah menjadi kelurahan.

Untuk layanan administrasi kependudukan, sikap responden kurang-lebih sama. Sebanyak 63% responden meyakini kualitas layanan administrasi kependudukan akan bertambah baik jika status desa berubah menjadi kelurahan. Sejumlah informan menyatakan, dengan perubahan menjadi kelurahan, maka ketertiban dan jam kerja layanan kantor kelurahan akan lebih pasti daripada layanan di desa.

Untuk layanan pengembangan usaha, sebanyak 58,5% responden meyakini kondisinya akan lebih baik jika desa mereka berubah status menjadi kelurahan. Namun demikian, sebanyak 40% responden meyakini tidak akan terjadi perubahan kualitas layanan pengembangan usaha meski desa mereka berubah menjadi kelurahan.

Tabel V.9
Perlu-Tidaknya Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pertanyaan	Kategori	Persentase
Perubahan status desa menjadi kelurahan perlu dilakukan atau tidak	Sangat perlu	33,0 %
	Perlu	43,0 %
	Ragu-ragu	11,0 %
	Tidak perlu	10,5 %
	Sangat tidak perlu	2,5 %

Perubahan status desa menjadi kelurahan, menurut sebagian besar responden perlu dilakukan. Dari 200 masyarakat desa yang diteliti, sebanyak 43% menyatakan perubahan status desa menjadi kelurahan perlu dilakukan, dan bahkan 33% responden menyatakan sangat perlu dilakukan. Hanya 10,5% responden yang menyatakan perubahan status desa menjadi kelurahan tidak perlu dilakukan. Sementara itu, sebanyak 2,5% responden menyatakan sangat tidak perlu dilakukan. Walaupun sebenarnya banyak responden menyatakan tidak terlalu peduli tentang perubahan status desanya, tetapi mereka umumnya menyatakan kalau perubahan status itu dapat memberikan jaminan kualitas layanan menjadi lebih baik, tentu tidak menjadi masalah.

Tabel V.10
Upaya Yang Perlu Dikembangkan Pemerintah Untuk Meningkatkan Kualitas Layanan Publik

Keterangan	Kategori	Persentase
Memperpanjang jam operasional pusat layanan	Ya sangat perlu	26,5 %
	Ya perlu	49,0 %
	Cukup perlu	12,5 %
	Tidak perlu	11,5 %
	Sangat tidak perlu	0,5 %
Menambah jumlah pusat layanan	Ya sangat perlu	31,0 %
	Ya perlu	47,0 %
	Cukup perlu	13,0 %
	Tidak perlu	9,0 %
	Sangat tidak perlu	0 %
Meningkatkan kualitas layanan	Ya sangat perlu	47,5 %
	Ya perlu	42,0 %
	Cukup perlu	8,5 %
	Tidak perlu	2,0 %
	Sangat tidak perlu	0 %
Memberikan subsidi layanan	Ya sangat perlu	40,0 %
	Ya perlu	49,0 %
	Cukup perlu	9,5 %
	Tidak perlu	1,5 %
	Sangat tidak perlu	0 %

Sejumlah hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan public, menurut masyarakat adalah melalui berbagai cara, bisa dengan cara menambah jam operasional layanan, atau menambah pusat layanan public yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Di samping itu, tentu soal kualitas layanan harus terus diperbaiki, dan bahkan jika perlu dengan memberi subsidi kepada layanan yang diberikan kepada masyarakat. Intinya apapun strategi yang dikembangkan pemerintah di desa untuk meningkatkan kualitas layanan, yang terpenting adalah sejauhmana kemudahan yang bakal mereka peroleh? Bagi masyarakat desa, mereka umumnya tidak mempermasalahkan apakah desa mereka diubah statusnya menjadi kelurahan atau tidak.

Meski tidak semua, tetapi sejumlah responden mengeluhkan persoalan layanan publik yang diperuntukkan desanya. Di desa, ketika harus mengurus berbagai keperluan seringkali warga harus ke rumah pribadi kepala desa, sementara balai desa cenderung tidak banyak difungsikan. Untuk itu, ketika mereka ditanya bagaimana peluang perubahan status desa menjadi kelurahan,

mereka umumnya setuju dan diharapkan dapat diperoleh manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat setempat. Dengan dipinpin lurah diharapkan bantuan dari pemerintah akan lebih banyak yang masuk, terutama untuk masyarakat miskin. Demikian salah satu pernyataan responden.

Terlepas seberapa banyak manfaat yang bakal diperoleh jika desa berubah status menjadi kelurahan, tetapi perlu disadari bahwa mengubah status desa menjadi kelurahan bukanlah hal yang mudah (*).

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Di Kabupaten Pamekasan, berbagai perubahan dan perkembangan bukan hanya merambah wilayah perkotaan, tetapi juga wilayah perdesaan. Sejumlah desa dilaporkan telah mengalami perubahan dan perkembangan yang cukup signifikan, terutama sejak digelontorkan dana yang cukup besar ke seluruh desa. Dalam Program Dana Desa, ratusan juta bahkan sekitar satu milyar dana langsung diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, sehingga tidak sedikit desa mulai maju dan mengejar ketertinggalan.

Kegiatan sebagaimana dilaporkan bermaksud mengkaji kemungkinan perubahan status desa menjadi kelurahan di Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini mendesak dilakukan, sebab berbagai perubahan social-ekonomi telah terjadi, dan hal itu tentu membutuhkan respon yang tepat dari pemerintah maupun masyarakat. Desa-desa yang terletak di dekat pusat pertumbuhan dilaporkan telah mengalami perkembangan yang cepat: makin ramai, makin padat sehingga membutuhkan kualitas layanan yang lebih baik. Apakah perubahan yang dialami sejumlah desa tersebut merupakan indikasi perlunya dilakukan perubahan status desa menjadi kelurahan? Pertanyaan inilah yang dicoba dikaji dalam kegiatan ini.

Dalam Bab Penutup ini, selain dipaparkan beberapa temuan pokok dari studi yang dilakukan, juga dikemukakan beberapa saran tentang berbagai hal yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan perubahan status desa menjadi kelurahan.

1. Kesimpulan

Atas dasar kajian yang telah dilakukan, beberapa temuan pokok yang merupakan kesimpulan studi ini adalah:

Secara umum, masyarakat yang tinggal di lokasi penelitian umumnya mengaku tidak mengalami kesulitan untuk mencari berbagai layanan public, baik itu layanan kesehatan, administrasi kependudukan maupun layanan pendidikan:

sekolah untuk anak-anaknya. Sebanyak 80% responden mengaku jarak rumah mereka dengan layanan kesehatan relative dekat. Hanya 3,5% responden yang mengaku jarak rumahnya dengan layanan kesehatan terlalu jauh, dan 16,5% menyatakan jauh. Sebanyak 84% responden juga menyatakan jarak rumah mereka dengan sekolah bagi anak-anaknya relative dekat. Hanya 1,5% responden yang mengaku terlalu jauh, dan 14,5% menyatakan jauh. Untuk layanan administrasi kependudukan, sebanyak 66% responden mengaku jarak rumah mereka relative dekat. Namun demikian, cukup banyak responden (22%) yang mengaku jarak rumah mereka dengan kantor desa dan kantor kecamatan jauh, bahkan 12% mengaku terlalu jauh. Di antara berbagai layanan public yang dibutuhkan masyarakat, layanan yang dirasakan jauh dari tempat tinggal masyarakat adalah ketika mereka membutuhkan surat untuk usaha. Dari 200 responden yang diteliti, hanya separuh (50%) yang mengaku jaraknya dengan tempat tinggal mereka relative dekat. Sementara itu, sebanyak 38,5% responden mengaku jauh, dan bahkan 11,5% responden mengaku terlalu jauh.

Studi ini menemukan, rata-rata sekitar 90% lebih responden mengaku selalu mempergunakan sepeda motor ketika pergi ke Puskesmas (90%), Rumah Sakit (92%), dokter praktik swasta (92,5%), kantor kepala desa (90,5%), kantor kecamatan (93%), atau ketika mengantar anak ke sekolah. Sementara itu, bagi responden yang secara ekonomi mapan, sekitar 3-8%, mereka mengaku memanfaatkan mobil atau kendaraan roda empat miliknya untuk berkunjung ke berbagai pusat layanan public. Sekolah untuk anak-anak responden umumnya dekat, hanya dalam radius kurang dari 1 kilometer. Lokasi Kantor Kepala Desa umumnya juga dekat, sehingga sebagian besar warga mengaku tidak mengalami kesulitan untuk mengakses sekolah bagi anak-anaknya atau ketika membutuhkan mengurus surat di kantor balai desa.

Untuk Puskesmas dan Rumah Sakit, meski tidak sebanyak jumlah warga yang rumahnya hanya berjarak kurang dari 1 kilometer dengan Kantor Kepala desa, tetapi cukup banyak responden yang menyatakan rumah mereka jaraknya kurang dari 1 kilometer bila ingin mencari Puskesmas atau RS. Untuk tempat praktik dokter swasta, meski sebagian responden mengaku lokasinya relative jauh (lebih dari 2 kilometer, bahkan lebih dari 4 kilometer). Tetapi, sebagian besar

responden mengaku tidak terlalu mempermasalahkan. Lokasi KUA relatif jauh dari tempat tinggal responden. Sebagian besar responden menyatakan jarak rumah mereka dengan KUA lebih dari 2 kilometer, bahkan ada 19,5% responden yang mengaku jarak rumah mereka dengan KUA lebih dari 4 kilometer.

Menurut penilaian masyarakat, manfaat yang bakal mereka peroleh ketika desa mereka berubah menjadi kelurahan adalah upaya untuk mengurus administrasi kependudukan (85%) menjadi lebih cepat –di samping biaya yang harus dikeluarkan juga menjadi lebih murah (84%). Sebanyak 69% responden mengaku untuk layanan administrasi kependudukan menjadi lebih dekat dan prosedur mengurusnya pun menjadi tidak berbelit ketika desa tempat mereka tinggal berubah menjadi kelurahan.

Untuk layanan kesehatan dan pendidikan, sama seperti layanan administrasi kependudukan, menurut sebagian besar responden kondisinya diyakini akan lebih baik jika desa tempat tinggal mereka berubah menjadi kelurahan. Untuk layanan kesehatan, biaya yang dibutuhkan menjadi lebih murah (84,5%), dan proses kepengurusannya pun diyakini menjadi lebih mudah. Untuk layanan di bidang pendidikan, sebanyak 63,5% responden mengaku lokasi sekolah akan lebih dekat ketika desa tempat di mana mereka tinggal berubah menjadi kelurahan. Sebanyak 86% responden menilai biaya yang dibutuhkan akan lebih murah, dan 90,5% responden mengaku kondisi sekolah niscaya juga akan lebih baik.

Sebanyak 66,5% responden berharap dan meyakini perubahan status desa menjadi kelurahan akan membuat layanan kesehatan menjadi makin baik. Hanya 1,5% responden yang menyatakan kualitas layanan kesehatan akan makin buruk kalau desa mereka berubah menjadi kelurahan. Sebanyak 64% responden menyatakan kualitas layanan pendidikan cenderung akan makin baik jika desa mereka berubah status menjadi kelurahan. Sebanyak 34,5% responden menyatakan kualitas layanan pendidikan tetap, dan hanya 2,5% responden yang menyatakan kualitas layanan pendidikan akan makin buruk jika desa mereka berubah menjadi kelurahan.

Untuk layanan administrasi kependudukan, sikap responden kurang-lebih sama. Sebanyak 63% responden meyakini kualitas layanan administrasi

kependudukan akan bertambah baik jika status desa berubah menjadi kelurahan. Sejumlah informan menyatakan, dengan perubahan menjadi kelurahan, maka ketertiban dan jam kerja layanan kantor kelurahan akan lebih pasti daripada layanan di desa.

Untuk layanan pengembangan usaha, sebanyak 58,5% responden meyakini kondisinya akan lebih baik jika desa mereka berubah status menjadi kelurahan. Namun demikian, sebanyak 40% responden meyakini tidak akan terjadi perubahan kualitas layanan pengembangan usaha meski desa mereka berubah menjadi kelurahan.

Perubahan status desa menjadi kelurahan, menurut sebagian besar responden perlu dilakukan. Dari 200 masyarakat desa yang diteliti, sebanyak 43% menyatakan perubahan status desa menjadi kelurahan perlu dilakukan, dan bahkan 33% responden menyatakan sangat perlu dilakukan. Hanya 10,5% responden yang menyatakan perubahan status desa menjadi kelurahan tidak perlu dilakukan. Sementara itu, sebanyak 2,5% responden menyatakan sangat tidak perlu dilakukan.

Meski tidak semua, tetapi sejumlah responden mengeluhkan persoalan layanan publik yang diperuntukkan desanya. Di desa, ketika harus mengurus berbagai keperluan seringkali warga harus ke rumah pribadi Kepala Desa, sementara Balai Desa cenderung tidak banyak difungsikan. Untuk itu, ketika mereka ditanya bagaimana peluang perubahan status desa menjadi kelurahan, mereka umumnya setuju dan diharapkan dapat diperoleh manfaat seluas-luasnya bagi masyarakat setempat. Dengan dipimpin lurah diharapkan bantuan dari pemerintah akan lebih banyak yang masuk, terutama untuk masyarakat miskin.

2. Saran

Dalam rangka memastikan implikasi perubahan status desa menjadi kelurahan dapat berdampak positif bagi upaya meningkatkan kualitas layanan public bagi masyarakat, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah:

1. Untuk menghindari bias kepentingan subjektif dalam perubahan status desa menjadi kelurahan, perlu ditetapkan indikator yang disepakati bersama –selain data tentang keinginan sebagian besar masyarakat yang

setuju dilakukan perubahan status desa menjadi kelurahan. Indikator ini perlu ditetapkan sejak awal agar dapat dicegah motif-motif subjektif dari orang-orang tertentu, baik yang setuju maupun yang menolak perubahan status desa menjadi kelurahan. Indikator yang utama sudah barang tentu harus indikator yang menempatkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat sebagai dasar pertimbangan utama.

2. Perubahan status desa menjadi kelurahan, tentu akan menimbulkan perubahan status Kepala Desa menjadi Lurah berikut jajarannya. Sistem insentif dari desa menjadi kelurahan tentu berubah, karena insentifnya tidak lagi berupa tanah bengkok, tetapi lebih berupa gaji bulanan layaknya PNS. Kesiapan mental dari Lurah dan jajarannya sangat dibutuhkan agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran dan harapan.
3. Perubahan status desa menjadi kelurahan sudah barang tentu akan berimplikasi pada perubahan data kependudukan dari warga masyarakat yang wilayah kelurahan atau kecamatan di mana mereka tinggal mengalami perubahan atau pergeseran alamat. Misalnya, jika ada warga masyarakat yang semula di KTP tercatat tinggal di Desa A di Kecamatan B, kemudian ditata ulang dan masuk ke wilayah Kelurahan A di Kecamatan B, maka seluruh data kependudukan berikut implikasi lain yang mengikutinya tentu cepat atau lambat harus pula diubah. Alamat kantor, alamat rumah untuk keperluan surat-menyurat, alamat untuk urusan perbankan, pertanahan dan sertifikat kepemilikan tanah dan rumah, dan lain-lain, tentu harus pula berubah mengikuti penataan ulang wilayah desa yang terjadi. Dalam konteks ini, adalah tugas Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk bersikap pro-aktif dan memberikan kemudahan dalam proses perubahan data kependudukan sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Selain menempuh dan memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan hukum yang berlaku, untuk lebih memastikan keinginan masyarakat desa merubah status desa menjadi kelurahan dapat berhasil seperti yang diharapkan, yang tak kalah penting adalah bagaimana melakukan lobi-lobi politik yang memanfaatkan tokoh-tokoh kunci tertentu, baik di lembaga legislatif maupun eksekutif, atau lembaga lain yang memiliki posisi

bargaining dan lobi politik yang kuat. Lobi politik ini adalah jalur alternatif yang perlu dilakukan agar upaya dan keinginan untuk merubah status desa menjadi kelurahan dapat segera direalisasi (*).

DAFTAR PUSTAKA

Bryant, Coralie & Louise G. White, 1989. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta: LP3ES.

Benveniste, Guy., 1989. *Birokrasi*. Jakarta: Rajawali Press.

Budiman, Arief & Ph. Quarles van Ufford (Editor), 1988. *Krisis Tersembunyi Dalam Pembangunan: Birokrasi-Birokrasi Dalam Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

Chaniago, Adrinof A., 2001. *Gagalnya Pembangunan: Kajian Ekonomi Politik terhadap Akar Krisis Indonesia*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Christina, dkk., 2001. *Jaman Daulat Rakyat: Dari Otonomi Daerah ke Demokratisasi*. Yogyakarta: LAPERA Pustaka Utama.

Esman, Milton J., 1991. *Management Demensions of Development Perspectives and Strategies*. Oakwood, Conecticut: Kumarian Press.

Goldthorpe, J.E., 1992. *Sosiologi Dunia Ketiga, Kesenjangan dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.

Husken, Frans, Mario Putten, Jan-Paul Dirkse (eds.), 1997. *Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial: Indonesia di Bawah Orde Baru*. Jakarta: Kerjasama Perwakilan KITLV dan Gramedia Widiasarana Indonesia.

Kuncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.

Malensang, RK (2013), Proses Alih Status Desa Menjadi Kelurahan, Suatu Studi di Desa Poyowa Kecil, Kec. Kotamobagu Selatan. *Governance* Vol. 5 No 1, 2013.

Riyadi & Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah, Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Soegijoko, Budhy Tjahjati S dan BS Kusbiantoro, 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.

Sumodiningrat, Gunawan, 1987. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Bina Rena Pariwisata.

Setiono, Budi, 2002. *Jaring Birokrasi, Tinjauan Dari Aspek Politik dan Administrasi*. Bekasi: Gugus Press.

Widodo, Joko, 2001. *Good Governance, Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.